

BELAJAR MANAJEMEN AIR DI AL-ZAYTUN

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 38 TAHUN II ★ 11 JULI 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

JAKARTA MENCARI PEMIMPIN



ISSN 1907-977X



Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganya pun menawan tinggi. Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimport banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya.

Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya.

Bumi Indonesia memberi citarasa Beras Basmati yang spesifik. Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205

Protein : 4.2g

Carbohydrate : 44.5g

Total Fat : 0.44g

Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg

Selenium : 11.8mcg

Thiamine : 0.26mg

Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The Truostar Health Encyclopedia



Sampul/Illustrasi:
Dendry Hendrias

Edisi No. 38/Th.IV/ 11 - 24 Mei 2007

DARI REDAKSI	4
SURAT KOMENTAR	5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA	7
BERITA TERDEPAN	12
VISI BERITA	13

BERITA UTAMA

JAKARTA Mencari PEMIMPIN

Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta wajar jika memiliki sensasi tersendiri, bukan hanya kepada warganya, tetapi juga warga lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, selain sensasi keibukotaan Jakarta, pemilihan ini juga akan menjadi ajang pilkada paling besar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari Rp 124 miliar dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada yang akan melibatkan lebih dari lima juta pemilih. 14



Memilih Pengganti Gubernur Sutiyoso	16
Foke Masih Sendiri	18
Adang Giat Menebar Pesona	19
Sarwono Kandidat Cagub Alternatif	20
Jakarta Membutuhkan Lebih dari	21
Cagub Independen Ditolak Parpol	22
Menyoal Asal Usul Deputi	24
PR Sutiyoso untuk Gubernur Baru	26
Warga Tak Peduli Pilkada DKI	28

BERITA POLITIK

Pelopor Siap Pemilu	29
Pemerintah Prioritaskan UU Politik	29
Dicari, Tokoh Muda Calon Presiden	30
Tatkala DPD Minta Jabatan Menteri	31

BERITA KHAS

Jalan Berliku Menuju Reshuffle Kabinet	32
--	----



LENTERA

BELAJAR MANAJEMEN AIR DI AL-ZAYTUN

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami siklus krisis air. Baik krisis air akibat kekeringan maupun krisis (bencana) air akibat banjir. Anehnya, bangsa ini seperti tidak mau belajar dari pengalaman, dan secara berulang selalu terperosok ke lubang (krisis air) yang sama.....34

BERITA TOKOH

Azyumardi Azra	40
----------------------	----

BERITA DAERAH

Administrasi Keuangan Pemda Purwakarta	41
Angkot Purwakarta Minta Rute Bis	41
Mengenangkan, Nasib Ribuan Buruh	42
Layak Hidup Belum Cukup	43

BERITA PROFIL

HM Ali Umri, SH, MKn	44
----------------------------	----



BERITA HANKAM

Sesko TNI Siapkan Kader Unggulan	46
--	----



Tentara Negeri Singa Bisa Latihan	47
Laksda TNI Moh.Sunarto Pimpin Seskoal	48
Kasum ke Ambon dan Manado	48

BERITA EKONOMI

Lokakarya Investasi UNCTAD- PBB diKukar	49
Kelangkaan Akibat Penggunaan	50
Gratifikasi Bulog dan Gairah Petani	51

BERITA HUKUM

Vonis yang Tak Disambut	52
Fatwa Untuk Mazi	52
Menciduk Penilap di Negeri Singa	53
Giliran Adik Tersayang	54

BERITA KESEHATAN

Supaya Mudah Mencari Obat	55
---------------------------------	----

BERITA NASIONAL

UN Dicemari Kecurangan	56
------------------------------	----

BERITA Hiburan

Heroes Musim Kedua	57
--------------------------	----

BERITA MANCANEGERA

Indonesia Bukan Bolivia	58
Menepis Bayang-Bayang Masa Lalu	59

BERITA OLAHRAGA

Antara Dendam dan Harapan	60
---------------------------------	----

LINTAS TAJUK

Tangis Ki Hajar Dewantara	61
---------------------------------	----

BERITA IPTEK

Mengenal Kehebatan Web 2.0	62
----------------------------------	----



BERITA PEREMPUAN

Rachmawati Soekarnoputri	64
--------------------------------	----

BERITA BUDAYA

Opera Jawa Film Asia Terbaik	65
Nagabonar Jadi Jawara	65
Diskusi Putu dan Mahasiswa	65

BERITA MEDIA

Rating Bukan Segalanya	66
------------------------------	----

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Syahbuddin Hamzah (Redaktur Eksekutif)
Mangatur Loriecide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon
Henry Maruwas

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Loriecide Paniroy

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Purwakarta: Bernard Sihite,
Tarakan: Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citra Prinsip Publikitas Indoaprint

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Herni Dewi Farida

Kuangan dan Umum:
Mangatur Loriecide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X



foto: berindo wilson

Syaykh Al-Zaytun DR AS Panji Gumilang saat wawancara dengan Pemimpin Redaksi dan wartawan Majalah *Berita Indonesia*.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta sebentar lagi akan makin terasa. Bila tidak ada aral melintang calon gubernur (cagub)/wakil gubernur (wagub) sudah dapat diketahui oleh publik setelah tanggal 28 Mei. Namun, sebelum tiba ke sana, masyarakat ibukota masih bersikap menunggu sebab masih adanya tarik ulur politis dari partai-partai yang dominan dalam memilih cagub/wagub yang cocok dengan kepentingan mereka. Setidaknya ada empat nama cagub yang cukup dominan berseliweran di media massa yaitu Adang Daradjatun, Fauzi Bowo, Sarwono Kusumaatmadja dan Agum Gumelar. Masing-masing cagub ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Keberhasilan untuk memikat hati para pemilih tentu tergantung pada keberhasilan mereka menyuarkan visi misinya dalam kampanye dari Juni sampai Juli nanti. Agar pembaca lebih memahami seluk beluk Pilkada DKI Jakarta yang langsung dan pertama ini, *Berita Indonesia* menyajikannya secara khusus dalam Laporan Berita Utama.

Tidak terlupakan pula, kami menyajikan Berita Khas tentang *reshuffle* kabinet jilid 2 yang sempat membuat masyarakat terutama para menteri selama sebulan terakhir menahan nafas. Siapapun menteri yang dipercaya oleh Presiden, rakyat cuma ingin satu hal, pemerintah menunjukkan dan mempraktekkan keberpihakannya membela rakyatnya. Kami juga mengingatkan pembaca agar tidak lupa membaca berita-berita menarik lainnya seperti Berita Newsmaker, Berita Politik, Berita Hukum, Berita Ekonomi, Berita Iptek, dan sebagainya.

Yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya dan jangan sampai dilewatkan adalah membaca sekelumit manajemen dan teknologi pengelolaan air di Al-Zaytun. Alangkah baik bila para penentu kebijakan negeri ini meluangkan waktu melihat proyek Tirtaraksa Candrakirana Bangsa di kampus ini. Untuk mengetahuinya lebih lanjut pembaca bisa membolak-balik rubrik Lentera.

Selamat menikmati, semoga sajian kami berkenan di hati pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke

Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

• http : www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
• email : redaksi@berindo.com
• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736
Fax. (021) 8293113, 9101871

Beda Indonesia Dengan China

Beda negara, beda juga cara penayangan pelaku tindak kriminal. Kami sering mengadakan kunjungan dinas ke negara China, sehingga kami secara tidak langsung sering melihat dan membandingkan bagaimana negara ini merespon kejahatan dari sisi media. Dari pengamatan kami, yang terjadi di negara China adalah: semua kriminal, mulai dari pencopet sampai dengan koruptor kelas kakap saat diberitakan di media, dengan jelas media menampilkan wajah mereka. Sehingga hal ini menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan dan juga efek positif bagi mereka yang akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi informan, korban dan saksi dalam penayangan wajah selalu

dikaburkan. Hal ini menimbulkan efek yang positif bagi pelapor, sehingga secara psikologis merasa dilindungi. Adapun hal ini kami tulis adalah demi penegakan hukum yang sedang gencargencarnya dilakukan oleh bangsa kita, agar menjadi bangsa besar. Demikian surat kami semoga bermanfaat.

Benedictus Venus
benedictus_vino@yahoo.com

Perhatikan Nasib Buruh

Membaca berita, para karyawan PT Freeport menuntut gaji dengan kisaran Rp 3,1 sampai 3,6 juta per bulan. Sebenarnya ini adalah angka yang normal untuk standar gaji di Indonesia sekarang ini, karena mengingat biaya hidup yang harus ditanggung cukup besar sekali. Bagus kalau pihak Freeport mengabdikan tuntutan karyawan mereka dengan menaikkan angka gaji mereka hingga Rp 3,1 sampai 3,6 juta per bulan. Karena bila dibandingkan dengan gaji para buruh di negara-negara lain, di Indonesia ini amatlah rendah, apalagi bila kita sangkutkan dengan angka inflasi yang tinggi, dan daya beli masyarakat sangatlah rendah. Bila pendapatan para buruh di Indonesia ini bisa mencapai angka ini, saya yakin roda perekonomian akan semakin bagus. Orang akan mampu mengeluarkan uang untuk membeli ini dan itu, maka makin

banyak pula lapangan pekerjaan yang tercipta. Para pengusaha di negara ini hanya mau untung besarnya saja, tanpa mempedulikan nasib karyawannya. Kita ambil contoh saja di Malaysia, gaji buruh di sana berapa kali lipat dari gaji buruh di negara ini? Tapi toh, para pengusaha tidak rugi dan mereka tetap mendapat untung. Jadi sebenarnya, ini tergantung kesadaran dari para pengusahanya dan juga Pemerintah agar dapat menekan angka inflasi, agar daya beli masyarakat meningkat.

Sugiharto
sugiharto73@yahoo.com.au

Ubah Perilaku Aparat

Sulit untuk mengharapkan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk menceritakan hal yang baik tentang keadaan Indonesia. Banyak TKI yang pulang ke Indonesia untuk liburan tapi dicegat oleh orang Indonesia sendiri dari pihak bandara International untuk diperas. Saya melihat sendiri untuk pertama kalinya ketika pulang naik Qatar Airlines. Terlalu kelihatan untuk bilang itu bukan pemerasan. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal yang baik kalau mereka tidak pernah diperlakukan dengan baik. Kalau Indonesia mempunyai citra yang baik, ubah dulu perilaku dari pihak pemerintah, DPR dan pegawai negeri/

BUNG WARTO



birokratnya.

Lee Shiryu
lee_shiryu@yahoo.com.sg

Jangan Malu Jadi WNI

Banyak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mengaku malu mengakui diri sebagai warga negara Indonesia karena anggapan bahwa Indonesia adalah negara miskin, mempunyai tingkat korupsi yang tinggi, atau teroris. Menurut saya, ini sangatlah memprihatinkan. Dalam kasus ini, serendah itukah tingkat loyalitas kita terhadap negara Indonesia sampai kita malu mengakui bahkan membuang identitas kenegaraan kita yang sebenarnya? Tidak dapat disangkal bahwa banyak *statement* yang kurang mengenakan melekat dan diidentikkan dengan negara Indonesia. Tetapi apakah kita akan membiarkan *statement* itu melekat terus dengan Indonesia tanpa adanya usaha untuk memperbaiki bahkan menghapusnya? Inilah peran serta para pelajar dan pekerja Indonesia di luar negeri untuk menunjukkan sikap dan sifat yang mencerminkan budaya khas Timur, budaya asli bangsa Indonesia. Kita tidak dapat selalu menyalahkan pemerintah karena terciptanya interpretasi-inter-

pretasi seperti ini karena ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Semutlaknya, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengubah preseden buruk tentang bangsa Indonesia di mata dunia Internasional. Bukan malah malu mengakui diri sebagai warga negara Indonesia dan tidak berbuat sesuatu untuk memberi sedikit sumbangsih bagi perbaikan citra bangsa dan negara Indonesia. Semoga rasa kebangsaan tumbuh di hati setiap warga negara Indonesia di mana pun mereka berada.

Indra Kho
indra_kho_exposed2007@yahoo.com.au

Budi Pekerti Dilupakan

Ingat jaman tahun 60-an, di sekolah ada pelajaran Budi Pekerti. Nah, sekarang itu yang hilang tidak diberikan lagi dan guru pengajarnya juga tidak diberikan visi untuk menanamkan budi pekerti karena tidak ada dalam kurikulum misalnya buku panduan. Inilah yang menjadikan anak-anak kita era sekolah tahun 1965 sampai sekarang banyak yang tidak mempunyai dasar moral yang mengajarkan tentang penempatan diri, harga diri, menyangkut kesopanan dan tata krama sosial dan se-

macamnya. Lebih jauh kita dapat lihat dalam berita sehari-hari, lalu kita lihat dalam pengalaman di jalan raya, pengalaman dalam komunitas rumah dan lingkup kerja, lingkup sekolah. Tata krama benar-benar akan sulit diperbaiki jika sejak Sekolah Dasar tidak ditata.

Margereth
rtdxbip@yahoo.co.id

Khawatir Masalah Teknis UN

Saya selaku siswa yang baru menyelesaikan UN khawatir akan hasil UN yang telah lalu. Bukan karena tidak bisa mengerjakan soal akan tetapi saya khawatir dengan kesalahan teknis yang mungkin terjadi. Contohnya kesalahan pengisian identitas, kode soal, lembar jawab rusak sampai masalah pensil palsu. Hal ini menjadi kekhawatiran saya dan teman-teman. Oleh karena itu, mewakili siswa se-Indonesia, saya mohon perhatian tim pemeriksa UN untuk mengecek kembali alasan ketidaklulusan siswa, sehingga kesalahan teknis ini dapat ditemukan dan diperbaiki. Jangan sampai siswa yang layak lulus tidak lulus sedangkan yang tidak layak bisa lulus. Mohon perhatian dari Tim pemeriksa UN yang terhormat. Di tangan anda lah masa depan kami bergantung.

Visca Amanda P
amandacutez@yahoo.com

Peraturan Lajur Kiri dan Nyalakan Lampu Lenyap

Yang terhormat pihak yang berwenang. Saya ingin menanyakan bagaimana kelanjutan dari peraturan yang mengharuskan sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari dan juga lajur khusus sebelah kiri? Saya kasihan saja melihat sepeda motor yang sudah menyalakan lampu di siang hari, tetapi ada juga yang tidak menyalakannya, kan jadi tidak adil. Sedangkan pembahasan mengenai hal ini seolah lenyap ditelan waktu. Tidak ada kejelasan apakah

harus menyalakan lampu atau tidak. Sebaiknya peraturan ini dibakukan segera atau ditiadakan saja agar tidak membuat rancu. Mengenai lajur khusus sebelah kiri, saya sebagai orang yang beberapa kali mengendarai motor menilai sepertinya tidak membawa banyak manfaat dan cenderung membahayakan. Bagaimana jika ada angkutan umum yang tiba-tiba berhenti mendadak, atau mobil yang hendak masuk ke kantor/gedung di sebelah kiri. Lalu jika motor hendak belok kanan atau memutar arah, bukankah hal ini menjadi hal yang rawan kecelakaan? Sebaiknya lajur khusus itu ditiadakan saja, biarkan motor menyaliap di antara mobil, memang itu kan keistimewaan motor? Yang tidak boleh jika motor naik ke trotoar, itu harus ditindak. Tetapi jika masih berada di badan jalan, kenapa tidak? Bayangkan jika motor harus antri paralel di jalur khusus, bukankah itu menjadi lebih macet lagi ya? Karena lebar jalur khusus tidak seberapa, tetapi motornya banyak banget. Mohon tanggapannya. Terima kasih.

Deka Octa Aribawa
dkaribawa@yahoo.com

Pedestrian Sudirman-Thamrin Kotor

Saya hanya ingin sumbang saran saja ke Pemerintah Kota DKI Jakarta, bahwa keadaan pedestrian untuk pejalan kaki sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin tidak dalam keadaan yang bersih. Banyak kotoran dan debu serta sampah di sepanjang jalan tersebut. Saya rasa pemilik dan pengelola gedung di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin tidak keberatan untuk memberikan waktu dan tenaganya membersihkan dan merawat pedestrian tersebut. Sangat disayangkan pembuatan pedestrian yang telah menelan banyak biaya tidak dirawat sebagaimana mestinya.

Yudhi Anggoro
judianggoro@yahoo.com

PASTIKAN TARIF IKLAN **BERITA INDONESIA**

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimmed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimmed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimmed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimmed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimmed	204 x 87 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimmed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		© Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. (021) 8293113, 9101871

BERITA

In Headnews

26/04/2007

Sejumlah Tokoh Terima Penghargaan HaKI

Sejumlah tokoh dan perusahaan nasional menerima penghargaan dari pemerintah atas upaya mereka dalam penegakan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) di bidang kerja masing-masing. Penghargaan bernama Integrity Award itu diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla dalam acara puncak peringatan Pekan HAKI Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta. Menurut Kalla, penghargaan terhadap HaKI orang lain sama artinya dengan menghargai intelektual diri sendiri. "Tanpa itu, akan berdampak pada mandeknya inovasi dan daya cipta orang yang memiliki kemampuan," ujar pria asal Makassar ini. Penghargaan dibagi dalam 7 kategori. Kategori perbukuan diterima oleh Tim Penanggulangan Masalah pembajakan buku. Kategori industri replikasi cakram optik diraih PT Dynamitra Tarra. Kategori produser dan rekaman suara diberikan kepada PT Naga Swara Sakti. Kategori produser film dan sinetron diterima PT Alenia Citra Multimedia. Kategori media massa diperoleh Bisnis Indonesia. Kategori tokoh individu disematkan kepada Prof Eddy Damin, Bambang Kesowo, Prof A Zen Umar Purba dan Franky Sahilatua serta Ketut Sunadi. Sedangkan kategori aparat penegak hukum diraih oleh Polda Jatim.

27/04/2007

Ekstradisi RI-Singapura Diteken

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura akhirnya ditandatangani Menlu RI dan Menlu Singapura di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali. Selain tindak pidana korupsi, dalam perjanjian itu disepakati juga 31 tindak kejahatan dan pidana lainnya antara lain tindak pidana ekonomi, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pelanggaran hukum perusahaan dan hukum kepelitiran. Selain itu ada juga tindak pidana yang melanggar hukum mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Juga tindak pidana terorisme termasuk pendanaan aktivitas terorisme. Perjanjian ini berlaku surut 15 tahun setelah proses ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen dua negara. Selain perjanjian ekstradisi, ditandatangani juga perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Perjanjian ini ditandatangani Menteri Pertahanan dan Panglima Militer kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, ditandatanganinya perjanjian ini merupakan langkah besar untuk menyelesaikan berbagai kerjasama yang telah ada.

28/04/2007

Waria Masuk Calon Komisioner Komnas HAM

Panitia seleksi pemilihan komisioner

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012 dinilai sejumlah pihak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ini tampak dari 43 calon komisioner pilihan mereka yang dinilai terbaik dari 178 calon yang pernah mendaftarkan diri. "Panitia seleksi juga tidak diskriminatif. Buktinya, saya dari kelompok minoritas, yaitu waria, dapat lolos. Padahal, baru kali ini kelompok kami mengajukan calon. Betul-betul mengagetkan," kata Yulianus Rettooblaut, salah satu calon komisioner yang lolos. Rettooblaut, yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Waria Se-Indonesia, menuturkan, kelolosan dirinya telah memunculkan semangat baru di kalangan kaum waria untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP). Sebab, sulitnya mendapatkan KTP menjadi awal kesulitan lain yang dialami waria, misalnya untuk memperoleh pekerjaan. "Semoga seleksi di DPR kelak juga tidak diskriminatif," harap Rettooblaut yang menurut data tahun 2005, organisasinya punya 3.000.887 anggota. Direktur Program Imparsial, Robertus Robert, berharap, DPR dapat memilih calon, terutama yang mampu melakukan lobi-lobi politik HAM. Sebab, jika dilihat dari keberagaman latar belakang dan pengalaman kerja di bidang penegakan HAM, calon pilihan panitia seleksi tidak ada yang diragukan. Bahkan, mereka

Karikatur Berita

dapat disebut yang terbaik dari calon yang mendaftar. "Kemampuan lobi ini amat dibutuhkan karena ganjalan peneakan HAM selama ini ada pada politik HAM. Ini terlihat dari banyaknya kasus yang macet penyidikannya, seperti Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Kemacetan ini hanya dapat ditembus jika anggota Komnas HAM yang kelak terpilih mampu melakukan lobi politik HAM, misalnya dengan DPR, kejaksan, atau kepolisian," ujar Robert.

29/04/2007

Komunitas Tari ISI Solo Menari 24 Jam

Para penari di Solo menggelar tarian selama 24 jam tiada henti memperingati Hari Tari Internasional sejak Minggu hingga Senin pukul 06.00 WIB. Acara ini didukung kurang lebih 1.500 orang penari yang sebagian besar adalah para dosen dan mahasiswa di Jurusan Tari ISI Surakarta. Lokasi pertunjukan seluruhnya berada di kompleks ISI Surakarta, baik di lokasi terbuka maupun di lokasi tertutup (gedung). "Pesertanya sekitar seribu orang antara lain dosen, mahasiswa dan juga alumni Jurusan Tari ISI Surakarta. Sedangkan penari ISI dari luar sekitar 500 orang," kata ketua panitia, Dwi Wahyudiarto. Yang dimaksud penari dari luar oleh Wahyu adalah dari sejumlah daerah baik dari sanggar, padepokan, komunitas, perguruan tinggi yang mengajarkan seni tari maupun utusan dari provinsi di luar Jawa yang selama ini menjalin hubungan baik dengan ISI Surakarta. Selain itu, hadir pula para penari dari luar negeri. Di

antara 1.500 pendukung acara, Eko Suspendi, dosen Jurusan Tari ISI Surakarta benar-benar menari selama 24 jam tanpa henti. Eko mengatakan tekad itu didorong oleh komitmennya terhadap dunia tari yang telah digelutinya sejak kecil.

30/04/2007

Kapolsek Cisarua Tersangkut Kasus Narkoba

Kasus polisi tersangkut narkoba bertambah lagi. Jumantoro, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Cisarua Bogor ditangkap aparat Polda Metro Jaya, Senin (30/4) malam. Ia kedapatan membawa 54 gram sabu-sabu, 100 gram heroin dan 1.600 butir ekstasi. Kepada penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, ia mengaku hanya mengamankan barang bukti Narkoba saat dibekuk. Setelah ditangkap karena terkait kasus narkoba, Jumantoro dicopot dari jabatannya digantikan oleh Wakil Kepala Sub-detachment Gegana, Brimob Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Mantiri (2/5). Tidak hanya dicopot dari jabatan Kapolsek, Jumantoro mungkin juga akan dipecat dari keanggotaan Polri. Lulusan Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri angkatan 1985 ini dikenal perkas di matras judo pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Hampir 15 tahun lalu, tepatnya Jumat 26 Agustus 1989, ia merebut medali emas, kelas 65 kilogram SEA Games XV di Malaysia. Terakhir, tahun 1992, pria yang belajar judo sejak kelas lima sekolah dasar itu bergelar pejudo terbaik nasional. Prestasi Jumantoro di kepolisian pun tergolong memuaskan. Ia

pernah membongkar dan mengakhiri maraknya kasus kawin kontrak warga negara Arab di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, dan kasus penggelapan mobil. Rumah dan sejumlah kendaraan yang tergolong "lebih" untuk seorang polisi berpangkat ajun komisaris di Kampung Bendungan, Desa Ciasin, Ciawi, Bogor, pun ia punya. Pendek kata, ia nyaris memiliki semuanya, prestasi diri, keluarga yang baik dan berprestasi, serta harta yang lebih dari cukup.

01/05/2007

Iklan Asing Dilarang

Kapitalisasi industri periklanan televisi di Indonesia yang mencapai Rp 40 triliun per tahun kini dikuasai pengusaha asing. Demi melindungi industri periklanan dalam negeri, terhitung mulai 1 Mei 2007, pemerintah melarang pemasangan iklan untuk media televisi di Indonesia yang berasal dari pengusaha, bintang iklan, dan bermuatan asing. "Malaysia sudah melakukan perlindungan sejak lama, sehingga mereka mampu mengembangkan industri periklanan dalam negerinya," ujar Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil usai menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Senin (30/4). Menurut Sofyan, pertumbuhan industri periklanan televisi mencapai sekitar 20 persen per tahun. Dengan demikian, industri dalam negeri perlu mendapatkan dukungan agar dapat menikmati keuntungan tersebut. Dengan adanya larangan tersebut, iklan televisi yang ditayangkan di dalam negeri harus

Karikatur Berita



dikerjakan orang Indonesia, berlokasi, bintang iklan, dan disutradarai orang Indonesia. Setiap pemasang iklan harus memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut telah memenuhi standar, yakni mengandung unsur dalam negeri. Pemerintah memberikan batas waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk iklan televisi yang tetap menggunakan materi asing untuk mengubahnya ke kandungan lokal. Larangan tidak berlaku untuk iklan yang menggunakan bintang asing sebagai ikon. Misalnya, pegolf dunia Tiger Wood yang menjadi ikon dalam iklan produk jam tangan atau iklan pariwisata asing yang memang harus mengambil gambar dari tempat aslinya. Akan tetapi, bagi produk asli Indonesia yang menggunakan kandungan asing dipastikan tidak diperbolehkan tayang di dalam negeri.

Dunia Peringati Hari Buruh

Hari Buruh tanggal 1 Mei disambut di berbagai penjuru dunia, terutama dengan unjuk rasa, baik yang damai maupun yang rusuh. Mereka meminta kondisi kerja dan upah serta perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Di Istanbul, polisi Turki menyerbu para demonstran kiri yang memperingati ulang tahun sebuah demonstrasi Hari Buruh yang dulu membawa korban jiwa. Ketika itu, orang-orang bersenjata yang tidak diketahui identitasnya pernah melepaskan tembakan kepada puluhan ribu demonstran pada Hari Buruh tahun 1977. Insiden itu menewaskan 34 orang, sebagian karena terinjak-injak massa yang panik. Sedangkan di Rusia, puluhan

ribu orang menuntut kenaikan gaji dan dana pensiun. Namun demonstrasi Hari Buruh di Rusia menghindari kritikan terhadap Kremlin. Unjuk rasa Hari Buruh juga dilakukan di Pakistan, Filipina, Zimbabwe, Korea Selatan, Jepang, Iran, dan negara-negara lain. Sedangkan di Jakarta, ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, sebelum menduduki Jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Demi keamanan, kawasan Jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, dan Medan Merdeka Selatan tertutup untuk arus lalu lintas, mulai pukul 10.00 hingga 15.00. Dalam aksinya, para buruh menuntut pemerintah menghilangkan sistem kerja kontrak karena hanya menguntungkan pengusaha. Mereka juga menolak upah murah bagi buruh, dan meminta 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Di Serang, Bekasi, dan Tangerang, juga berlangsung aksi buruh serupa. Sekitar 3.000 buruh dari puluhan perusahaan di Provinsi Banten, misalnya, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten di Serang. Di kota lain seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Kediri, Jember, Malang, Pekalongan, Palembang, Bandar Lampung, Bengkulu, dan Balikpapan, aksi buruh berlangsung aman.

02/05/2007

Inu Kencana dan Munir Dapat Penghargaan Peduli HAM

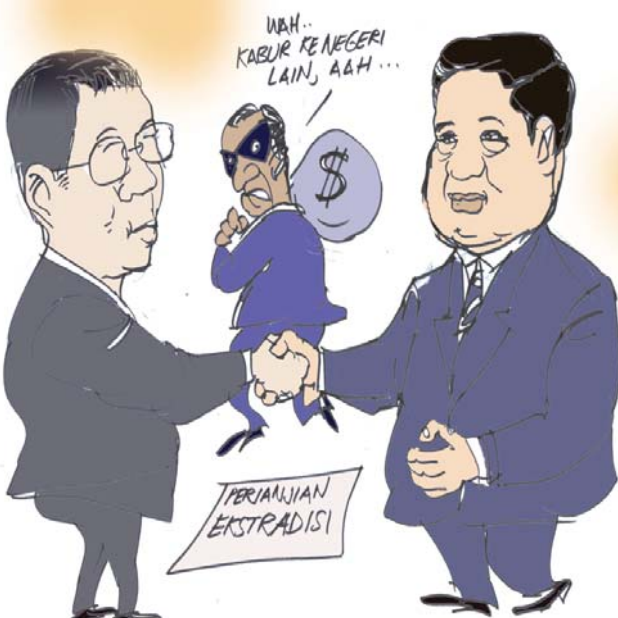
Dosen Institut Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN) Inu Kencana Syafei, aktivis HAM Munir dan stasiun televisi SCTV mendapat penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize 2007. Ketiganya dianggap telah memajukan HAM di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM) Ahmad Hambali, ada tiga kategori penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize 2007, yaitu *human rights promotor and educator* untuk Inu Kencana, *human rights life time achievement* untuk Munir, dan *human rights campaigner* untuk SCTV. Ahmad menambahkan, penghargaan itu diberikan berkaitan dengan berdirinya LPHAM ke-41 yang dipelopori oleh HJC Princen dan Yap Thiam Hien pada 29 April 1966. Penghargaan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh LPHAM. Penghargaan diberikan secara langsung kepada ketiganya di Kantor Partnership, Gedung Surya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

03/05/2007

Hanya Lima Departemen Boleh Naikkan Anggaran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya pemborosan dan pembelanjaan yang konsumtif agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi. Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara bertanggung jawab. Presiden mengemukakan hal itu di hadapan 33 gubernur dan 434 bupati/wali kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Na-



sional 2007 di Jakarta. Acara itu juga dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Presiden menyoroti pembangunan gedung perkantoran pemerintah, pembelian kendaraan dinas mewah di jajaran pemerintah daerah dan pusat, biaya perjalanan, kunjungan kerja, serta biaya pengamanan pejabat penting yang selama ini menggunakan anggaran belanja negara maupun daerah. Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang pemerintah daerah merealisasikan belanja modal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 agar nilai investasi nasional meningkat. Tahun 2005, total rata-rata realisasi anggaran belanja modal daerah hanya 19,3 persen dari total APBD, tahun lalu 24,8 persen. Anggaran belanja modal merupakan investasi pemerintah untuk membiayai proyek sektor riil. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada tahun 2008 diperlukan investasi Rp 1.180 triliun. Wapres Jusuf Kalla menyatakan, untuk meningkatkan anggaran belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah hanya membolehkan lima departemen yang dapat menaikkan anggaran pembangunannya dalam Rancangan APBN 2008. Lima departemen itu adalah Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, Pendidikan Nasional, dan Kesehatan. Pemerintah ingin fokus memprioritaskan anggaran pada sektor yang mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan

infrastruktur serta peningkatan produktivitas pertanian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

04/05/2007

Sidang IPU ke-116 di Bali Hasilkan Empat Resolusi

Sidang IPU ke-116 yang berlangsung sejak 28 April hingga 4 Mei, menghasilkan empat resolusi dan sebuah pernyataan Presiden Sidang IPU ke-116 mengenai pemanasan global. Selain resolusi mengenai terorisme berjudul "Kerja Sama Internasional Memerangi Terorisme, Akar-akar Penyebabnya dan Pendanaannya, Termasuk Pendanaan Lintas Batas", yang didalamnya terdapat desakan agar segera dilakukan penarikan pasukan asing dari Irak, tiga resolusi lainnya adalah resolusi berjudul "Memajukan Keberagaman dan Hak Setara untuk Semua melalui Demokrasi yang Universal dan Standar-standar Pemilihan Umum", resolusi berjudul "Penciptaan Lapangan Kerja dan Keamanan Pekerja di Era Globalisasi", dan resolusi berjudul "Memastikan Penghormatan untuk dan Eksistensi Bersama antara Semua Masyarakat Beragama dan Keyakinan dalam Sebuah Dunia Global". Sidang Majelis IPU ke-116 di Bali ini dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono, selaku tuan rumah. Sebelumnya, Sidang IPU itu dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Presiden IPU Pier Ferdinando Casini. Dalam sidang IPU itu, Presiden Yudhoyono mengharapkan IPU, yang berdiri sejak 1889 dan lebih tua dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), membangun hubungan internasionalisme atas dasar kemitraan. Sedangkan Presiden IPU Pier Ferdinando Casini dalam sambutannya menekankan dampak pemanasan global yang menjadi tema dari IPU ke-116 dan dampaknya terhadap perdamaian. Sidang IPU ke-116 diikuti 1.329 anggota delegasi dari 126 parlemen nasional, 5 asosiasi parlemen, dan 28 pengamat dari berbagai organisasi internasional. AS saat ini tidak menjadi anggota IPU. Sebelumnya AS pernah menjadi anggota IPU, tetapi kemudian keluar.

05/05/2007

Mayweather Kalahkan Oscar

Pertandingan dua selebritas tinju itu antara Floyd Mayweather Jr dan Oscar De la Hoya berlangsung jauh dari harapan 16.200 penonton yang memadati MGM Hotel serta jutaan penonton televisi sedunia. Tidak ada jual beli pukulan dahsyat, seperti pertemuan antara Juan Manuel Marquez dan Marco Antonio Barrera pada pertengahan Maret lalu. Dalam pertandingan ini, Mayweather, pemilik rekor 38-0 mengalahkan juara dunia kelas menengah ringan WBC, Oscar De la Hoya dengan selisih angka di Las Vegas. Dari statistik pertandingan, Mayweather yang menerima bayaran 10 juta dollar AS (setara dengan Rp 90 miliar)- belum termasuk bayaran dari persentase pay per view total sebesar 19 juta dollar AS - mendaratkan 207 dari total 481 pukulan. Oscar tercatat hanya 122 dari 587 pukulan. Usai bertanding, Mayweather menyatakan niatnya untuk

Karikatur Berita



pensiun dari tinju, "Saya ingin pensiun. Sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Saya ingin meluangkan waktu lebih banyak buat anak-anak," kata Mayweather, pria berkulit hitam ini.

06/05/2007

Mahathir Tampil di Pengadilan

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk pertama kalinya tampil di pengadilan. Mahathir memberikan kesaksian atas kasus penyerangan terhadap dirinya yang terjadi tahun lalu. Tersangka, Nik Sapeia Nik Yusoff (53), adalah mantan kepala negara bagian dari Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) yang pernah dipimpin Mahathir selama 22 tahun sebelum turun pada Oktober 2003. Dalam sebuah rangkaian tur politik pada Juli 2006, Mahathir diserang dengan semprotan merica saat hendak memberikan pidato di hadapan 1.500 orang, tidak lama setelah tiba di Negara Bagian Kelantan. Dalam kesaksiannya yang berlangsung selama berjam-jam tersebut, Mahathir mengaku mengenal Nik Sapeia selama hampir 20 tahun dan menganggap dia sebagai teman. Jika terbukti atas serangan itu, Nik Sapeia akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara, atau denda, atau keduanya.

07/05/2007

Reshuffle Jilid 2

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle (perombakan)

kabinet di Istana Merdeka, Jakarta pukul 15.00. Empat menteri dan satu pejabat setingkat menteri dicopot, serta dua menteri dirotasi. Empat menteri yang dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu dalam perombakan kabinet kedua adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Negara BUMN Sugiharto, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, serta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Selain itu, Presiden juga mengumumkan empat menteri barunya, yaitu Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, serta Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dirotasi menjadi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dirotasi menjadi Menteri Negara BUMN. Pelantikan menteri baru tersebut dilakukan Rabu (9/5). Selama rencana perombakan kabinet mengemuka, Presiden mengaku mendapat tawaran dari berbagai pihak berupa 25 nama tokoh untuk dimasukkan ke kabinet. Presiden mengaku tidak bisa menerima semua karena perombakan ini terbatas. Mengenai Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf yang sakit dan dirawat di Singapura, Presiden mengatakan, "Setelah saya terima laporan lengkap, definitif, saya akan ambil keputusan apakah dapat

melanjutkan tugas atau diganti."

08/05/2007

Amandemen UUD 1945 Tinggal Selangkah Lagi

Perjuangan para anggota DPD mengulirkan amandemen kelima segera memasuki tahap baru setelah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat di DPR memberi dukungan penuh. "Hari ini, 56 dari 60 anggota fraksi kami menandatangani usulan dukungan amandemen UUD 1945. Dengan adanya tambahan dukungan dari 56 anggota maka sudah lebih dari 1/3 anggota parlemen yang menandatangani dukungan amandemen kelima," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan di Jakarta. Ini berarti sudah ada 259 anggota parlemen yang mendukung amandemen dimana sudah melebihi persyaratan dukungan minimal yaitu sebanyak 226 suara, atau 1/3 dari 678 anggota DPR dan DPD. Esoknya (9/5), dukungan usul perubahan itu disampaikan pada pimpinan MPR. Merujuk tata tertib MPR, usul itu dibahas paling lambat 90 hari sejak diterima. Jika syarat usul perubahan terpenuhi, pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menyelenggarakan sidang MPR. Sedang kuorum sidang paripurna jika hadir setidaknya dua pertiga jumlah anggota MPR atau sebanyak 452 orang anggota. Usul perubahan sah jika disetujui lebih dari separuh jumlah anggota MPR atau minimal 340 orang. Perubahan konstitusi yang diusulkan DPD adalah pasal 22D UUD 1945 mengenai kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang (UU).



Kubu Buruh Terbelah

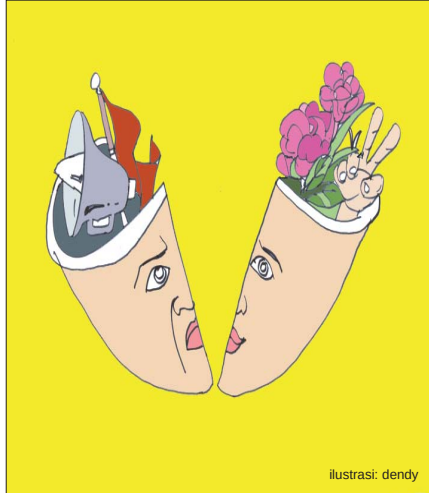
Aksi buruh tak selalu identik dengan anarkis. Buktinya mereka bisa memperingati Hari Buruh Sedunia dengan damai dan tertib. Cuma, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyingkir ke Palu.

May Day berlalu dengan damai namun kaya dengan tuntutan. Tak kurang dari 70.000 buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) turun ke jalan, membawa berbagai spanduk dengan berbagai tuntutan. Tidak seperti tahun lalu yang penuh kekerasan dan anarkis, peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini, berjalan damai dan tertib. Dominasi warna merah seolah membakar Jakarta ketika ribuan buruh menggelar *long march* dari Jalan MH.Thamrim menuju Istana Negara sampai pukul 15.30 WIB, Selasa (1/2). Sekitar 800 personil polisi anti huru-hara berjaga-jaga di sekeliling kompleks Istana.

Di depan Istana Merdeka, mereka memasang Baliho raksasa yang menggelar empat tuntutan utama: *Buruh Bukan Penghambatan Investasi; Tolak RPP Jaminan PHK; Biaya Murah dan Perlindungan bagi TKI; Hapuskan Mafia di Terminal III* (Bandara Soekarno-Hatta). Tuntutan ini disuarakan oleh Forum Nasional Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia. Sedangkan dalam bentuk spanduk, mereka antara lain, menuntut pembubaran lembaga tripartit dan penghapusan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.

Tuntutan utama mereka, perbaikan kesejahteraan dengan upah layak nasional, minimum Rp 2 juta sebulan, dan bertekad akan terus memperjuangkannya. Selebihnya, mereka akan membentuk konfederasi nasional buruh Indonesia yang progresif dan demokratis, dan ikut membangun solidaritas buruh sedunia untuk menghadapi imperialisme modal.

Semarak pawai ribuan buruh di ibu kota negara, Jakarta, berpusat di tujuh titik; di depan Istana Merdeka, Bundaran HI, Gedung MPR-DPR-DPD, Balai Kota, DPRD DKI, Depnaker dan Disdepnaker DKI. Pawai damai ini dikoordinir oleh Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan sejumlah LSM, seperti YLBHI, LBH, PBHI dan AJI. Koordinator aksi dari ABM, Anwar Sastro Ma'ruf menyampaikan orasi: "Kebijakan pemerintah terhadap buruh selama ini hanya menyenangkan kaum pemilik modal." Menurut Anwar, aparat pemerintah tidak lagi melakukan kekerasan di dalam membela kepentingan pemodal (kapitalis), tetapi ingin menerapkan UU yang tidak berpihak pada buruh. Karena itu, pemerintah berniat



merevisi sejumlah pasal dari UU Nomor 13/2003. Selain itu juga lewat UU Penanaman Modal.

Wapres Jusuf Kalla, meskipun menghargai peringatan *May Day* yang berjalan tertib, menolak tuntutan kaum buruh agar pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sebab JK menilai sebanyak 16 hari libur nasional dan agama dalam setahun, sudah yang tertinggi di Asia. "Merayakan boleh, tapi tidak ada libur nasional," kata JK. Dia juga menolak kenaikan upah secara drastis, sebab hal itu dipandang akan memicu PHK massal karena kondisi ekonomi nasional belum memungkinkan.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% setahun, kalau upah dinaikkan justru menambah pengangguran baru. Menurut JK, upah buruh memang perlu dinaikkan tetapi secara bertahap. Cuma Wapres membolehkan buruh menyampaikan pendapat mereka lewat aksi demo atau mogok, yang penting tidak dilakukan dengan kekerasan.

Ketika Istana terkepung ribuan buruh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih memperingati Hari Buruh di Palu Utara, dipusatkan di halaman PT Coca Cola. Seperti menjawab tuntutan buruh, SBY meminta lembaga tripartit—buruh, pengusaha dan pemerintah—bekerja lebih intensif membangun komunikasi, demi terciptanya iklim usaha yang kondusif. SBY mengingatkan masalah pengangguran hanya bisa diatasi bilamana semua unsur dalam tripartit berfungsi secara maksimal.

Menjelang *May Day*, para tokoh serikat

pekerja dan pengusaha Indonesia mengajak kalangan buruh memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan iklim usaha yang kondusif. Sejumlah konfederasi serikat pekerja memanfaatkan momentum itu untuk melakukan konsolidasi.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperingati Hari Buruh 20 Februari. Karenanya, KSPSI memilih tidak turun ke jalan pada 1 Mei. Hal serupa dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu (FSP BUMN Bersatu). KSBSI memutuskan tidak turun ke jalan karena trauma dengan *chaos* pada *May Day* 2006.

Para pemimpin serikat pekerja itu menyerukan aksi damai. Mereka meminta para pengusaha, baik swasta maupun BUMN, tidak berlaku semena-mena terhadap karyawan, dan tidak mengabaikan ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan Ketua KSPSI Syukur Sarto, Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban, Presiden OPSI Yanuar Rizky, Ketua Gaspermindo cabang Bogor Sri Suyati, dan Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu FX Arief Puyuno.

Tolak Revisi UU

Puluhan ribu buruh seluruh Indonesia yang turun ke jalan pada *May Day*, menolak revisi UU Ketenagakerjaan (No.13/2003) yang mereka nilai belum berpihak pada buruh. Mereka menyodorkan solusi jalan tengah, tetapi tanpa merevisi UU tersebut. Sekjen KSPSI Syukur Sarto mengatakan organisasinya tetap menolak UU TK yang direvisi dan menolak usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk diterbitkannya peraturan pemerintah yang isinya menurunkan besaran pesangon.

Sedangkan Sekjen Apindo Djimanto mengatakan kepada *Suara Pembaruan* bahwa UU TK harus direvisi jika ingin investasi berkembang. Kata Djimanto, UU (No.13/2003) perlu direvisi, karena kalau ditinjau dari segi investasi asing, produk hukum ini dinilai mahal untuk merekrut kepentingan pengusaha. PHK juga membutuhkan biaya besar.

Namun Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN), Endang Sunarto, menuntut pemerintah menghilangkan sistem kerja kontrak karena hanya menguntungkan pengusaha. Mereka juga menolak upah murah bagi buruh, dan meminta 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selama ini, kata Endang, pemerintah yang semestinya melindungi rakyat—termasuk kaum buruh—justru menjadi kaki tangan kapitalis. ■ SH

Pilkada DKI

Tak pelak lagi, Gubernur Sutiyoso yang melangkah turun Oktober nanti, meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi gubernur baru. Pemilihan langsung pertama Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijadwalkan, 8 Agustus.

Sutiyoso memimpin pemerintahan DKI Jakarta selama 10 tahun sejak 1997, di bawah lima Presiden: Soeharto (1997-1998), B.J. Habibie (1998-1999), KH Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). Itulah salah satunya keistimewaan yang patut dibanggakan oleh Sutiyoso.

Seperti para pendahulunya, Sutiyoso tak banyak mengubah wajah Jakarta. Wajah *the big village*, kecuali puluhan gedung pencakar langit, Taman Monas, Taman Impian Jaya, dan terakhir Taman Menteng, masih garang, kumuh dan dekil. Gubuk-gubuk kumuh dan liar berhimpitan di bantaran sungai. Pemukiman kumuh juga berhimpitan hanya puluhan meter di punggung jalan protokol, seperti MH. Thamrin, Sudirman, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Gatot Subroto. Juga para tunawisma membangun kehidupan di kolong-kolong jembatan dan di gubuk-gubuk liar dekat rel kereta api.

Di kolong-kolong jalan layang, di kaki lima, dan di pasar-pasar berkumpul para pengemis, pengamen, pemulung, tukang ojek sepeda motor dan penganggur. Di atas kereta api listrik (KRL), setiap hari, di antara penumpang yang berdesakan menyelinap para pengemis, pengamen, pemulung gelas plastik dan pedagang asong. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang berat di Jakarta dengan mengais rezeki seadanya.

Di sisi lain, ada sejumlah kecil warga Jakarta yang berpenghasilan ratusan, bahkan miliaran rupiah, sehari. Setiap hari atau malam, mereka membuang uang puluhan juta rupiah di mall, restoran, hotel dan tempat hiburan mewah. Dunia gemerlap yang tampil di dalam sinetron dan kehidupan selebritis, menggambarkan Jakarta seakan "sorga" bagi para penghuninya.

Jurang kaya-miskin melebar di antara warga DKI Jakarta yang ditaksir berjumlah 9 juta jiwa. Jumlah warga bisa membengkak sampai 11 juta jiwa di siang hari, karena Jakarta menampung para pekerja yang berdiam di Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.

Jutaan pekerja yang membanjiri Jakarta dari Senin sampai Jum'at, sebagian besar menumpang KRL dan bus. Namun jumlahnya hampir seimbang dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi—mobil dan sepeda motor. Tak heran jika pada hari-hari kerja, lalu lintas di Jakarta macet dan semrawut. Sebagai contoh, tahun 1980-an, jarak antara Depok ke Harmoni, Jakarta, bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit dengan mobil pribadi. Tetapi sekarang, diperlukan waktu tak kurang dari 2,5 jam.

Karenanya, Sutiyoso merancang Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta—*busway*, *monorel* dan *subway*. Kecuali *busway*—*monorel* dan *subway* tak sempat ditangani oleh Sutiyoso. Di dalam konsep PTM, Sutiyoso juga berencana membangun terminal dan stasiun transit bagi mobil-mobil pribadi dari beberapa gerbang masuk ke Jakarta.

Di musim hujan, Jakarta dibayang-bayangi ancaman banjir kiriman akibat luapan Kali Ciliwung di sektor tengah, Kali Bekasi di sektor timur dan Kali Cisadane di sektor barat. Sutiyoso mengalami trauma akibat luapan sungai-sungai tersebut bersamaan dengan turunnya hujan deras yang menggenangi 60% wilayah Jakarta, awal Februari. Sutiyoso bergegas membangun Banjir Kanal Timur (BKT). Tetapi baru seperempat jalan, pembangunan BKT terhenti lantaran pembebasan tanah yang bermasalah dan digerogoti virus manipulasi.

Selebihnya, Sutiyoso ingin mewujudkan gagasan pembangunan *underground tunnel* alias tandon raksasa untuk menampung luapan air di musim hujan. Kerja sama pembangunannya dirintis dengan Bank Pembangunan Islam. Masih banyak lagi PR yang ditinggalkan Sutiyoso.

Persoalan-persoalan tersebut menyongsong siapa pun yang terpilih menjadi gubernur DKI, menggantikan Sutiyoso.

Sampai saat ini, empat bakal calon gubernur sudah muncul ke permukaan, mereka bahkan sudah memulai kampanye terselubung. Mereka; Adang Daradjatun, Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmadja dan Letjen (Pur) Agum Gumelar. Di antara mereka, hanya Adang yang sudah merampungkan tahap persiapan pencalonan bersama Ca-wagub dari PKS, Dani Anwar.

Sedangkan Foke, panggilan akrab Fauzi, masih bermasalah dengan Ca-wagub. Sarwono menunggu kepastian dan kecukupan dukungan dari PAN, PKB dan sejumlah partai gu-

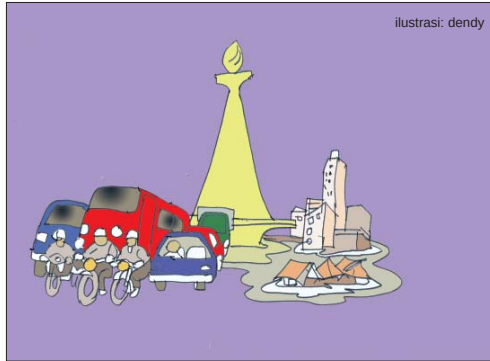
rem. Karena itu, peluang Letjen (Pur) Agum Gumelar untuk jadi Balon Gubernur DKI, bangkit kembali. Sarwono dirancang oleh PAN berduet dengan Jeffrie Govani. Sedangkan Agum dirancang PKB berduet dengan Rano Karno.

Di tengah kemelut pencalonan Pilkada DKI, muncul gagasan dari sejumlah pakar politik untuk mengedepankan calon independen. Ide ini disorong ke Departemen Dalam Negeri oleh Forum Betawi Rembug (FBR) yang berniat mengajukan pucuk pimpinannya KH Fadholi El Munir sebagai Cagub independen. Dipandang dari logika politik dan demokrasi, gagasan tersebut memang masuk akal. Tetapi logika itu menjadi mentah di tangan DPR yang punya hak legislasi yang seolah-olah tidak bisa dicampuri oleh siapa pun, bahkan oleh pemerintah sekali pun.

Anehnya sampai saat ini, Pansus DPR belum merampungkan revisi UU (Nomor 34/1999) tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia. Padahal UU ini merupakan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Boleh jadi Pilkada DKI harus ditunda menunggu pengesahan undang-undang tersebut.

Jadwal Pilkada DKI dimulai dengan pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur ke KPUD untuk disahkan menjadi calon, sampai batas waktu 28 Mei. Kemudian disusul jadwal kampanye Pilkada dari Juni sampai Juli. Hari pemilihan dijadwalkan tanggal 8 Agustus. Dan pelantikan gubernur/wakil gubernur terpilih, sekitar pertengahan Oktober 2007. Namun jadwal ini rentan untuk diubah.

Meskipun warga tidak terlalu antusias menyambut Pilkada langsung pertama, Jakarta ke depan harus dipimpin oleh gubernur yang berpihak pada kepentingan warga, seperti lapangan kerja dan usaha, kesehatan dan pendidikan. ■



ilustrasi: denny

JAKARTA MENCARI PEMIMPIN

Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta wajar jika memiliki sensasi tersendiri, bukan hanya kepada warganya, tetapi juga warga lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, selain sensasi keibukotaan Jakarta, pemilihan ini juga akan menjadi ajang pilkada paling besar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari Rp 124 miliar dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada yang akan melibatkan lebih dari lima juta pemilih.

Besarnya magnitud yang ditebar pilkada DKI Jakarta, semakin bertambah dengan imejnya sebagai miniatur NKRI. Walau warga Jakarta yang paling berkepentingan, namun tidak urung memancing masyarakat di berbagai pelosok tanah air juga turut harap-harap cemas. Apakah pilkada Jakarta akan menjadi contoh atau preseden buruk.

Warga Jakarta sendiri, tidak memperlihatkan antusiasme yang ekspresif terhadap rencana pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Apakah itu sebagai refleksi dari kedewasaan berdemokrasi atau sebaliknya menunjukkan apatisisme. Jakarta sendiri tentunya memanggil kesadaran warganya untuk menunjukkan partisipasi politiknya dalam menentukan kepemimpinan Jakarta pada lima tahun ke depan.

Hingga kini, tidak ada kendala berarti yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada maupun rangkaian kegiatan-kegiatan pra pilkada. Hanya beberapa usulan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pilkada, seperti usulan 4 orang wakil gubernur untuk membantu Gubernur DKI Jakarta maupun usulan memberi kesempatan bagi munculnya calon gubernur Independen. Namun kedua usulan itu belum dapat dianggap sesuatu yang akan mengganggu pelaksanaan pilkada.

Jika tidak ada aral melintang, pilkada akan digelar sebelum pertengahan Agus-

tus. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta sebagai otoritas penyelenggara pilkada, sudah menyatakan kesiapannya. Demikian juga dengan Panitia Pengawas Pemilu sudah terbentuk pada 7 Mei lalu. Terlebih calon-calon kepala daerah/wakil, secara tidak langsung telah menyatakan kesiapannya melalui berbagai media pengenalan diri pada masyarakat. Bahkan, bila melihat berbagai media bergambar bakal calon gubernur, mulai dari stiker, pamflet-pamflet, spanduk, hingga baliho, pertarungan di antara mereka tengah terjadi di luar lapangan.

Dari empat pasangan bakal calon gubernur/wakil Gubernur yang diperkirakan berpotensi menjadi kandidat, baru pasangan Adang Daradjatun/Dani Anwar yang benar-benar memenuhi syarat pendaftaran menjadi pasangan calon. Sementara Fauzi Bowo masih belum didampingi seorang calon wagub. Bahkan Sarwono Kusumaadmadja, disamping belum mendapat garansi dukungan dari partai pendukung, juga belum dapat dipastikan calon pendampingnya. Permasalahan yang dihadapi Sarwono, juga menjadi ganjalan berat bagi Agum Gumelar untuk maju sebagai salah satu calon gubernur.

Kendala apa pun yang masih menghadang para bakal calon gubernur ini, tidaklah menghalangi mereka mengkomunikasikan diri dengan masyarakat.

Melalui berbagai media, mereka masing-masing telah mewacanakan isu-isu sentara yang menjadi perjuangan mereka. Walaupun belum mempunyai cantolan partai, sudah mengkomunikasikan agenda "Menyemai Kebersamaan Pemangku Kepentingan Jakarta".

Pasangan Adang Daradjatun/Dani





ilustrasi: dendy

Anwar sudah sejak awal mengangkat program pembangunan berwacana reformatif, dengan mengangkat isu “Benahi Jakarta”. Sementara Fauzi Bowo mengangkat isu kesejahteraan dengan mengkomunikasikan isu-isu kesejahteraan, “Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat Miskin”.

Partai-partai dan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta juga sudah menyatakan kesiapannya menggalang dukungan sebesar-besarnya untuk memenangkan calon gubernur yang mereka usung.

Yang tidak kalah pentingnya, pilkada kiranya jangan sampai menjadi ajang euforia. Pemilihan gubernur baru yang

akan memimpin DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan, diharapkan menjadi ajang penyatuan visi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta yang kompleks, mulai dari transportasi, ancaman banjir, lingkungan hidup, tata ruang, ketertiban dan keamanan, narkoba, hingga kemiskinan. ■ **MH**



Gubernur terpilih diharapkan mampu mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota maju di dunia

Memilih Pengganti Gubernur S

Pilkada DKI, apakah diikuti oleh dua atau empat calon gubernur, masih menunggu kepastian dari PAN dan PKB. Kemenangan akhir akan ditentukan oleh usaha dan kerja keras partai-partai politik menyosialisasikan visi, misi dan kinerja Cagub kepada seluruh pemilih Jakarta.

Pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar mencuri *start* Pilkada DKI Jakarta. Sedangkan Fauzi Bowo menunggu kepastian calon wakil gubernur yang akan mendampinginya maju ke arena yang sama. Dan Sarwono masih menunggu kepastian dukungan partai gurem yang sudah terlanjur mengikrarkan dukungan mereka kepada Agum Gumelar. Sebenarnya, pasangan Sarwono-Jeffrie Geovani sudah diberi batas waktu sampai akhir April untuk menggenapkan dukungan 15% suara agar bisa diterima sebagai calon gubernur yang berhak maju ke Pilkada. Sebab Sarwono baru mengantongi dukungan 11% dari PAN dan PKB. Padahal Sarwono dibayang-bayangi secara ketat oleh Agum yang akan berpasangan dengan Rano Karno.

Soal kepastian Sarwono menjadi calon dari fraksi PAN dan PKB DKI Jakarta, *Berita Indonesia* mendapat jawaban dari seorang staf fraksi PKB: "Konfirmasinya ke DPP saja mas". Anjuran itu kemudian ditindaklanjuti dengan selembar surat Ketua Fraksi Kebangkitan Reformasi H.A.H. Ishak, SH, S.Sos, MM kepada *Berita Indonesia* yang dikirim melalui fax akhir pekan lalu.

Sarwono sendiri yang dikonfirmasi *BI* via telepon masih merasa gamang soal

pencalonan tersebut.

Batas waktu pengajuan para calon ke KPUD Jakarta oleh partai-partai pendukung ditetapkan 28 Mei. Kampanye Pilkada berlangsung sebulan antara pertengahan Juni sampai Juli. Sedangkan hari pencoblosan dijadwalkan 8 Agustus, memilih gubernur yang akan memimpin DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai 2012. Menurut data Pemilu legislatif yang lalu, dari total 9 juta penduduk, sebanyak 5,8 juta jiwa tercatat sebagai warga yang punya hak memilih.

BI berupaya melayangkan daftar pertanyaan kepada fraksi-fraksi besar DPRD DKI Jakarta untuk menanyakan alasan memilih calon yang diusungnya. Dari tujuh fraksi besar yang disurati, hanya tiga yang memberi jawaban. Ketua FPG DKI Drs. Inggard Joshua memberi jawaban secara tertulis. Sedangkan Ketua FPD M. Firmansyah SE menjawab tertulis dengan tulisan tangan. Hanya Ketua FPKS Muhammad Gunawan AK yang berkenan menjawab dalam wawancara langsung.

Inggard menjelaskan alasan mendasar dari partainya mendukung Fauzi, semata-mata karena kader-kader Golkar meyakini kepemimpinannya akan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Foke, panggilan akrab Fauzi, kata Firmansyah, sisi karakternya dalam pandangan PD

sangat mendukung.

"Pengalaman Foke dalam birokrasi pemerintahan daerah, dari pegawai biasa sampai posisi wakil gubernur, telah menunjukkan kualitas pekerjaan yang cukup baik. Dari sisi keilmuan dalam bidang penataan kota, Foke punya nilai tersendiri di mata Golkar," tulis Inggard.

Sedangkan Firmansyah menilai: "Pak Fauzi sangat berpengalaman, pintar dan terbukti loyal dalam tugas. Dia juga mempunyai pandangan pluralis dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di Jakarta."

Sedangkan alasan PKS yang paling mendasar untuk mendukung Adang dilihat dari karakter kepemimpinannya yang kuat, tegas, berani dan mampu. Permasalahan Jakarta yang kompleks, mulai dari banjir, kemacetan, pengangguran, kriminalitas sampai Narkoba, membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan berani. Selain tegas, dia bisa menyelami aspirasi rakyat secara mendalam, ramah, supel, dan rendah hati. "Karakter ini ada pada Pak Adang," kata Muhammad kepada Maruwas dari *BI* (4/5).

Karakter kepemimpinan ini sudah dibuktikan Adang ketika menjadi Wakil Kepala Polisi RI (Wakapolri), yakni keberhasilannya mereformasi Polri. "Polisi sekarang ini lebih ramah, lebih dekat dengan masyarakat. Baju militeristiknya sudah ditanggalkan," kata Muhammad.

Asah Kelebihan

Soal aktual dalam masyarakat seputar kinerja para calon gubernur, tidak terlepas dari pandangan positif dan negatif. Foke, misalnya, diyakini memiliki kekuatan



foto: berindo wilson

Sutiyoso

pada sisi pengelolaan birokrasi pemerintahan DKI Jakarta, sekaligus menjadi sisi lemahnya karena ikut menanggung "dosa" masa lalu.

Adang, karena berasal dari luar Pemda DKI, dipandang lemah di dalam menggerakkan birokrasi dan pelayanan publik. Namun dia bersih dari berbagai permasalahan yang menggunung di Jakarta. Adang dan PKS terjepit isu pemberlakuan Syariat Islam.

Kader-kader partai pengusung tentunya harus berusaha menguatkan kelebihan calon masing-masing sembari mengeliminasi kelemahannya. Menurut Inggard, kelemahan dan kekuatan Foke telah mendapat kalkulasi yang matang dari Golkar, sehingga upaya mengomunikasikannya pun sudah dipersiapkan sejak awal.

"Mengomunikasikan segala kekuatan dan kelemahan bakal calon gubernur, bukan hal yang sulit. Karena sejak awal setiap kader partai turut meneliti dan mempertimbangkan segenap potensi bakal calon," tulis Inggard, menambahkan bahwa pilihan terhadap Foke dilakukan secara *bottom up*.

Soal "dosa masa lalu" yang bakal mengganggu Foke, Firmansyah mengisyaratkan kesiapan kader-kader Partai Demokrat untuk meminimalkannya. "Dalam kepemimpinan lima tahun lalu, Foke bukan *top leader* pengambil keputusan. Ke depan, bila dia terpilih jadi orang nomor satu di Jakarta, maka kekurangan yang lalu dengan sendirinya sirna," tulisnya.

Sedang Adang yang berasal dari luar Pemda DKI, yang dianggap berbagai kalangan sebagai kelemahan, menurut

Muhammad, justru ini kekuatannya. "Dia tidak akan punya rasa *euh pakewuh* dengan birokrasi yang ada. Lain dengan yang sudah memimpin lama, punya sejarah dengan birokrasi ini. Orang sudah *tau* kartunya. Dan contoh-contoh keberhasilannya dapat dirujuk pada pengalamannya di Polri," tuturnya.

Kelemahan menghadang Adang dan PKS, pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam, yang diisukan akan diberlakukan jika Adang memenangkan pemilihan Gubernur. Muhammad yang akrab dipanggil Pak Wawan menyangkalnya dengan tandas. "PKS dan Pak Adang, orang-orang yang sangat rasional dan sangat objektif," tandasnya.

"Meskipun Pak Adang terpilih, tidak ada alasan bagi PKS untuk memaksakan kehendaknya. Tidak mungkin...itu tidak realistis! Di Jakarta, kita tidak akan bicara Syariat Islam. Kita akan bicara bagaimana memperbaiki taraf hidup, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja bagi masyarakat Jakarta. Dan itu bagian dari ajaran agama," tuturnya.

Di dalam memimpin Jakarta, Adang dan PKS akan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan universal, yang belum banyak diperjuangkan secara serius, tetapi baru sebatas slogan-slogan. "Kita tidak akan bawa istilah Syariat Islam dalam memimpin Jakarta, tetapi memperbaiki keadaan. Kebaikan itu sesuai dengan semua perasaan dan pikiran orang. Korupsi itu kita katakan tidak baik, dan semua orang mengatakan itu tidak baik. Agama pun mengatakan begitu," tuturnya.

Agenda Pembangunan

Agenda pembangunan merupakan amanat konstituen yang mendukung eksistensi setiap partai politik. Dalam melahirkan sebuah keputusan politik, termasuk dalam memilih calon gubernur, maka pertimbangan utamanya, agenda pembangunan dari seorang calon yang harus terintegrasi dengan aspirasi masyarakat. Sebab hanya dengan demikian, sebuah partai politik dapat mendorong masyarakat untuk memilih calon yang diusungnya.

Keputusan partai Golkar memilih Foke, menurut Inggard, didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditawarkan. "Pembangunan yang telah dilaksanakan harus dilanjutkan, sehingga DKI Jakarta sebagai kota modern bertaraf internasional dapat segera diwujudkan," tulis Inggard.

Bagi Golkar, visi Foke untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Ibukota sudah mencerminkan visi pembangunan berkelanjutan. "Penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, hukum, ketenteraman, ketertiban, linmas, birokrasi, ketersediaan prasarana dan sarana



Muhammad Gunawan AK

kota, telah menggambarkan harapan Golkar dan konstituennya," tuturnya.

Sedangkan pilihan PKS jatuh pada Adang, karena mantan Wakapolri itu bersedia melaksanakan agenda-agenda pembangunan dan pemerintahan yang disodorkan PKS. "Pak Adang justru melaksanakan agenda PKS, dan dia sepakat dengan agenda itu," tutur Muhammad. Dia menambahkan PKS memiliki *think tank* yang merumuskan visi-misi yang akan dilaksanakan Adang.

Membesarkan Partai

Dalam setiap hajatan Pilkada, partai-partai politik berusaha memiliki andil terpilihnya seorang kepala daerah. Tidak terkecuali, di Pilkada DKI Jakarta. Mereka membangun *deal* yang kental dengan bau duit. Tetapi baik Inggard maupun Firmansyah menyangkal adanya *deal* khusus berkaitan dengan dukungan pada Foke.

Kata Inggard: "Partai Golkar memposisikan diri sebagai pendukung kritis, jika Foke memimpin DKI Jakarta. Golkar tidak akan memberi *blank cheque* (cek kosong) kepada Foke," tandasnya.

Inggard yang juga menjabat sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, menambahkan kepentingan terbesar partainya terhadap Foke, keberhasilannya menciptakan Ibukota yang lebih baik, dari semua lini kehidupan. Misalnya, tersedianya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, layanan kesehatan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan PKS, dengan jujur mengakui adanya *deal* khusus dengan Adang. "Pak Adang sebagai individu dan pribadi dibatasi usia biologis. Sedangkan usia PKS akan lebih panjang. Jadi agendanya bukan hanya 2007 tetapi 2009, dan seterusnya.

Persoalannya, kata Muhammad, bagaimana partai bisa semakin berkembang dengan masuknya Pak Adang dalam PKS. Jadi, Pak Adang akan membantu membesarkan partai, antara lain, melalui perilaku dan kemampuan memimpin Jakarta, sehingga nama PKS semakin harum. Hal ini wajar saja. ■ **MH, SH, RB**



Foke mengusung isu kesejahteraan masyarakat Jakarta

foto: berindo wilson

Foke Masih Sendiri

Para anggota Koalisi Jakarta yang mendukung pencalonan Fauzi Bowo, belum satu kata tentang calon wakil gubernur. Mereka ngotot mengajukan masing-masing calon.

Sampai awal Mei, calon gubernur DKI Jakarta yang diusung empat partai besar—PPP, Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan dan satu partai kecil, PDS, masih tampak sendirian di stiker kampanye yang memaparkan jaminan pendidikan dan perawatan kesehatan cuma-cuma untuk warga Jakarta yang tidak mampu. Sedangkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar yang didukung PKS sudah tampil berdua dalam stiker yang beredar dan ditempel di seluruh penjuru Jakarta. PKS juga sudah menyiapkan 100.000 kader, berkampanye untuk Adang dan Dani.

Siapa Cawagub yang akan mendampingi Foke, panggilan akrab Fauzi, masih dipertarungkan oleh empat partai pendukung—PPP, Golkar, Demokrat dan PDIP. PPP menghendaki orang dari partai, demikian juga Demokrat. Tetapi Golkar dan PDIP, menghendaki pensiunan militer. Calon yang diajukan kedua partai tersebut, masing-masing Mayjen (Pur) Djasri Marin dan Mayjen (Pur) Slamet Kirbiantoro.

Siapa yang jadi pendamping Foke, dapat berpotensi konflik bagi Koalisi

Jakarta. Ini menurut dugaan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Namun Denny menolak untuk membeberkan peringkat Cawagub yang akan mendampingi Foke, versi hasil survei LSI, 4-7 April lalu, karena berpotensi konflik. Hal tersebut dibenarkan oleh pimpinan fraksi Golkar dan PDIP, Andi Matalatta dan Tjahjo Kumolo.

Potensi konflik, kata Denny, bisa terwujud kalau masing-masing partai anggota koalisi masih terus berlomba menyodorkan dan memaksakan nama cawagub kepada Fauzi. Tjahjo mengakui, sampai kini partai-partai masih ngotot mengusulkan cawagubnya sendiri. Denny mengingatkan, koalisi sebaiknya bersepakat menyodorkan dua atau tiga nama saja. Selanjutnya nama-nama tersebut dipilih sendiri oleh Foke.

”Adopsi saja kasus Pilkada Banten yang menetapkan cawagub harus memenuhi tiga kriteria, yaitu mampu mendongkrak suara, punya kompetensi, dan mampu bekerja sama,” kata Denny. Untuk poin satu dan dua serahkan kepada Koalisi Jakarta dengan bantuan, antara lain, hasil survei. Untuk kriteria ketiga, serahkan

saja pada Foke. Andi Matalatta sepakat dengan Denny. Tetapi menurut Tjahjo, PDI-P cuma minta satu hal, calon yang mampu mendongkrak perolehan suara.

Dr. Ing H Fauzi Bowo, lahir di Jakarta, 10 April 1948, jabatan terakhir sebelum memasuki Pilkada adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada pilkada DKI Jakarta 2007, Fauzi Bowo mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengungguli Agum Gumelar dan Mahfud Djailani dalam penjurian calon gubernur oleh PPP DKI Jakarta dengan 14 suara. Agum meraih lima suara, sedang Djailani mendapat dua suara. Dua suara lain menyatakan abstain.

Namun, dalam skorsing terhadap enam kandidat calon gubernur yang mengajukan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dia menempati urutan paling terakhir. Dalam skorsing itu, ia meraih 80 suara. Sedang, urutan teratas ditempati oleh Sarwono Kusumaatmadja.

Banjir besar di Jakarta, awal Februari, membuat nama Foke terpuruk, karena dia bersama Gubernur Sutiyoso dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab. Karenanya, popularitas Foke sangat tidak menjual untuk Pilkada DKI 2007.

Sebaliknya, LSI 22 Januari 2007, menyampaikan hasil jajak pendapat terhadap 700 responden, minggu ketiga Desember 2006 dengan cara tatap muka. Hasilnya, calon Gubernur DKI yang paling diunggulkan adalah Fauzi Bowo, Rano Karno, Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja, Adang Daradjatun, dan Bibit Waluyo.

Pada Konvensi Partai Golkar 2007. Foke satu-satunya peserta konvensi yang mengembalikan formulir pendaftaran, dan satu-satunya peserta konvensi Golkar DKI yang diusung untuk jabatan gubernur. Tapi, partai PDS lah yang pertama kali mendukung pencalonan Foke, kemudian disusul oleh Golkar, PPP, Demokrat, PDI dan PBR. Foke juga secara khusus mendapat dukungan pucuk pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Sementara Cawagub Slamet Kirbiantoro yang diusung PDIP belakangan makin berkibar. Sekitar 44% warga DKI Jakarta dari etnis Jawa mendukung Kirbi. Mereka mengancam akan Golput jika Kirbi tidak masuk bursa Cawagub mendampingi Foke. Sementara itu empat puluh Ormas Betawi dan etnis daerah lain menyampaikan pernyataan sikap mendukung pencalonan bekas Pangdam Jaya itu. Dukungan mereka disampaikan lewat deklarasi di sebuah hotel di Jakarta belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Kirbi menegaskan bahwa dia siap untuk mendampingi Foke di Pilkada DKI. Sebagai mantan tentara, Kirbi siap menjalankan amanah yang diberikan 40 Ormas tersebut. ■ SH

Adang Giat Menebar Pesona



Adang dengan visi membenahi Jakarta

Nama pasangan Cagub Adang Daradjatun dan Cawagub Dani Anwar memang kalah populer dibandingkan dengan kandidat lainnya.

Mau tidak mau pasangan peserta Pilkada dukungan PKS ini harus menebar pesona. Semua hal mereka lakukan, tentu yang positif, untuk menarik simpati para pemilih Jakarta yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa. Adang memang berpostur atlit, berpenampilan necis dan berwajah klimis. *The smiling police general* ini tampak lebih muda dari usianya yang memasuki 58 tahun, tanggal 13 Mei ini. Pensiunan Wakapolri yang berpangkat terakhir Komisaris Besar polisi ini, tak urung jadi sasaran kampanye negatif lantaran tampil membawa bendera PKS. Misalnya, jika Adang jadi gubernur, semua wanita Jakarta harus berjilbab, dan semua tempat hiburan ditutup. Dan Jakarta akan menjadi Teheran.

Semua kampanye negatif ini dijawab Adang dengan tenang: "Tak mungkin Jakarta jadi Teheran. Jakarta tetap jadi kota jasa, tetapi yang lebih bermoral." Adang punya alasan kuat. Gubernur melaksanakan semua Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD. Meskipun PKS memenangkan Pemilu legislatif di Jakarta, meraih 18 kursi, tak mungkin mendominasi Perda. Sebab Perda harus diterima dan disahkan oleh DPRD yang beranggotakan 75 kursi. Selain PKS, masih ada Demokrat (16 kursi), PDIP (11 kursi), Golkar (7 kursi), PPP (7 kursi), PAN (7 kursi), PKB (4 kursi) dan PDS (4 kursi).

Guna memenuhi persyaratan sebagai calon gubernur, tanpa ragu sedikit pun, Adang telah melepas jabatan Wakapolri

lebih awal untuk berkiprah sepenuhnya di dalam Pilkada DKI. Dia pun sekarang sibuk mempersiapkan diri untuk meraih simpati dan memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Sebagai calon gubernur, Adang tampaknya sudah siap termasuk menggelontorkan dana kampanye. Adang tinggal di antara dua rumah mewah yang saling berhadapan di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Rumah tersebut berdiri di atas tanah hampir 2000 meter persegi. Di garasinya berderet tujuh mobil. Juga ada *indoor* lapangan tenis dan kolam renang. Semua kekayaan yang dimilikinya sekarang, menurut Adang, sebagian besar hasil keringat istrinya yang berprofesi pengusaha.

Alumni Akademi Kepolisian (1971) diklaim memiliki kekayaan sekitar Rp 9,3 miliar dan US\$ 266.000 (setara Rp 2,39 miliar) dengan kurs Rp 9.000 per dolar, termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 6,1 miliar dan 7 mobil senilai Rp 1,32 miliar. Itu data tahun 2002. Sudah barang tentu, dalam 5 tahun terakhir nilai aset itu pasti akan terus menanjak naik.

Tentang visinya dalam membangun Jakarta, Adang antara lain akan mempertahankan Jakarta sebagai kota jasa, termasuk dunia hiburannya yang memasukkan pajak Rp 3 triliun setahun ke pundi-pundi Pemda DKI Jakarta. Tapi judi tetap dilarang. Adang punya rencana besar untuk melakukan reformasi birokrasi DKI. Dia pun ingin menata tata ruang, jaringan transportasi dan kawasan kumuh Jakarta. Prioritas utamanya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Demi mendongkrak popularitas, Adang rajin mendatangi sejumlah tokoh dan ulama di Jakarta. Beberapa waktu lalu, dia menggelar Adang Daradjatun Cup. Juga kompetisi sepakbola yang sering diselenggarakan bersama Gerakan Pemuda Keadilan. Di samping itu, kubu Adang sudah menyebar poster, stiker (semacam kampanye resmi) dan spanduk di seluruh penjuru Jakarta.

Dana Kampanye

Mantan Kapolda Jawa Barat ini dinilai memiliki jaringan pendukung yang dibutuhkan saat pemilihan. Ia memiliki kedekatan dengan generasi muda di kawasan Kebayoran Baru dan Penjaringan, Jakarta Utara, tempatnya dulu menjadi Kapolsek. Sebagai pejabat teras kepolisian, sudah barang tentu jajaran kepolisian berikut anggota keluarganya secara psikologis memiliki kedekatan dengan Adang. Jangan lupakan dukungan dari warga Sunda yang berdomisili di Jakarta.

Pernah berembus kabar bahwa Adanglah yang mampu membayar "uang mahar" yang ditawarkan PKS, berjumlah Rp 20 miliar. Baik Adang maupun Tiffatul Sembiring, pucuk pimpinan PKS, menganggap kabar itu hanya isapan jempol. "Kami hanya berada pada satu idealisme yang sama, sedangkan uang mahar, itu tidak benar," kata Adang. Tiffatul juga menyangkal uang mahar tersebut, mengatakan PKS dan Cagub akan berbagi rata menanggung biaya kampanye.

Menurut Tiffatul, pembahasan dana kampanye-PKS yang dilabeli 'dana perjuangan kemenangan pemilu' harus dilakukan demi transparansi. Itu bukan berarti semua biaya dikeluarkan dari kocek para kandidat sendiri. "Kandidat harus mampu mengumpulkan dana sesuai aturan," kata Tiffatul.

Seorang petinggi PKS menyatakan partainya belum sampai membicarakan hal-hal teknis seperti biaya kampanye. Yang pasti dana cuap-cuap dan kemenangan pemilihan tidak sedikit. Sumber tersebut memberi ilustrasi, untuk biaya saksi di tempat-tempat pemungutan suara saja dibutuhkan Rp 2,9 miliar, yaitu 29.000 tempat dikalikan Rp 100.000. Kampanye dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh kordinator PKS tingkat RW memerlukan Rp 520 juta, yaitu 2.600 RW dikalikan Rp 20 ribu.

Biaya mobilisasi massa jauh lebih besar. Untuk satu kali penyelenggaraan kampanye akbar di Gelora Bung Karno perlu minimal Rp 2 miliar. "Belum biaya iklan di media massa, yang pasti sangat besar," kata sumber itu. ■ SBR, SH, RB



Sarwono Kusumaatmadja ingin memadukan seluruh stakeholder Jakarta

foto: berindo wilson

Sarwono Kandidat Cagub Alternatif

Warga DKI tidak cukup tertarik mengikuti Pilkada jika hanya dua calon. Mereka menganggap kandidat alternatif seperti Sarwono bisa memberi nilai lebih pada Pilkada.

Bicaranya tegas dan lugas. Sebagai bakal Cagub, Sarwono Kusumaatmadja punya obsesi dan tekad untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Karenanya, pembangunan Jakarta harus berlandaskan kebersamaan di antara pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat luas.

Langkah pertama yang akan dilakukan menuju Jakarta yang lebih baik adalah menata lingkungan Ibukota Negara dalam arti luas. Sarwono ingin lebih memperhatikan lingkungan dari aspek sosial, infrastruktur, pemukiman dan tata ruang yang terbuka hijau. Anggota DPD yang mewakili DKI Jakarta ini, pernah menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Sarwono sejak kecil bermukim di Jakarta sehingga tahu betul proses perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun sampai sekarang. Demikian juga berbagai eksis dari pertumbuhan kota yang dulu berjuluk 'kampungan besar', sekarang menjadi kota metropolitan.

Alumnus ITB Bandung ini memiliki seabrek pengalaman dalam berkarier.

Mulai di organisasi kampus hingga menjadi wakil rakyat di DPR, sebagai Sekjen DPP Golkar, beberapa kali menjadi menteri—Meneg PAN, Meneg KLH dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena itu, baginya tidak terlalu sulit memetakan permasalahan yang ada di Jakarta. Mulai dari soal transportasi dan kemacetan lalu-lintas, bencana banjir, kriminalitas dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan sampai ke soal pemukiman kumuh serta para urban yang berbondong-bondong mencari nafkah di Jakarta.

Sarwono yang akan berpasangan dengan calon wakil gubernur Jeffrie Geovanie dalam wawancara melalui telepon dengan wartawan *Berita Indonesia* mengakui bahwa permasalahan yang ada di Jakarta sekarang ini demikian kompleks. Karena itu perlu penataan yang lebih konkrit dan juga memberikan arah seperti apa Jakarta ke depan.

Pencalonan Sarwono dan Jeffrie Geovanie, belum memperoleh kepastian, meskipun telah memegang tiket dari PAN dan PKB. Agaknya dia harus memperoleh

tambahan suara dari partai-partai kecil, sehingga bisa mengantongi dukungan 15% suara. Karena Sarwono tidak mampu memenuhi ketentuan batas waktu sampai akhir April, maka peluang Agum Gumelar yang sempat suram, berpondar kembali. Agum yang juga mengantongi komitmen dukungan dari PAN dan PKB yang akan berpasangan dengan Rano Karno, merasa dapat meraih tambahan dukungan suara dari partai-partai kecil tersebut.

Seperti apakah Jakarta yang lebih baik? Sarwono menjawab, Jakarta yang dikelola bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga Jakarta itu menjadi lebih aman dan nyaman. Dengan demikian banjir dan kemacetan lalu lintas berkurang. Masyarakat dan pemerintah harus kompak. "Kompak dalam kemandirian," katanya.

Menata Jakarta menjadi seperti yang diinginkan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu dan keseriusan. Namun yang lebih penting, adanya konsep penataan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Sarwono kesulitan tersebut bisa diatasi dengan kebersamaan dan kekompakan.

Kuda Hitam

Sarwono, jika berhasil lolos dalam pencalonan, merupakan calon alternatif bagi Cagub Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo. Hasil survei yang digagas pakar komunikasi politik UI Effendy Gazali menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden menghendaki perlunya Cagub alternatif. "Warga DKI tidak cukup tertarik mengikuti Pilkada jika hanya dua calon. Mereka menganggap kandidat alternatif memberi nilai lebih pada Pilkada," kata Gazali.

Menurut Gazali surveinya menunjukkan figur alternatif bisa menjadi 'kuda hitam'. Bisa jadi kuda hitam itu, pasangan Sarwono dan Jeffrie. Kendati begitu, popularitas kandidat alternatif masih perlu dipoles lagi. Pasalnya, 50 persen warga DKI belum kenal Jeffrie. Yang banyak dikenal adalah Sarwono. "Tapi pasangan ini patut diperhitungkan. Sebab 70 persen yang menganggap perlu ada cagub alternatif adalah pangsa pasar mereka. Jika itu digarap serius, mereka bisa menang," papar Gazali.

Tokoh Betawi Ridwan Saidi menyambut positif kongsi PAN-PKB yang mendukung pasangan Sarwono—Jeffrie maju ke Pilkada. Dia menyebut fenomena ini tergolong langka karena secara tidak langsung melibatkan dua kekuatan besar ormas Islam di Indonesia. "Selama ini jarang sekali NU dan Muhammadiyah bersatu. Ini bagus bagi umat Islam di Jakarta," kata Ridwan, mantan Ketua Umum PB HMI. ■ **RON, SP, SH, RB**

Jakarta Membutuhkan Lebih dari Sekadar Revisi UU Jakarta



Amir Hamzah

foto: dok

Yang menjadi persoalan, bagaimana agenda Pilkada di tengah-tengah banyaknya gagasan yang muncul di seputar revisi perundang-undangan?

“Perubahan selalu membawa kesempatan dan kesempatan selalu mengundang banyak keinginan”. Risalah ini sedang terjadi di tengah-tengah proses perubahan (revisi) UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang mengundang banyak ide-ide yang konon bertujuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kota Jakarta.

Terlebih-lebih karena pada saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR juga tengah mengkaji revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

tahan Daerah. Revisi ini dimaksudkan untuk mensplit (memisahkan) UU Pemda itu menjadi 3 (tiga) UU, yakni UU tentang Pemerintah Daerah, UU tentang Pilkada, dan UU tentang Pemerintahan Desa.

Revisi UU No. 34 Tahun 1999 sendiri merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Sebab, UU yang mengatur tentang Jakarta saat ini masih berinduk pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004.

Perubahan-perubahan dalam perundang-undangan ini telah menjadi momentum bagi

munculnya banyak keinginan, ide, dan gagasan dari berbagai kalangan. Keleluasaan mengajukan gagasan dan ide-ide itu, semakin terbuka di tengah-tengah realitas dari kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat Jakarta.

Gagasan Empat Wakil Gubernur

Yang menjadi persoalan, bagaimana agenda Pilkada di tengah-tengah banyaknya gagasan yang muncul di seputar revisi perundang-undangan? Secara yuridis, tidak ada hubungan antara Pilkada DKI Jakarta dengan revisi UU No. 34 Tahun 1999. Sebab aturan Pilkada tidak diatur dalam UU tentang Ibu Kota Jakarta, melainkan diatur pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akan tetapi, permasalahan akan menjadi lain jika gagasan-gagasan yang muncul itu diakomodasi dalam perundang-undangan. Misalnya, gagasan empat Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hangat belakangan ini, menjadi persoalan yang menukik langsung pada landasan hukum pilkada. Sebab, yang dipilih bukan lagi pasangan gubernur dan wakilnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 maupun UU No. 34 Tahun 1999, melainkan seorang gubernur dengan 4 wakil gubernur.

Itu membutuhkan landasan hukum, baik dalam UU yang mengatur tentang otonomi daerah maupun UU yang mengatur Jakarta. Sementara gagasan yang menginginkan penambahan perangkat Pemerintah DKI Jakarta dengan 4 (empat) Deputy Gubernur, tidak mempengaruhi proses pilkada, karena keempat Deputy Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak ikut dipilih.

Menyadari beratnya pembangunan landasan hukum terhadap pasangan gubernur dengan 4 orang wakil gubernur,

berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta mengakui banyaknya kesulitan untuk merealisasikan gagasan itu. Namun demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ilal Ferhard, saat dikonfirmasi *Berita Indonesia*, Jumat (4/5) menegaskan pandangannya bahwa konsep 4 wakil gubernur relevan dengan kebutuhan Jakarta.

Jakarta Membutuhkan Lebih dari Sekadar Revisi

Berbeda dengan Ilal, Ketua Metropolitan Cabin for Watch and Empowerment Amir Hamzah, tidak sepenuhnya percaya terhadap pandangan bahwa pengadaan 4 wakil gubernur akan dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta. “Dari tahun 1974 sampai 1997, Jakarta mempunyai 4 wakil gubernur tetapi Jakarta tetap berhasil dibangun,” katanya.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi Jakarta terletak pada kewenangan, bukan pada banyaknya pejabat. “Walaupun wagubnya 4 tetapi kalau tidak ada wewenang, akan jadi kambing congek juga. Apalagi dengan pola pikir seperti yang disuguhkan Sutiyo. Empat wakil gubernur, gubernur saja yang dipilih dan wagubnya ditunjuk gubernur. Itu berarti wakil gubernur hanya akan mengabdikan pada gubernur, bukan pada rakyat,” tuturnya.

Permasalahan yang paling mendasar, tambah Amir Hamzah, karena sebuah UU tidak direncanakan untuk jangka waktu yang lama. Disamping itu, tidak dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah UU. “Menurut saya, yang harus dituntut oleh pemerintah adalah UU tentang otonomi khusus DKI Jakarta,” katanya.

Kalau mau betul, tambah Amir Hamzah, lupakan revisi UU No 34 tahun 1999 dan rumuskan suatu pemikiran bahwa Jakarta ini memerlukan UU tentang otonomi khusus. ■ MH

Cagub Independen Ditolak



foto-foto: berindo wilson

Drs. H. Ridwan Saidi didampingi KH. Fadholi El Munir ketika berorasi di depan gedung Departemen Dalam Negeri

Domain partai politik digugat Forum Betawi Rempug. Organisasi lokal ini mengedepankan wacana Cagub independen di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Kenapa FBR tiba-tiba meronta? Padahal sejak dini mereka mendukung pencalonan Fauzi Bowo, sekarang Wakil Gubernur DKI Jakarta. Setelah meninggalkan Foke, panggilan akrab Fauzi, FBR melontarkan gagasan bagi porsi Cagub independen, seperti yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh. Namun bisa ditebak, jika tuntutan itu dipenuhi, FBR boleh mengajukan Cagub yang kental dialek Betawi.

Lebih dari 1.000 anggota Forum Betawi Rempug (19/4) berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Unjuk rasa yang berlangsung tertib ini sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Betawi dalam menggolkan pasal tentang calon gubernur independen dalam Revisi UU (No 34/1999) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara, Jakarta.

FBR, di dalam sepucuk surat yang di-

layangkan ke MK, menyatakan bahwa UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pilkada. Maka, sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, FBR meminta agar calon gubernur independen diakomodasi. Karenanya, mereka mendesak MK melakukan *Judicial Review* (Uji Materi) terhadap UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 34/1999.

Dua tokoh masyarakat Betawi, Drs. H. Ridwan Saidi dan KH. Fadholi El Munir, yang memimpin unjuk rasa tersebut mengajukan alasan bahwa kekhususan Jakarta sama seperti keistimewaan NAD (Aceh) dan DIY (Yogyakarta). Karena itu, sudah semestinya calon kepala daerah (Cakepda) alias Cagub independen diberi kesempatan berlomba di dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kedatangan rombongan kami warga Jakarta, orang Betawi, untuk menyam-

paikan aspirasi. Kami menuntut adanya calon independen di dalam Pilkada DKI," kata Ridwan dan Fadholi. Menurut mereka, demokrasi di Indonesia bukan hanya milik partai politik. Ridwan, bekas anggota DPR dari PPP, mempertanyakan kenapa status khusus Jakarta dibedakan dari Aceh? Pilkada NAD menerima pasangan calon independen yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang.

Dengan nada agak mengancam, Ridwan mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin muncul ketidakstabilan di Ibukota jika aspirasi mereka tidak diterima. Saat ditanya, mengapa masyarakat Betawi hanya memperjuangkan calon gubernur independen untuk DKI? Ridwan mengatakan kepada *Berita Indonesia*, masing-masing daerah harus memperjuangkannya. "Kita dalam hal ini mengambil apa yang efisien saja. Silahkan saja orang daerah, tetapi kami memperjuangkan untuk DKI," kata Ridwan.

Ketua Umum FBR KH. Fadholi El. Munir yang dijagokan organisasinya sebagai Cagub DKI independen untuk Pilkada 2007, mengkritisi perilaku partai-partai politik yang disebutnya memiliki

k Parpol

arogansi yang sangat keterlaluan. Kata Fadli: “Pencalonan Gubernur bukan monopoli partai politik. Mereka arogan. FBR bersama ormas yang lainnya, siap berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati dan menzholimi demokrasi,” kata Fadli dalam orasinya di depan Gedung Depdagri.

Perjuangan FBR menggolkan calon independen bukan hanya untuk kepentingan orang Betawi, tetapi juga kepentingan masyarakat Jakarta yang ada di Ibukota. “Kalau Aceh bisa ada calon independen, kenapa Jakarta tidak? Padahal sama-sama kita di bawah naungan NKRI,” seru Fadli.

Dia mengatakan Parpol di Indonesia saat ini keterlaluan. “Bukan rahasia lagi, seorang calon untuk membeli tiket dukungan partai harus mengeluarkan uang banyak. Mungkinkah demokrasi akan mulus?” Jika tidak mendapat tempat bagi Cakepda independen, FBR dan elemen masyarakat Betawi lainnya akan melakukan kampanye Golput. Menurut Fadli, rakyat masih haus akan kebebasan, menantikan demokrasi yang murni, dan sudah muak dengan perilaku para elit yang ribut satu sama lain karena berebut jabatan, sehingga rakyat terabaikan.

Fadli, dengan nada mengancam, mengatakan kalau aspirasi ini tidak didengarkan, para anggota FBR akan secara bergantian menduduki KPUD, sejak penerimaan calon gubernur hingga Pilkada. FBR yang memiliki 238 gardu di seluruh penjurur DKI akan membangun dapur umum di sana.

Diperjuangkan Terus

Delegasi FBR tersebut menemui Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Heru Herman. Menurut Heru, keberadaan Cagub independen dalam Pilkada sudah mencuat sejak awal reformasi. Pada saat pembahasan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah - untuk menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah - wacana ini sudah mengemuka. Juga ketika UU (No. 22/1999) kembali direvisi tahun 2003, berbagai kalangan, termasuk Departemen Dalam Negeri, berusaha memperjuangkan agar klausul itu diatur dalam UU tersebut.

Menurut Heru, pandangan pemerintah yang difasilitasi Depdagri memasukkan klausul Cagub independen selama pembahasan UU tersebut. Namun usulan ini dihadap oleh fraksi-fraksi partai politik. Depdagri masih berusaha menyorong



Kahumas Depdagri Saut Situmorang didampingi Heru Herman saat menerima delegasi FBR

usulan tersebut dalam pembahasan UU (No.32/2004). Lagi-lagi usulan tersebut dimentahkan oleh DPR yang mewakili lembaga Parpol. Sebab, Parpol ingin mempertahankan dominasi mereka di dalam pengajuan bakal calon dari kepala daerah sampai presiden.

Sebenarnya, banyak pihak yang diperkirakan klausul calon kepala daerah (Cakepda) independen akan terakomodasi dalam UU (No. 32/2004). Perkiraan ini cukup beralasan. Soalnya, salah satu pertimbangan revisi UU (No. 22/1999) adalah untuk mengakomodasi sistem pemilihan langsung. Banyak orang berpikir, antara pemilihan langsung dan calon independen sama dan sebangun.

Namun dalam kenyataannya, pembuat undang-undang (DPR) tidak memegang paradigma yang sama, atau mungkin ingin mempertahankan dominasinya. Maka jangan heran jika sampai saat ini klausul tersebut tidak pernah berhasil masuk dalam sistem perundang-undangan.

Walaupun belum berhasil diperjuangkan di dalam UU (No. 32/2004), dalam kenyataannya, berbagai elemen masyarakat tidak pernah melangkah surut untuk mewujudkannya. Paling tidak, dalam setiap hajatan Pilkada, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, banyak pihak yang menyayangkan mengapa UU tidak memberi peluang bagi pasangan calon kepala/wakil kepala daerah independen.

Masyarakat Betawi yang terwakili oleh FBR juga memperjuangkan adanya klausul pasangan Cagub/Cawagub indepen-

den. FBR tampaknya secara sungguh-sungguh memanfaatkan momentum revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, yang masih dalam pembahasan.

Identik dengan wacana di masyarakat yang difasilitasi oleh Depdagri, FBR juga mengungkapkan bahwa jalur pencalonan melalui partai selain biayanya mahal juga cenderung tidak demokratis, “Cagub independen sangat dibutuhkan agar demokrasi tidak tersumbat”. Sudah jadi rahasia umum bahwa arena Pilkada menjadi bisnis “dagang sapi” antara Parpol dan bakal Cakepda.

Tanpa bermaksud mematahkan semangat FBR, Heru menyarankan agar mereka juga memperjuangkan aspirasi tersebut di forum Panitia Khusus Revisi UU No. 34 Tahun 1999. “Bapak-bapak jangan hanya ke Depdagri, tetapi datang juga ke Pansus di DPR,” kata Heru. Depdagri tidak bisa berbuat apa-apa kalau Pansusnya, menurut Heru, mengajukan rancangan atau substansi seperti itu (tidak mengakomodasi calon independen-red).

Menurut Heru, tata tertib pembahasan Revisi UU (No. 34/1999) ada di DPR. “Jangan menyangkut substansi, masalah koma pun dipertanyakan. Mengapa pemerintah mengubah ini? Apa alasannya?” kata Heru, meyakinkan delegasi FBR untuk meneruskan aspirasi mereka kepada Mendagri ad interim Widodo AS. Sama seperti FBR, Heru hanya bisa berharap usulan tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dengan pihak DPR. ■ **MH, SH, RB**



OLEH: INGGARD YOSHUA

Dalam Rancangan Revisi UU No 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus), pemerintah mengusulkan agar perangkat pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditambah dan dilengkapi dengan perangkat Deputy Gubernur, yang berkedudukan sebagai pembantu gubernur.

Menyoal Asal Usul

Deputi Gubernur sebenarnya tidak dikenal dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, sesuai dengan asas kekhususan Pemerintahan DKI Jakarta, penambahan perangkat pemerintah daerah seperti ini, sepanjang relevan dengan tuntutan pelayanan masyarakat, tetap dapat dilakukan. Sebelumnya, penambahan perangkat Deputy Gubernur ini, juga telah pernah diusulkan Pemerintah DKI Jakarta, sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, namun tidak terealisasi pada akhirnya.

Saat ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati penambahan perangkat Deputy Gubernur tersebut sebanyak 4 (empat) orang. Masing-masing deputi akan membidangi tugas yang berbeda, yakni Deputy Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, Deputy Gubernur Bidang Pemerintahan, Deputy Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Deputy Gubernur Bidang Penyelenggaraan Pembangunan.

Keempat Deputy Gubernur DKI Jakarta ini berperan sebagai lembaga *think tank* untuk menggodok kebijakan-kebijakan publik yang akan digulirkan Pemerintah DKI Jakarta, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sementara fungsinya adalah sebagai lembaga pendukung (*element support*) untuk membantu Gubernur DKI Jakarta dalam merumuskan dan melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang tepat, efektif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tarik Menarik

Permasalahan yang mengganjal saat ini adalah latar belakang keempat Deputy Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dari mana asal usul kapasitas mereka untuk menjadi Deputy Gubernur DKI Jakarta? Persoalan ini telah memicu tarik menarik di antara tiga usulan yang berbeda.

Usulan Pertama menginginkan agar Deputy Gubernur DKI Jakarta berasal dari luar pemerintahan atau pejabat nonkarir yang direkrut secara independen. Sementara usulan kedua menginginkan agar latar belakang Deputy Gubernur DKI Jakarta berasal dari pejabat karir di lingkungan pemerintah DKI Jakarta.

Sedangkan usulan yang ketiga adalah gabungan antara usulan pertama dengan usulan kedua. Ini merupakan langkah moderat untuk mengeliminir tarik menarik di antara usulan pertama dan usulan kedua, dengan menempuh jalan tengah. Mereka mengusulkan agar dua Deputy Gubernur DKI Jakarta berasal dari pejabat karir dan dua deputi lainnya berasal

dari pejabat non karir.

Namun, permasalahan yang sesungguhnya sangat jauh dari persoalan antara pejabat karir dan pejabat nonkarir. Substansi permasalahan yang dihadapi Pemerintahan DKI Jakarta adalah bagaimana mengelola pemerintahan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keamanan dan stabilitas sosial, atau pun mendorong peningkatan etos kerja aparatur Pemerintah DKI Jakarta.

Pertanyaannya, siapa di antara kedua komponen ini yang lebih mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan yang baik di DKI Jakarta, itulah yang menjadi pilihan terbaik. Bahkan, perangkat Deputy Gubernur justru tidak dibutuhkan jika tidak berhasil mendorong kualitas pengelolaan pemerintahan di DKI Jakarta.

Jika persoalan Deputy Gubernur DKI Jakarta berpuncak pada dikotomi antara pejabat karir dengan nonkarir atau pun penggabungan di antara keduanya, kehadiran Perangkat Deputy Gubernur di tengah-tengah pemerintahan DKI Jakarta, dikhawatirkan justru tidak memberi nilai tambah, bahkan cenderung seperti membagi-bagi kekuasaan.

Pejabat Karir vs Independensi Deputy Gubernur

Ada sejumlah alasan, mengapa sebagian kalangan lebih menyetujui latar belakang Deputy Gubernur DKI Jakarta dari pejabat karir. Dari sejumlah alasan itu, salah satu yang paling mendasar adalah bobot pengetahuan pejabat karir yang sudah barang tentu lebih kuat dari pada pejabat nonkarir tentang penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta.

Dengan pengetahuan yang kuat tersebut, masing-masing Deputy Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari pejabat karir tersebut, diharapkan akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kinerja Pemerintah DKI Jakarta.

Namun, alasan pihak lain yang mengusulkan calon Deputy Gubernur dari pejabat nonkarir, juga sangat kuat. Alasan paling mendasar, mengapa Deputy Gubernur DKI Jakarta harus berasal dari luar pemerintahan (nonkarir), semata-mata agar sesuai dengan kedudukan Deputy Gubernur yang independen. Sebab jika Deputy Gubernur DKI Jakarta berasal dari pejabat karir, dikhawatirkan menjadi tidak independen, karena terkendala de-

Deputi Gubernur DKI Jakarta

ngan hubungan struktural antara deputi sebagai bawahan dan gubernur sebagai atasan.

Di samping itu, alasan pengetahuan pejabat karir yang lebih kuat tentang penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta, walau pada satu sisi dapat dibenarkan, namun di sisi lain juga memiliki kelemahan. Deputi Gubernur yang sebenarnya dibutuhkan bukan sosok yang hanya mampu memahami kinerja Pemerintah DKI Jakarta, sebagaimana yang dimiliki para pejabat karir.

Demikian juga dari sisi administrasi kepegawaian. Penempatan pegawai atau staf Pemerintah DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur, juga berpotensi mengundang dislokasi jabatan bagi Deputi Gubernur yang telah menyelesaikan tugasnya. Hal ini sesuai dengan masa jabatan Deputi Gubernur yang bersifat temporer, yang sewaktu-waktu dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Para Deputi Gubernur yang purnatugas itu menjadi sangat mungkin menjadi pejabat nonjob, pada hal dari sisi kemampuan, mereka sangat dibutuhkan.

Sebaliknya, jika terjadi mutasi untuk menstrukturalkan kembali mantan Deputi Gubernur tersebut, juga berpotensi memicu dampak buruk pada produktivitas Pemerintah DKI secara keseluruhan. Sebab, jika keempat mantan Deputi Gubernur tersebut distrukturalkan kembali, dengan sendirinya mendorong terjadinya mutasi besar-besaran, yang sudah barang tentu akan mempengaruhi kinerja para staf lain dan pada akhirnya berdampak buruk pada pelayanan masyarakat.

Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan

Yang lebih penting dari kehadiran Deputi Gubernur DKI Jakarta, sesungguhnya adalah bagaimana kinerja mereka dalam mengembangkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good and clean government*. Keberadaan mereka sebagai *think tank* atau pusat penggodokan kebijakan adalah untuk mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan dalam upaya penyejahteraan masyarakat sesuai dengan pembedangan tugasnya masing-masing.

Dengan fungsi itu, para Deputi Gubernur DKI Jakarta harus mampu menjadi tumpuan harapan bagi pemerintah untuk membangun program-program yang secara langsung dapat menyentuh persoalan Jakarta, mulai dari pedagang kaki lima, masyarakat miskin, layanan administrasi publik, persampahan, kemacetan lalu



foto: berindo wilson

Kompleksitas persoalan Jakarta membutuhkan sentuhan profesionalisme deputi gubernur DKI Jakarta

lintas dan berbagai masalah akut yang dihadapi Jakarta dewasa ini.

Para Deputi Gubernur, sesuai dengan pembedangannya masing-masing bekerja menggodok kebijakan-kebijakan yang memberi pemecahan dan jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta, baik menyangkut ekonomi keuangan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, maupun penyelenggaraan pembangunan.

Di samping itu, para Deputi Gubernur DKI Jakarta, juga harus mampu membangun program-program pengembangan kota, sehingga Jakarta tidak terkesan sebagai kota yang jorok, semrawut, dan kumuh. Kehadiran para Deputi Gubernur harus benar-benar mampu membangun program-program pengembangan Jakarta menuju kota megapolitan yang bersih, teratur, dan tertib, sebagaimana kota-kota besar lainnya di berbagai belahan dunia.

Di sini, latar belakang Deputi Gubernur dari luar pemerintahan menjadi sangat signifikan mempengaruhi *performance* kelembagaan Deputi Gubernur itu sendiri, baik mereka yang berlatar belakang akademisi, peneliti, tokoh-tokoh intelektual, atau pun aktivis sosial. Pemikiran ini diperkuat dengan alasan bahwa selama ini Pemerintah DKI Jakarta yang telah di-

lengkapi dengan perangkat asisten, yang pembedangan tugasnya sama dengan deputi Gubernur.

Ternyata, keberadaan Asisten Gubernur DKI Jakarta tersebut belum memadai dalam menggodok sebuah kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artinya, bila Deputi Gubernur DKI Jakarta berasal dari pejabat karir, ada kemungkinan kinerjanya akan sama dengan perangkat Asisten Gubernur DKI Jakarta yang ada sekarang.

Ini tentu bukan pilihan yang tepat, sebab yang sangat dibutuhkan masyarakat sesungguhnya adalah perubahan iklim kebijakan dari Pemerintah DKI Jakarta. Tanpa perubahan iklim kebijakan tersebut, maka kehadiran perangkat Deputi Gubernur DKI Jakarta, hampir tidak diperlukan.

Oleh karena itu, kehadiran perangkat Deputi Gubernur DKI Jakarta pascarevisi UU No. 34 Tahun 1999, sangat diharapkan menjadi perangkat yang benar-benar mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan pemerintahan yang demikian, harapan akan berlangsungnya peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta akan lebih terlihat.

(Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta)



foto: berindo wilson

Banjir, persoalan lama yang belum terselesaikan

PR Sutiyoso untuk Gubernur Baru

Setiap terjadi pergantian kepemimpinan, kebijakan acapkali berganti. Kepemimpinan yang baru, biasanya enggan untuk meneruskan program pemimpin terdahulu. Dia berusaha membuat pola baru sesuai dengan apa yang ada di benaknya.

Mulai lagi dari titik nol. Artinya sama dengan teori *zero option*. Tak apa-apa jika program baru pelaksanaannya berujung lebih baik. Tetapi jika sebaliknya, membelokkan kebijakan lama yang dinilai sudah mapan, hasilnya bisa celaka.

Contohnya, ketika Gubernur Ali Sadikin diganti oleh Tjokropranolo, tahun 1977. Saat itu, salah satu kebijakan pemerintahan Ali Sadikin, menghapus becak di wilayah DKI Jakarta, karena becak membuat kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Tjokropranolo malah membalikkan keadaan ketika mulai menduduki jabatan Gubernur. Becak boleh beroperasi lagi. Di sebuah tayangan televisi, Bang Noly, demikian dia akrab dipanggil, sengaja memunculkan sosoknya yang merasa peduli pada masyarakat akar rumput. Di panggung, Bang Noly tertawa sembari melambaikan tangan, menaiki becak yang dikayuh pengemudinya.

Akibat apa timbul kemudian? Ribuan tukang becak yang sudah pulang kampung, berbondong-bondong kembali

membawa becak mereka ke Jakarta. Banyak pula yang sudah menjual harta bendanya di kampung agar bisa kembali ke Jakarta. Bengkel pembuat becak seperti mendapat angin segar dan terdorong untuk kembali merakit becak. Padahal, Ali Sadikin telah melampirkan semua becak ke Laut Jawa untuk jadi rumput.

Ujung-ujungnya Bang Noly terperangkap kebijakannya sendiri. Ketika becak tetap tidak bisa beroperasi di Jakarta, para tukang becak pun merasa dikibuli. Bang Noly patut bersyukur karena di era Orde Baru, tidak ada orang yang berani berunjuk rasa, apalagi melancarkan aksi protes di jalanan. Seandainya terjadi saat ini, mereka bisa mengamuk. Lebih celaka lagi, lalu lintas di Jakarta menjadi semakin terjebak dengan kemacetan luar biasa. Kehidupan tukang becak pun menjadi lebih tidak manusiawi. Di kawasan tertentu, seperti Pademangan, becak memang masih diperkenankan.

“Beberapa program penting yang telah dilakukan Gubernur sebelumnya, sebaiknya dikaji serius. Jangan diubah begitu saja oleh penerusnya. Jika sudah ba-

gus, mengapa harus digusur?” kata Yessy (19) mahasiswi STIE di Jakarta Timur. “Tapi, kalau ada yang dianggap tidak pas, memang perlu diubah, tetapi lewat pertimbangan yang matang.”

Yessy, meskipun tidak setiap hari menggunakan *busway*, menilai pola transportasi makro (PTM) pemerintah DKI Jakarta ini sangat bagus. Semua masyarakat telah mengakuinya. Meskipun baru dimulai dengan *busway*, PTM perlu diteruskan hingga semua menjadi kenyataan, termasuk *monorel* dan *subway*. Harapan Yessy, kelak kemacetan Jakarta akan berkurang.

Tetapi Handri, salah seorang pekerja seni media visual, mengumpat. “Pokoknya, pemerintah DKI ke depan harus mampu mengatasi banjir,” kata Handri. Memang dia bukan warga DKI, karena berdomisili di Bekasi. Namun aktivitasnya di Jakarta sering terganggu akibat banjir.

Era Sutiyoso

Gubernur Sutiyoso yang sebentar lagi habis masa jabatannya, mengaku berbagai program pentingnya untuk mengatasi masalah krusial telah melalui berbagai pengkajian serius dan dibantu oleh beberapa ahli.

Pola Transportasi Makro (PTM), misalnya, baru berupa embrio *busway*. Dalam proyek ini, Sutiyoso didampingi oleh para ahli dari CTS-UI (*Center for Transportation Studies Universitas Indonesia*) di bawah pimpinan Soetanto Soehodo. Sutiyoso juga dibantu oleh pakar transportasi dari luar negeri seperti Bogota, ibukota Columbia yang pertama kali berhasil mengoperasikan sistem *busway*.

Sutiyoso menyebutkan, penerapan pola kebijakan tersebut berdasarkan Perda No 12 tahun 2003 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kekuatan hukum tetap ini didukung oleh terbitnya SK Gubernur DKI Jakarta No 84 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pola Transportasi Makro (PTM) di Provinsi DKI Jakarta.

PTM atau *Jakarta Macro Transportation Scheme (JMaTS)*, dimaksudkan Sutiyoso untuk mengalihkan pemilik mobil pribadi dengan alat transportasi umum di masa mendatang. PTM mengintegrasikan empat sistem transportasi umum yang bersifat masal, nyaman, murah dan aman, memprioritaskan jenis *busway*, rel layang (*monorel*) dan kereta api bawah tanah (*subway*). Terakhir adalah sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Menurut survei JICA dan Bappenas, sebulan setelah *busway* beroperasi, sekitar 14 persen pengguna *busway* adalah dari kalangan berkecukupan. Padahal mereka adalah pengguna kendaraan pribadi. Hingga kini, *busway* sudah beroperasi pa-

da koridor I hingga VII. Target Sutiyoso, Koridor VIII dan IX jalur busway antara Cililitan-Tanjung Priok dan Cililitan Pluit bisa terlaksana menjelang masa akhir jabatannya. Ditargetkan pula, 15 koridor pada tahun 2010.

Angkutan massal lain adalah berbentuk monorail (selesai 2010) dan Mass Rapid Transit (selesai 2014).

Banjir dan Tandon Raksasa

Kebijakan atau program lain yang penting yang dapat dilanjutkan adalah pembangunan untuk mengatasi permasalahan krusial di Jakarta, seperti upaya mengatasi banjir, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan termasuk ruang terbuka hijau, wilayah kumuh, ketertiban masyarakat dan keamanan.

Masalah banjir telah berulang menyengsarakan Jakarta, terjadi sejak jaman VOC, Pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan. Banjir pada dasawarsa terakhir di masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah tahun 1979, 1996, tahun 2002 dan terakhir tahun 2007.

Posisi dataran tanah Jakarta memang rawan dan bisa disebut sebagai wilayah pelimpahan air, karena posisi tanahnya 40 persen berada di bawah permukaan air laut. Jakarta merupakan muara dari 13 sungai yang rata-rata di bantarnya berdiri bangunan-bangunan liar dan berpotensi untuk mendangkalan sungai.

Salah satu program yang digenjut Sutiyoso, membangun Banjir Kanal Timur yang kelak akan menyambung dengan Banjir Kanal Barat dengan membentuk tapal kuda. Proyek BKT dicanangkan Presiden Megawati, 10 Juli 2003. Mengacu pada *Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta* (Nedeco) tahun 1973, studi JICA 1997, BKT kelak memiliki multi fungsi. Selain sebagai pengendali banjir, air yang tertampung akan menjadi penyimpanan bahan baku air minum atau sekaligus penampung air yang selama ini terbuang sia-sia ke laut di musim hujan. BKT akan menjadi sarana transportasi air dan akan mengurangi beban jalan yang ada akibat kemacetan. Berkembangnya wilayah di sepanjang BKT menjadi kota baru tertata dan dilengkapi sarana pariwisata.

Ketika menghadiri pertemuan *sister city* di Beirut, April 2007, Sutiyoso mengundang Islamic Development Bank (IDB) dan menawarkan pembangunan tandon raksasa berupa *deep tunnel reservoir*. IDB sangat tertarik dengan tawaran Gubernur DKI itu. Tandon raksasa itu akan membentang sepanjang 17 Km, dari Jalan MT Haryono-Kampung Melayu-Bukit Duri sampai Pintu Air Manggarai. Ke arah barat dimulai di Pintu Air Karet, Pintu Air Grogol dan Pintu Air Muara Angke.

Proyek raksasa ini dapat menampung 30 juta meter kubik air. Selain mengen-



Wajah Jakarta yang semrawut

foto: berindo wilson

dalikan banjir, juga menampung air baku bagi PAM. Sebuah terowongan air bawah tanah yang berdiameter 18 meter dengan sistem pengendalian teknologi tinggi yakni sistem robot *global positioning satelit* (GPSD), diperkirakan dapat menampung limpahan banjir selama 18 jam. Tandon ini terintegrasi dengan BKB dan BKT, dan akan dikelola oleh Badan Otorita atau BUMD. Tentu saja proyek ini sekaligus menertibkan gubuk-gubuk liar di sepanjang bantaran kali.

Program Kesra

Di era Sutiyoso berjalan tiga program kesejahteraan masyarakat unggulan, yakni pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam bidang pendidikan, Pemprov DKI menerapkan pola wajib belajar 9 tahun dengan membebaskan SPP hingga sekolah tingkat lanjutan pertama (SLTP) dan madrasah. Untuk SLTA yang dinyatakan tidak mampu juga dibebaskan dari uang SPP. Guru memperoleh insentif Rp 1 juta sehingga penghasilan bulanan setiap guru sekitar Rp 2,5 juta. Dengan demikian total anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk pendidikan adalah 21,5 persen atau melebihi target nasional.

Untuk bidang kesehatan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar. Padahal dari pemerintah pusat hanya Rp 14,9 miliar berupa kompensasi kenaikan harga BBM. Anggaran ini diarahkan Sutiyoso untuk meningkatkan program kesehatan masyarakat antara lain, membayar jaminan kesehatan bagi keluarga miskin lewat program JPK GAKIN. Mereka yang termasuk kategori miskin, wajib dibebaskan dari biaya perawatan kesehatan.

Pemda DKI, dalam hal kemiskinan, melaksanakan program pengentasan kemiskinan lewat forum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Namun setelah

melalui kajian, Drs. Nursamsy MSi, Kepala bidang Sosbud BPM DKI Jakarta, menyebutkan bahwa forum itu belum bekerja efektif. Selain lebih kental dengan permasalahan ego sektoral, program tidak tepat sasaran. Karenanya KPK diubah menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Forum ini segera dibentuk dengan melibatkan camat dan lurah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1791. Lurah mempunyai posisi penting, berada di garis depan dan mengetahui secara langsung, peta kemiskinan di wilayahnya. TKPK juga didorong untuk berkoordinasi dengan unit-unit yang punya Tupoksi.

Gubernur Sutiyoso melengkapi program pengentasan kemiskinan dengan memunculkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau dengan sebutan PPMK. Model pengentasan kemiskinan, satu-satunya yang berbeda dari daerah lain di Indonesia ini diprogramkan sejak tahun 2001. Pelaksananya dilakukan tahun 2002 hingga kini dengan jumlah total dana yang digulirkan sebesar Rp 676,15 miliar.

Meski banyak hambatan, PPMK dinilai memiliki tujuan jelas dan terarah karena bantuan yang diberikan tidak seperti bantuan-bantuan lain yang selalu dianggap hibah. PPMK mendidik masyarakat untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri dan tidak memiliki mental ketergantungan. Mereka terdidik untuk jadi warga kota yang baik, mandiri, peduli lingkungan, dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Program-program yang baik dari Sutiyoso tentu perlu diteruskan oleh siapa pun penggantinya. Juga pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan harus dikaji ulang, dilanjutkan dengan pola yang teruji. Yang pasti, program yang setengah jalan lantas dimulai lagi dari nol, hanya membuang waktu dan biaya. ■ DEN, SH, RB

Warga Tak Peduli Pilkada DKI

Hiruk pikuk partai-partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta, ternyata tidak dirasakan di berbagai lini masyarakat. Bahkan berbagai institusi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada juga tidak memberi perhatian yang memadai.

Pilkada DKI Jakarta sebenarnya untuk siapa? Pertanyaan ini mencuat jauh sebelum berlangsungnya rangkaian Pilkada DKI Jakarta yang akan berakhir dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Survei-survei yang dilakukan berbagai institusi juga sudah sejak awal menyebut rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta, akan ditandai dengan besarnya angka golongan putih (Golput), mereka yang tidak berminat menggunakan hak pilih.

Untuk menguji, baik berbagai asumsi maupun hasil survei tersebut, majalah *Berita Indonesia* mencoba melakukan uji lapangan, baik kepada masyarakat maupun instansi yang terkait dengan Pilkada DKI.

Memang, hasilnya sangat tragis. Sebagian masyarakat kalangan bawah tidak mengetahui akan dilangsungkannya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. "Oh... gubernurnya dipilih juga?" kata seorang tukang ojek balik bertanya. Dia ternyata tidak menyadari kalau spanduk-spanduk, pamflet-pamflet, stiker-stiker, bahkan Baliho raksasa yang terpampang di tempat mereka mangkal merupakan materi kampanye para calon gubernur.

"Pikirnya tadi, pengumuman demam berdarah dan narkoba. Kan lagi banyak ini mas!" katanya dengan polos.

Di antara masyarakat bawah yang lebih melek politik, seperti pedagang, juga tidak menyadari kalau mereka akan dihadapkan pada sebuah Pilkada. "Ga ngurusinlah mas! Mereka aja yang ngurusin itu. Cari makan aja kita susah, apa-

lagi harga-harga barang lagi naik begini," kata Taufik, seorang pedagang asal Aceh yang berjualan di Kelurahan Lubang Buaya.

Tanggapan yang hampir sama juga diungkapkan para sopir angkutan umum. "Mikirin setoran aja sudah puyeng mas! Boro-boro mikirin gubernur," kata seorang sopir KWK T05 jurusan Setu-Cililitan. Kalangan pekerja, merasakan kurangnya sosialisasi Pilkada yang dilakukan pemerintah, khususnya KPUD. "Kaplan sih pemilihannya? Koq saya belum didaftar ya? RT atau RW juga belum memberitahukan," kata Simamora, staf *maintenance* di perusahaan Pengelola Gedung Bank Mandiri Jl. Wahid Hasyim.

Tidak Memadai

Menurut pengamatan *BI*, tidak ada upaya untuk memasyarakatkan Pilkada di antara warga DKI. Padahal kesempatan tersebut merupakan pertama kalinya, di mana Gubernur DKI dipilih langsung oleh warga.

Untuk peliputan Pilkada, *BI* melayangkan puluhan surat kepada berbagai instansi yang berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Surat itu sengaja didesain dengan menyertakan sejumlah daftar pertanyaan. Kepada setiap narasumber, dimohonkan juga agar dijawab tertulis, jika tidak bersedia atau tidak memiliki kesempatan melakukan wawancara langsung.

BI menawarkan jawaban tertulis kepada tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, menyangkut dukungan mereka dengan calon gubernur didukung partai-partai mereka. Juga surat permohonan wawancara dilayangkan ke tiga Balon Gubernur DKI, disertakan pula



foto: berindo wilson

Warga Jakarta Butuh Bukti Bukan Janji

daftar pertanyaan tertulis, sehingga memudahkan mereka menjawab jika memang tidak bersedia untuk wawancara langsung. Hanya Sarwono Kusumaatmadja yang menyatakan bersedia diwawancara. Tetapi dilakukan lewat telepon.

Surat dengan daftar pertanyaan juga dilayangkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Ketua Pansus Pembentukan Pengawas Pilkada DKI Jakarta Demikian juga dengan Efendy Simbolon, Ketua Pansus Revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang juga anggota Fraksi PDIP mewakili Jakarta.

Secara umum, dari puluhan surat yang dikirimkan *BI* kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, tidak banyak mendapat respon. Hanya beberapa fraksi yang meresponnya dengan antusias. Di antaranya Fraksi Partai Demokrat, menjawab pertanyaan-pertanyaan *BI* dengan tulisan tangan. Sedangkan Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta menjawabnya dengan ketikan yang rapi. Sementara Fraksi Keadilan Sejahtera bersedia dengan wawancara langsung.

Namun, bagi pihak lain, ke-

mudahan yang ditawarkan *BI* justru dianggap jadi beban. Seorang staf dari salah satu wakil ketua DPRD DKI Jakarta yang dikonfirmasi, justru menyatakan bahwa surat permohonan wawancara dari *BI*, tertanggal 27 April 2007, berikut daftar pertanyaan menyangkut pembentukan Panitia Pengawas Pilkada DKI Jakarta, sudah didisposisi pada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD DKI untuk menjawabnya.

Tidak tahu persis alasannya mengapa dialihkan ke Humas, karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa tawaran wawancara tidak harus bertemu, cukup memberi jawaban tertulis. Selama *BI* merancang dan melakukan liputan, menunjukkan betapa tak acuhnya instansi-instansi di DKI yang berkaitan dengan Pilkada.

Mereka mesti melakukan sosialisasi yang lebih intens. Jika tidak, partisipasi warga pemilih akan semakin kecil dari apa yang diprediksi sebelumnya. Jika Pilkada DKI tidak direpson dengan *turn out* (kehadiran di bilik suara) yang signifikan, maka dana sebesar Rp 158 miliar lebih yang dialokasikan untuk membiayai Pilkada akan sia-sia. Padahal uang itu terkumpul dari pajak rakyat. Pertanyaan yang harus dijawab, kenapa masyarakat apatis? ■ **MH, SH, RB**

Pelopor Siap Pemilu



Rapimnas Partai Pelopor: Melakukan persiapan dan antisipasi untuk menghadapi Pemilu 2009

Partai Pelopor melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2009. Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur bahkan siap mengusung Rachmawati sebagai capres.

Hujan gerimis tidak memadamkan semangat para peserta Rapat Pimpinan Pusat (Rapimnas) Partai Pelopor di Hotel Safari Garden, Cisarua, Bogor, pada Senin, 30 April lalu.

Menyusul pengangkatan Rachmawati Soekarnoputri sebagai anggota Dewan Pertim-

banan Presiden (Wantimpres) bidang politik, anak ketiga Bung Karno itu mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Pelopor dalam Rapimnas tersebut.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2007, semua anggota Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan ketua umum partai, pimpinan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), serta berbagai organisasi lainnya, karena mereka harus memusatkan perhatiannya sebagai anggota badan baru tersebut.

Pengunduran diri Rachma mulai berlaku 1 Mei 2007. Dalam jumpa pers sebelum pembukaan Rapimnas, dia mengumumkan Sekjen Partai Pelopor Eko Santjojo sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum DPP Partai Pelopor hingga berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Rapimnas kali ini juga mem-

bahas sejumlah agenda krusial terkait rencana revisi paket UU bidang politik. Dalam kaitan itu, Partai Pelopor melakukan persiapan dan antisipasi untuk menghadapi Pemilu 2009.

Partai Pelopor menyatakan sudah siap untuk bertarung dalam Pemilu 2009. Kesiapan menghadapi Pemilu itu juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pelopor Jawa Timur, Alfian Maning. Kepada *Berita Indonesia*, dia menyatakan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor yang berjumlah 38 DPC sudah siap diverifikasi.

Menanggapi wacana pencalonan Rachmawati sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009, dengan tegas Alfian Maning menyatakan, sikap DPD Jawa Timur akan mendukung sepenuhnya pencalonan tersebut. Bahkan, langkah-langkah persiapan DPD-nya menghadapi Pemilu yang akan datang, juga sekaligus bertujuan untuk mengusung Rachmawati sebagai calon presiden.

KLB yang dijadwalkan berlangsung sekitar akhir Mei atau awal Juni 2007 akan menentukan apakah Partai Pelopor akan tetap melakukan verifikasi atau bergabung dengan partai-partai lainnya untuk memenuhi ketentuan *electoral threshold*. Saat ini sudah ada beberapa partai yang mengajak bergabung, antara lain Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). ■ **RH, SP**

Pemerintah Prioritaskan UU Politik

Berkejaran dengan waktu, pemerintah terus mengintensifkan penyiapan draf paket RUU bidang politik yang diharapkan bisa segera dibahas bersama DPR. Paket RUU bidang Politik itu meliputi RUU Perubahan atas UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, RUU Perubahan atas UU tentang Pemilu Presiden dan Wapres, RUU Perubahan atas UU tentang Parpol dan RUU perubahan atas UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"UU paket politik ini merupakan agenda Depdagri sebagai prioritas nasional. UU ini nanti akan diimplementasikan pada Pemilu 2009. Ini berarti UU tersebut paling lambat harus dapat diselesaikan September 2007," ujar Mendagri A. I. Widodo AS. Menurutnya, draf RUU tersebut

sudah dalam tahap finalisasi.

Paket RUU bidang politik itu sebelumnya telah disosialisasikan kepada parpol dan sempat menuai kecaman. Misalnya mengenai calon presiden yang harus sarjana dan parpol harus mendepositokan dana Rp 5 miliar.

Ketua DPP Partai Hanura Samuel Koto berharap draf RUU bidang politik ini juga dibuka ke publik untuk menghindari terjadinya berbagai kecurigaan atas UU itu.

Dia juga berharap pembahasan draf RUU yang masih ditangani pemerintah itu tidak dicampuri kepentingan parpol yang sedang ada di kekuasaan. Dugaan itu muncul karena ada sejumlah ide, terutama dalam RUU Pemilu yang terkesan menghalang-halangi munculnya parpol

baru. Misalnya lewat ambang batas yang ditentukan (*electoral threshold*) dan jaminan dana Rp 5 miliar untuk parpol yang mendaftar menjadi peserta pemilu. "Untuk mencegah berbagai dugaan itu, pembahasan harus dilakukan transparan," ujarnya dalam dialog bertema "Parpol Lama vs Parpol Baru" di Jakarta, Jumat (27/4).

Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar juga menyatakan tidak setuju kalau parpol yang mendaftar ikut pemilu harus menyertakan jaminan Rp 5 miliar. Namun yang perlu dipikirkan bagaimana partai bisa eksis dengan memiliki sejumlah dana. Sebab bantuan pemerintah relatif kecil dan partai juga tak dapat hidup hanya dengan mengandalkan iuran anggotanya. ■ **SP**



foto: repro republik

Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir didampingi Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu dan Sekjen DPP PKB Lukman Edy dalam diskusi tentang calon pemimpin alternatif.

Dicari, Tokoh Muda Calon Presiden

Sebagian besar tokoh nasional yang berpeluang sebagai calon presiden mendatang berusia di atas 60 tahun. Padahal Ir. Soekarno dan Soeharto berusia di bawah 50 tahun ketika menjadi presiden. Karenanya masih terbuka peluang calon pemimpin alternatif dari kalangan muda.

Wacana tentang calon presiden alternatif dari kalangan muda muncul dalam diskusi politik yang digelar di gedung DPR Senayan, Jumat (27/4). Sejumlah tokoh politik dan pengamat menyuarakan wacana tersebut dalam diskusi dialektika demokrasi yang bertajuk "Peluang calon pemimpin alternatif 2009".

Topik ini mengemuka karena dari sekian banyak tokoh nasional yang mendominasi sekarang, dan berpeluang tampil sebagai calon presiden, masih yang itu-itu saja dan sebagian besar telah berusia di atas 60 tahun. Nyaris tidak ada yang berusia di bawah itu. Sebut saja misalnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat presiden, dalam tahun 2009 nanti akan berusia 60 tahun. Begitu pula Megawati Soekarnoputri yang kelahiran tahun 1949. Wiranto yang dikabarkan siap bertarung di Pilpres 2009 bahkan sudah berusia lebih dari itu.

Padahal kalau kita menengok ke bela-

kang, presiden RI pertama, Ir Soekarno menjadi kepala negara pada usia 46 tahun dan Soeharto menjabat sebagai presiden (1968) saat berusia 47 tahun.

Langkanya tokoh-tokoh muda yang tampil sebagai pemimpin bangsa sekarang ini menggugah pemikiran sejumlah politisi dan peneliti yang tampil dalam diskusi tersebut. Ketua DPP PAN Sutrisno Bachir berharap calon pemimpin bangsa ini hendaknya tidak saja berasal dari Jakarta tapi juga dari daerah. "Gubernur, bupati, kiai dan pebisnis bisa saja menjadi calon alternatif," kata Sutrisno Bachir yang juga pengusaha.

Menurut penilaiannya, secara alamiah pemimpin yang sudah tua energinya akan jauh berkurang. Sedangkan untuk situasi dan kondisi seperti sekarang ini dibutuhkan pemimpin yang memiliki energi yang berlebih. "Harus ada calon alternatif sebagai solusi dari calon pemimpin yang sudah ada saat ini. Semoga kaum muda bisa muncul, misalnya dari PDI-P Pramono Anung atau tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin," paparnya.

Krisis Tokoh Utama

Peluang munculnya tokoh alternatif dari daerah, menurut Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, karena sejumlah partai nampak mulai mengalami krisis tokoh utama. Sebagai gambaran, Sukardi menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih mengandalkan Megawati Soekarnoputri, sedangkan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) sangat tergantung pada Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Begitu pula Partai Demokrat masih tetap mengandalkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Golkar masih mengagungkan Jusuf Kalla.

Pemimpin alternatif yang berpeluang dimunculkan dari daerah bisa saja figur gubernur yang terbiasa memimpin. Kecenderungan munculnya tokoh alternatif dari daerah bisa dilihat melalui hasil survei yang perlu dilakukan lembaga pendidikan atau lembaga studi.

"Setiap pekan bisa dilakukan survei pendapat umum terhadap 10 nama. Siapapun yang muncul akan selalu menarik perhatian," kata Sukardi.

Di sisi lain, kendati masih tergantung pada Gus Dur, namun PKB juga mulai menyiapkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk maju sebagai pemimpin nasional. Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang tampil dalam diskusi berpendapat, selama ini Gus Dur tak diberi kesempatan berperan di bidang politik karena minimnya dukungan politik.

"Saya kira para birokrat, gubernur seperti Sultan Hamengku Buwono X dan Sutiyoso bisa maju sebagai calon pemimpin alternatif. Untuk TNI saat ini mengalami krisis kepemimpinan, tidak ada tokoh yang menonjol. Sedangkan di lingkungan Polri, justru Kapolri Jenderal Sutanto yang menonjol," kata Lukman Edy.

Langkanya tokoh muda tampil sebagai calon pemimpin nasional, menurut pengamatan Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, karena selama ini tidak ada kesempatan pada kaum muda untuk maju dalam kancah politik nasional. Namun masyarakat tidak boleh terjebak dalam kompromi syarat-syarat calon presiden.

Dia mengaku banyak kader muda Golkar yang layak untuk diusung sebagai pemimpin alternatif di Pemilu 2009 nanti. "Seperti Ketua DPR Agung Laksono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dan masih ada banyak lagi lainnya," ungkap Napitupulu.

Pemilihan Presiden memang masih akan berlangsung dua tahun lagi, yakni pada tahun 2009. Kendati begitu, tidak ada salahnya jika kaum muda mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin alternatif dalam pemilihan presiden mendatang. ■ SP

Tatkala DPD Minta Jabatan Menteri

DPD berobsesi mengimbangi kekuatan partai politik dengan mengusulkan nama calon menteri. Meski tak lazim, cara ini menambah hingar-bingar isu reshuffle kabinet yang tadinya didominasi partai.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida tak pernah berhenti memperkuat peran politik dan konstitusional lembaganya, untuk menempatkan badan legislasi perwakilan daerah ini sebagai senat yang mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat.

Namun, anehnya di tengah isu perombakan kabinet, doktor sosiologi lulusan Universitas Indonesia (UI) Jakarta tahun 2002 itu memberanikan diri menjadi promotor atas sejumlah rekannya untuk dipilih sebagai menteri. Sebab tidak lazim, hingga suami dari Hj Siti Fatimah ini disebut telah melakukan blunder politik, usulan yang disampaikan secara terang-terangan itu telah membuka kesadaran publik tentang ambisi politik kepentingan para anggota DPD yang sangat patut dipertanyakan.

Menurut Laode, menjadi menteri tak hanya domain partai. Sebab DPD punya peran khusus memajukan daerah. Karena itu menteri harus pula berperspektif daerah.

"Calon menteri yang berasal dari representasi kekuatan basis daerah tertentu itu, misalnya, anggota DPD yang profesional, dan para gubernur yang terbukti kapasitas dan profesionalitasnya," kata Laode.

Saat mengadakan jumpa pers Kamis (25/4) untuk menyampaikan usulannya, pria kelahiran Tobea, Sulawesi Tenggara 12 Maret 1961 ini mengatakan reshuffle kabinet harus benar-benar mempertimbangkan profesionalitas,

bukan atas desakan dan kepentingan partai politik. Namun, dia sendiri selaku anggota DPD malah ikut-ikutan dalam hingar-bingar mengusulkan anggota DPD masuk menteri. Padahal di sisi lain, Laode menyimpulkan, justru karena kuatnya kepentingan politik, kinerja pemerintahan SBY-JK menjadi tidak maksimal.

Laode Ida memastikan telah mengantongi dukungan dari 30 anggota DPD untuk menempatkan sejumlah orang duduk dalam kabinet, dan suratnya itu sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama-nama yang diusulkan adalah Bambang P Suroso anggota DPD asal Bengkulu, Irman Gusman Wakil Ketua DPD asal Sumatera Barat, dan Sekjen DPD Siti Nurbaya.

"Saya sendiri hanya sebagai promotor saja. Itu pun hanya menghimbau kepada Presiden. Sebagai negarawan, SBY akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk dari DPD. Sebab, kalau hanya dari parpol itu namanya konservatisme parlementer, sementara SBY dipilih langsung oleh rakyat dan kita menganut sistem presidensial," tegas Laode yang dikenal selalu kritis, tetapi tulus serta santun dalam menyampaikannya.

"DPD adalah sebuah lembaga yang harus diperhitungkan SBY dalam reshuffle kabinet. Dan kita telah mengusulkan orang-orang terbaik untuk dijadikan menteri," ucap Laode lagi dalam jumpa pers di Cafe Ulam, Nusa Dua, Bali, Minggu (29/4).



Pernyataan Laode Ida seringkali menjadi bahan berita media massa. Ia memang memiliki sejumlah modal sosial untuk itu. Sebelum menjadi senator ia pernah menjadi wartawan harian *Angkatan Bersenjata* di Sulawesi Tenggara (1987-1990), sekaligus menjadi dosen di Unhalu, Kendari (1987-2000).

Ia pun terjun pula menjadi peneliti dan direktur di LEPPSEK (1991-1999), peneliti dan Direktur Pusat Studi Pengembangan Kawasan sejak 1999, tim ahli Fraksi Karya Pembangunan DPR (1997-1999), National Management Team untuk City Development Strategy Bank Dunia (2001-2002), Komisi Konstitusi MPR (2003-2004), dan menjadi Advisory Team Bappenas (2004).

Selain menempuh pendidikan formal hingga tingkat doktoral, sejumlah pendidikan informal pernah ia jambangi di berbagai negara. Seperti, mengikuti LEAD (Leadership for Environment and Development Program), sebuah program setara S2 berlangsung di Jakarta, Costarica, hingga Okinawa selama tahun 1995-1997.

Kemudian mengikuti International Visitor Program on US Political System, dilaksanakan oleh Pemerintahan

AS, di AS tahun 1998, lalu Eisenhower Fellowship for Emerging Leader on Local Government, Eisenhower Foundation di AS tahun 2002, dan ikut Asia Pacific Workshop on Budget Management and Accountability, UNDP, di Bangkok, Thailand tahun 2002.

Laode pun maju menjadi calon DPD pada Pemilu 2004 dengan menawarkan tiga agenda: Memperjuangkan kepentingan daerah; Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan baik; Memberi contoh DPD sebagai lembaga dengan derajat akuntabilitas yang baik. Ia akhirnya melenggang ke Senayan dengan menempati urutan pertama, setelah mendulang 154.367 suara atau 17,17 persen suara pemilih.

Selain berusaha merebut perhatian Presiden dalam memilih skuad kabinet, Laode Ida masih menyimpan agenda penting lain: Menyelenggarakan sidang umum MPR untuk melaksanakan amandemen kelima. Peristiwa ini maha penting untuk menentukan nasib DPD apakah semakin kuat atau akan dikucilkan selamanya oleh partai politik. Yang pasti tiket ke arah amandemen sudah di tangannya setelah Partai Demokrat turut menyatakan persetujuan. ■ HT

Reshuffle Setengah Hati

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan reshuffle (perombakan) Kabinet Indonesia Bersatu 7 Mei lalu. Secara keseluruhan, reshuffle ini tidak membuat perubahan yang signifikan dan dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar khususnya bidang ekonomi keuangan.

Hampir semua harian ibukota menyuarakan hal yang senada dalam laporan berita utama kesesokan harinya (8/5). Surat kabar sangat berpengaruh, Kompas dalam tajuknya 'Perombakan Berbobot Politik' menyoroti perombakan kabinet yang lebih berbobot politik daripada bobot profesional. Hadirnya warna politik dipengaruhi oleh pilihan pengganti Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang lama Saifullah Yusuf menjadi Luckman Edy (Sekretaris Jenderal PKB). Saifullah yang merupakan keponakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sudah dipecat dari PKB karena keberpihakannya kepada PKB kubu Matori yang berseberangan dengan Gus Dur. Jadi memecat Gus Ipul tidak berpengaruh dari perspektif kekuatan politik. Agar PKB tetap memiliki representasi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), dipilihlah Lukman Edy. Kompas juga menilai bahwa bobot politik dalam konotasi penegakan hukum juga ditandai oleh digantinya Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Yudhoyono akhirnya harus mengakui tekanan kuat dari hampir semua elemen masyarakat untuk mencopot ke dua menteri ini. Kompas menyangkan bidang ekonomi keuangan termasuk perdagangan dan industri tidak disentuh oleh perombakan. Padahal bidang itulah yang masih penuh persoalan seperti masalah beras, minyak, gas dan berbagai komoditas lainnya. Kompas mengingatkan bahwa persoal-

an mendesak bangsa ini adalah perbaikan perikehidupan sosial ekonomi rakyat banyak dengan sasaran mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan Harian Media Indonesia (MI) dalam editorialnya (8/5) 'Reshuffle Sebagai Drama' menilai reshuffle tiada ubahnya seperti sinetron. 'Audisi' para menteri di Cikeas yang ditangkap oleh kamera televisi menayangkan para kontenstan menebar senyum dan menyapa publik melalui konferensi pers singkat. 'Audisi' ini menurut Harian Investor Daily (7/5) dalam kari-katurnya yang 'menyentil' mirip audisi Indonesian Idol. Drama berjudul 'Reshuffle Kabinet' ini usai setelah sang sutradara Yudhoyono tampil di akhir adegan. Padahal isu reshuffle ini sudah menjadi diskusi panas selama kurang lebih tujuh bulan dan berakhir dengan pengumuman di Istana Negara yang cuma berlangsung kurang lebih 10 menit. MI menyebutnya 'drama' karena adanya ketimpangan antara proses yang memakan waktu dan energi yang begitu besar (kasak-kusuk politik, red) sedangkan hasilnya cuma reshuffle terbatas. Dari reshuffle terbatas ini, MI menilai bahwa Presiden tidak menganggap ada masalah krusial di bidang ekonomi karena tidak ada satu pun tim ekonomi yang diganti. Meskipun begitu, di sisi lain, MI menilai reshuffle kabinet juga menjanjikan perbaikan kinerja pemerintahan di bidang hukum. Pergantian Menhuk dan HAM serta Jaksa Agung diharapkan bisa menuntaskan kasus korupsi-korupsi besar dan pelanggaran hukum yang selama ini belum



foto: presidenby.info

diselesaikan.

Harian Republika (8/5) dalam berita utama juga menyoroti masalah ekonomi yang tidak disentuh oleh perombakan. Demi memperkuat beritanya yang berjudul 'Reshuffle Abaikan Kesejahteraan' ini, Republika mengutip pendapat berbagai ekonom yang menyesalkan tidak adanya penyesgaran di jajaran kementerian yang mengurus kesejahteraan dan ekonomi. Pengamat ekonomi dari Inter CAFÉ, Iman Sugema berpendapat bahwa ini menjadi blunder terbesar SBY. Kondisi ekonomi hanya akan membaik di indikator makro dan pasar finansial, tapi tetap terpuruk di sektor riil. "Kebijakan ekonomi tidak menysar bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan," kata Iman. Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy menyangsikan perekonomian Indonesia bakal membaik pasca-reshuffle, "Saya lebih menyebutnya reshuffle setengah hati, dan menstabilkan pengangguran saja. Sedangkan Ekonom senior Indef, Drajad Wibowo membuat perumpamaan mobil yang mogok karena mesinnya rusak, "Yang diperbaiki Presiden justru bannya. Jadi, tidak nyambung."

Harian ekonomi Investor Daily (7/5) bahkan sudah lebih dulu menyatakan bahwa reshuffle salah sasaran padahal Presiden belum mengumumkan para menteri yang akan diganti. Pada halaman depan terpampang judul besar-besarnya 'Tim Ekonomi Perlu Dirombak' yang dihiasi kutipan *bold* (tebal) pernyataan dari Ketua Masyarakat Madani Ismed Hassan Putro, "Tim ekonomi bukan *anchor of stability* tapi *anchor of stagnation*". Secara garis besar, para pengamat dan pakar ekonomi dan perbankan serta pelaku usaha menilai bahwa reshuffle kali ini hanya bersifat pragmatis jangka pendek, tidak memikirkan fundamental ekonomi jangka panjang. Terciptanya stabilitas di sektor finansial seperti menguatnya kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan lebih disebabkan oleh pengaruh regional, masuknya dana-dana jangka pendek (*hot money*) dan jasa Bank Indonesia. Tim ekonomi KIB seyogianya dirombak karena tak mampu menggerakkan sektor riil (perbaikan ekonomi, red), tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta gagal mengatasi gejala kebutuhan pokok rakyat. ■ MLP

Lima Wajah Baru Menteri KIB

Dari segi keterwakilan politik, perombakan ini tak membuat perubahan signifikan. Kalangan nonparitai bertambah dari 18 menjadi 19 orang. Partai Golkar memperoleh tambahan satu kursi kabinet, menjadi empat kursi. PPP mengalami penyusutan wakil dari tiga menjadi dua menteri. PBB mengalami penurunan keterwakilan, hanya menguasai satu kursi menteri. Sementara PKS, PKB, PAN, Partai Demokrat, dan PKPI tak mengalami perubahan tingkat keterwakilan. Penyusutan wakil di PBB dan PPP membuat kedua partai ini kecewa.

Empat menteri yang dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu dalam perombakan kabinet kedua adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Negara BUMN Sugiharto, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, serta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Presiden juga mengumumkan empat menteri barunya, yaitu Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, serta Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dirotasi menjadi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dirotasi menjadi Menteri Negara BUMN.

Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
Ir H Muhammad Lukman Edy, Msi (37 th)



Tidak banyak yang menduga Lukman Edy yang saat ini menjadi Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan posisi Saifullah Yusuf sebagai Menteri Percepatan Pem-

angunan Daerah Tertinggal (PDT).

Pria kelahiran Teluk Pinang, Riau, 26 November 1970, yang juga pengusaha ini pernah mengecap pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, S2 di Universitas Pajajaran, dan kini menjalani program S3 di Universitas Malaya, Malaysia. Sebagai pengusaha, dia aktif di bidang konstruksi di bawah bendera PT Inti Group dan menjadi Ketua DPD Gapensi, Riau, Ketua Bidang Sertifikasi dan Akreditasi Kadin Riau, Ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Riau, Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Riau (2004-2009). Dia juga pemilik sejumlah media di Riau. Suami dari Hj Gustini Zuliaty, Sag, dengan tiga anak ini berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ia menyadari nuansa politis jabatannya kecil, namun kalau tidak berhasil, ia tetap bisa dimaki-maki.

Menteri Komunikasi dan Informasi
Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA (48 th)



Mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya (2003-2006), ini menggantikan posisi Sofyan Djalil sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.

Nuh adalah alumni Jurusan Teknik Elektro ITS tahun 1983, pendidikan S2 dan S3 dia tempuh di jurusan Teknik Biomedik University Science et Technique du Langueodoc, Montpellier, Prancis. Berkat ketekunannya, oleh ITS dia diukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu Digital Control System dengan spesialisasi Sistem Reka-ya Biomedika pada tahun 2004.

Pria ini tidak banyak aktif di bidang politik, namun dia adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur, dan aktif di kegiatan sosial seperti Sekretaris Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, pengurus Yayasan

Rumah Sakit Islam Surabaya, dan Ketua Yayasan Pendidikan Al Islah Surabaya. Sebagai Menkoinfo, Nuh berambisi memadukan informasi dengan teknologi sehingga mampu menggerakkan pendidikan, ekonomi dan pemerintahan. Menerutnya informasi menjadi penentu utama di era globalisasi.

Jaksa Agung
Hendarman Supandji, SH (60 th)



Namanya makin banyak dikenal orang setelah menjadi Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak dibentuk Mei 2005 hingga selesai masa tugasnya, Timstapikor mengklaim telah menyelamatkan uang negara Rp 3,95 triliun dari tangan pelaku korupsi. Kini, alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1972) ini mempunyai segudang PR yang ditinggalkan oleh pendahulunya Abdul Rahman Saleh. Sebagai Jaksa Agung, Hendarman berjanji menuntaskan sejumlah kasus korupsi besar seperti kasus BLBI, VLCC Pertamina, PT Merpati Nusantara dan kasus pengadaan alat deteksi serta pencairan dana Tommy Soeharto yang diduga melibatkan mantan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Pria kelahiran Klaten, 6 Januari 1947 ini, sejak awal berkarier di kejaksaan. Ia pernah bertugas di Kejari Jakarta Pusat (1979-1981), Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung (1982-1983), Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok (1990-1995). Kemudian, Asisten Perdata dan TUN di Kejati Palembang (1996-1997), Staf khusus Jaksa Agung (1998), Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung (1998-2002), Jaksa tinggi di DIY dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan sebelum dipilih menjadi JAM Pidsus 25 April 2005 lalu (2002-2004).

Menteri Perhubungan
Ir Jusman Syafii Djamal (53 th)



Jusman yang pernah menjadi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, dan anggota Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi ini diangkat Presiden menggantikan posisi Hatta Rajasa sebagai Menteri Perhubungan. Pria kelahiran Langsa, Aceh Timur, 28 Juli 1954 ini adalah alumni Teknik Mesin Jurusan Penerbangan ITB tahun 1982 yang banyak berkecimpung di bidang pembuatan pesawat terbang. Menteri yang kini masih menjabat sebagai Chairman Matshusita Gobel Education Foundation ini menyatakan bahwa prioritas utamanya membenahi sektor perhubungan adalah *roadmap to zero accident*. Salah satunya adalah mengurangi tingkat anjlok kereta api.

Menteri Hukum dan HAM
Andi Mattalata (53 th)



Politisi yang juga salah satu ketua di DPP Partai Golkar dan kini menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini menggantikan rekan satu almarernya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan HAM. Pria kelahiran Bone, 30 September 1954 ini, menyelesaikan pendidikan S2-nya, juga bidang hukum di Universitas Indonesia. Mantan dosen FH Unhas yang dikenal sangat dekat dengan banyak politisi dari berbagai partai ini menyatakan akan memprioritaskan diri dalam usaha mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap keseriusan pemerintah membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. ■

Belajar Manajemen A



Syaykh mendampingi Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud dan rombongan meninjau infrastruktur pengelolaan air di Al-Zaytun.

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami siklus krisis air. Baik krisis air akibat kekeringan maupun krisis (bencana) air akibat banjir. Pengalaman terdekat, sejak pertengahan hingga akhir tahun 2006 bahkan sampai Januari 2007, berbagai wilayah Indonesia mengalami kekeringan (musim kemarau). Akibatnya banyak petani yang tidak bisa bercocok tanam (berakibat terjadinya krisis pangan). Kemudian sejak akhir Januari sampai April 2007, hujan turun dan terjadi bencana banjir di mana-mana. Anehnya, bangsa ini seperti tidak mau belajar dari pengalaman, dan secara berulang selalu terperosok ke lubang (krisis air) yang sama.

Air di Al-Zaytun



foto: berindo wilson

Belajar dari siklus krisis air itu, sangat berguna bila para pemimpin negeri ini berkenan menyempatkan waktu untuk memperhatikan manajemen pengelolaan air di Al-Zaytun. Sebuah pondok pesantren modern, yang lebih layak disebut kampus, seluas 1.200 hektar yang berada di Desa Sandrem, Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia.

Al-Zaytun, tentu juga mengalami siklus musim kemarau dan musim hujan yang sama dengan kawasan

sekitarnya. Kawasan kampus ini sebelumnya gersang, kekeringan pada musim kemarau. Maka sejak awal, Syaykh AS Panji Gumilang sebagai *grand design* pembangunan kampus terpadu (pendidikan dan ekonomi) ini, telah memadukan manajemen pembangunan infrastruktur pendidikan dengan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air secara efektif.

“Air adalah unsur penting untuk kehidupan,” tegas Syaykh Al-Zaytun Dr Abdussalam Panji Gumilang. Tanpa air dalam beberapa hari saja, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Namun,

jika tidak dikelola dengan baik, air bisa menimbulkan malapetaka (bencana) bagi kelangsungan hidup manusia, menjadi air bah yang menghancurkan semua yang dilintasinya. Maka sebagai manusia yang diberi hak dan kewajiban hidup di bumi, haruslah mampu memanfaatkan dan mengelola air dengan bijak dan cerdas.

Di pondok pesantren modern komprehensif (kampus) ini, kita bisa menyaksikan bagaimana air benar-benar dikelola sebagai unsur utama bagi kehidupan: dipanen, disimpan dalam ‘lambung air’ dan dimanfaatkan secara berulang. Di kompleks Al-Zaytun ini kita disadarkan agar memperlakukan air sebagai sesuatu yang sangat bernilai serta memanfaatkannya secara bijak dan terjaga dari pencemaran.

Namun demikian, pada musim kemarau 2006 hingga Januari 2007, Al-Zaytun juga masih hampir terkena krisis air, walau tidak separah kawasan sekitarnya. Halmana Al-Zaytun juga masih mengalami gangguan dalam memulai bercocok tanam hingga awal Januari 2007. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, krisis air seperti itu tidak lagi pernah dialami Al-Zaytun.

Syaykh menjelaskan siklus kekeringan seperti tahun 2006 itu pernah terjadi pada tahun 1970-an. “Menjelang Pemilihan Umum 1971, terjadi musim kemarau sampai tujuh bulan dan sekarang terjadi kembali di tahun 2006-2007. Kita bisa hitung sesuai putaran musim tahun 1971 sampai 2006 dinamakan selapan tahun. Perhitungan hari, orang Jawa sering menyebutnya dalam selapan hari, itu sama dengan 35 hari. Sloso wage ketemu Sloso wage lagi, itulah 35 hari. Hitungan tahun seperti ini perhitungannya 35 tahun namanya,” jelas Syaykh berdasarkan pengalaman dan catatannya.

Dari pengalaman itu, menurut Syaykh, mestinya bangsa Indonesia paham dan bangkit dari kejadian kekeringan itu. “Namun bangsa Indonesia belum pernah dapat belajar dari tunjuk ajar yang diberikan alam atau dalam bahasa teologinya yang diberikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan krisis air dan pangan yang berkepanjangan seperti ini tidak terjadi lagi tahun 2008,” harapnya.

Syaykh berharap para petani, minimal petani yang menggarap tanah 600 hektar sawah, sudah tidak berbicara lagi mengenai alam yang tidak ramah. “Yang sesungguhnya alam ini sangat ramah hanya manusia yang tidak menyadari,” kata Syaykh.

Maka belajar dari pengalaman itu, Syaykh Panji Gumilang, menegaskan pada tahun 2007 ini Al-Zaytun

Direncanakan, proyek infrastruktur pertanian dan pengairan Windu Kencana, sudah rampung pembangunannya 7 Agustus 2007, untuk kemudian diresmikan tepat pada 27 Agustus 2007, bertepatan ulang tahun sewindu Al-Zaytun. Itulah pula menjadi latarbelakang proyek ini diberi nama Windu Kencana, merupakan persembahan emas Al-Zaytun kepada bangsa ini.

memfokuskan pembangunan pada pembangunan yang sifatnya infrastruktur. "Pembangunan gedung asrama, pembelajaran dan lainnya belum diprioritaskan, tapi terfokuskan pada pembangunan yang berbentuk infrastruktur pertanian di antaranya infrastuktur air dan pengairan. Maka tahun ini fokus pembangunan di Al-Zaytun membangun yang vertikal berdiri kalau perlu membangun ke bawah, menggali," jelas Syaykh pada Dzikir Jum'at (07/01) sebagaimana dikutip dalam Jurnal Harian Al-Zaytun.

Pembangunan biasanya ditandai dengan pemancangan tiang pancang tapi sekarang membangun infrastuktur ditandai dengan berapa dalamnya simpanan air. "Itu yang sekarang kita bangun. Mudah-mudahan di tahun 2007 tertata sentra-sentra pangan khususnya sentra produksi lahan-lahan yang bisa ditanami. Kita akan konsolidasikan dan kita bangun cekungan-cekungan untuk menampung air ketika musim hujan, sehingga tahun 2008 kita bisa merasakan manfaatnya sehingga lahan yang kita siapkan pertanian tidak lagi menunggu curah hujan yang tidak terkendali," kata Syaykh.

Program ini pun sudah segera direalisasikan dengan membangun Waduk Windu Kencana dan normalisasi kali Cibenoang. Normalisasi Cibenoang dilakukan dengan membangun kanal sepanjang 13 kilometer dengan kedalaman lima meter dan lebar 20 meter ditambah bantaran kiri-kanan sungai masing-masing selebar 20 meter. Kanal itu membentang ke arah hulu dari Waduk Windu Kencana sampai Kampus Al-Zaytun sepanjang 6,5 kilometer dan ke arah hilir hingga menjangkau desa Ranca Ganggang juga sepanjang 6,5 kilometer. Kelak, normalisasi kali ini masih bisa diteruskan hingga sejauh 30 kilometer ke arah muara sungai di pantai utara laut Jawa. Direncanakan, proyek infrastruktur pertanian dan pengairan Windu Kencana, sudah rampung pembangunannya 7 Agustus

2007, untuk kemudian diresmikan tepat pada tanggal 27 Agustus 2007, bertepatan ulang tahun sewindu Al-Zaytun. Itulah pula menjadi latarbelakang proyek ini diberi nama Windu Kencana, merupakan persembahan emas Al-Zaytun kepada bangsa ini.

Di banyak tempat, termasuk di kawasan yang berdekatan dengan Al-Zaytun, musim hujan bisa menjadi bencana. Tetapi di Al-Zaytun, musim hujan selalu disambut sebagai musim panen air, yang didukung dengan teknologi (terapan) dan manajemen pemanfaatan air. Di lembaga pendidikan inilah pertama kali muncul istilah musim panen air dan teknologi panen air (hujan).

Terintegrasi

Pembangunan waduk Windu Kencana dan normalisasi sungai Cibenoang itu, merupakan satu kesatuan dengan teknologi dan manajemen air yang sudah ditata dengan baik di kawasan Kampus Al-Zaytun yang luasnya lebih 1.200 hektar yang dinamai proyek Tirtaraksa Candrakirana Bangsa. Dalam rangka manajemen pemanfaatan air di Al-Zaytun, lirik lagu *Bengawan Solo* gubahan Gesang Martohartono yang terkenal justru dianggap kontraproduktif. Lirik lagu itu berbunyi, "... musim kemarau, tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh ... air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut"

Di Al-Zaytun, air tidak dibiarkan mengalir begitu saja sampai jauh hingga akhirnya ke laut, tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Air dimanfaatkan secara berulang melalui suatu manajemen dan teknologi (proses) terencana yang matang.

Sehingga pada saat musim hujan, yang di banyak tempat air hujan melimpah menjadi ancaman banjir, justru dikelola sebagai berkah yang melimpah di Al-Zaytun. Musim hujan bahkan dimaknai sebagai musim panen air.



Waduk Istisqo di bagian utara Masjid Rahmatan Lil Alamin, Al-Zaytun

foto: berindo juka



foto: berindo wilson

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang meninjau pembangunan proyek Windu Kencana.

Maka setiap menjelang musim hujan, semua tempat dan makhluk di Al-Zaytun sudah dipersiapkan menyambut datangnya panen air itu. Selain telah disiapkan banyak resapan air (lumbung air) di setiap tempat dan gedung, juga tanaman terutama pepohonan dipersiapkan dengan menyiangi dahan dan ranting yang dianggap mengganggu pertumbuhannya. Sehingga manakala musim hujan tiba, pepohonan itu ikut panen air untuk pertumbuhannya secara baik dan terencana.

Lalu pada musim kemarau, air yang diserap dan disimpan dapat dikelola secara berulang. Bahkan, jika di tempat lain sudah terjadi kekeringan yang membuat tanaman mati, di Al-Zaytun justru bisa dibuat 'banjir buatan' yang membasahi seluruh area kampus dalam waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan melepas (mengalirkan) air dari tempat-tempat penampungan dan resapan (lumbung air) yang telah ditata sedemikian rupa.

Kebutuhan Air Bersih

Al-Zaytun, yang merupakan lembaga pendidikan berasrama (*boarding school*) di mana seluruh santri, ustadz, eksponen dan karyawannya tinggal secara penuh di dalam kampus, dengan total penghuni mencapai 12.500 jiwa dan akan terus bertambah sekitar 1.500 sampai 2.500 jiwa setiap tahun, tentu membutuhkan air bersih yang cukup banyak. Padahal kampus ini dibangun di atas lahan yang sebelumnya gersang, tadah hujan. Sehubungan dengan itu, sejak mula dikembangkan manajemen dan teknologi pemanfaatan air untuk mengantisipasi kebutuhan air tersebut. Bukan saja untuk keperluan langsung para penghuninya berupa air minum dan air bersih, juga untuk keperluan pertanian dan peternakan serta keperluan pembangunan yang terus berlangsung.

Diprediksikan keperluan air bersih rata-rata setiap penghuni Kampus Al-Zaytun minimal 150 liter per hari ditambah dengan keperluan pembangunan, pertanian dan peternakan, maka keperluan air bersih seluruh penghuni Al-Zaytun beserta seluruh aktivitasnya mencapai 4 juta liter per hari atau lebih dari 1,2 juta m³ per tahun.

Sehubungan dengan itu, di Al-Zaytun dilakukan penataan air berdasarkan sistem pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Suatu sistem pembangunan yang mampu untuk memenuhi keperluan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang.

Kampus Al-Zaytun berada di kawasan yang sebelumnya gersang dan tidak memiliki sungai atau mata air alam. Maka pengadaan air bersihnya hingga saat ini masih bergantung pada pengambilan air tanah dengan kedalaman 20 m hingga 100 m. Disadari, bila pemanfaatan air tanah itu berlebihan tentu akan menimbulkan ketidak-seimbangan yang pada akhirnya sampai pada titik *irreversible* atau kondisi kekurangan permanen yang tak lagi dapat diperbaharui.

Maka untuk mengantisipasinya, ditetapkan solusi yang tepat sejak dalam perencanaan pembangunan kampus ini ini. Syaykh menguraikan beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air tersebut.

Langkah pertama yang telah dilakukan adalah dengan mengimbangi penggunaan air tanah dengan cara membantu proses alamiah. Ketersediaan air tanah selalu diperbaharui dengan cara melakukan peresapan kembali air permukaan seperti air hujan dari atap bangunan (*run off water*), air kamar mandi dan air buangan melalui sistem instalasi pengolahan limbah ke dalam tanah

dengan membuat beberapa kolam, empang dan waduk penampungan air. Kolam dan empang itu, selain berfungsi sebagai resapan air, juga digunakan sebagai budidaya ikan.

Di Al-Zaytun telah dibangun empat buah kolam resapan yang masing-masing mampu menampung air sebanyak 38.400 meter kubik. Selain itu, dibuat 60 titik suntikan resapan air hujan dengan kedalaman pipa resapan hingga mencapai *aquifer* pertama di lapangan-lapangan dan halaman-halaman bangunan.

Demikian juga waduk dibangun untuk memanfaatkan kembali buangan air di asrama santri, *run off water* dan *over flow* kolam-kolam penampungan sehingga bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber air bagi pertanian. Tentu saja dengan menggunakan sistem penjernihan air alami dengan media saringan dan pemanfaatan tanaman-tanaman air yang mampu mengurai polutan organik di dalam air.

Waduk Istisqo (Shui Shi Cai = Air Sumber Kehidupan) di bagian utara Masjid Rahmatan lil Alamin, seluas 10.441 m² dan kedalaman 9 meter, mampu menampung air sebanyak 50.000 meter kubik. Jumlah itu cukup untuk mengairi areal pertanian dan perikanan seluas 30 ha. Selanjutnya, direncanakan pembangunan waduk pemanfaatan kembali air buangan untuk keperluan penghuninya bahkan hingga kualitas layak minum.

Langkah kedua adalah meningkatkan efisiensi pemakaian air tanah sebagai sumber air bersih. Di antaranya melalui penggunaan peralatan mandi, seperti *shower* dengan kepala *shower* yang dirancang hemat air dan bisa meminimalisasi pemborosan, kebocoran atau air terbuang. Sebab penggunaan air bersih terbesar di Al-Zaytun adalah untuk keperluan sehari-hari penghuninya, diperkirakan mencapai 2.711.500 liter air per hari.

Kepada para santri diingatkan untuk tidak lalai menutup kembali kran air atau *shower* yang menjadi penyebab utama pemborosan air. Hal ini ditangani oleh Manajemen Asrama dengan memanggil penghuni asrama yang krannya kedapatan terbuka. Mereka diberi teguran, nasihat, dan sanksi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Langkah ketiga dengan meminimalkan penggunaan air tanah dengan pemanfaatan kembali air yang sudah terpakai untuk keperluan pertanian dan peternakan, bahkan untuk digunakan kembali oleh penghuni MAZ. Untuk menyiram tanaman, sebagian besar menggunakan air dari kolam-kolam penampungan dengan

Untuk keperluan air minum sehat yang memenuhi persyaratan fisis, kimia dan biologi, digunakan sistem pengolahan air minum dengan teknologi Ozon dan Sterilisasi Ultra Violet (UV sterilization) serta teknologi Reverse Osmosis.

menggunakan jasa mobil tangki.

Begitu pula pembersihan sapi dan kandang, kecuali untuk pembersihan sapi perah, digunakan air dari kolam tampungan hujan atau air hasil olahan air limbah dengan sekecil mungkin menggunakan air tanah.

Pengolahan Air Limbah

Air limbah yang berasal dari limbah asrama dan gedung pembelajaran merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Karena air limbah ini mengandung senyawa-senyawa organik yang cukup tinggi. Selain itu, kemungkinan besar mengandung senyawa-senyawa lain serta mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Maka dalam hal studi pengelolaan lingkungan di Al-Zaytun khususnya sistem pengolahan limbah dijalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Air limbah toilet dan sebagian air buangan kamar mandi diolah pada pengolahan air limbah yang dibangun di setiap asrama dan gedung pembelajaran dengan sistem *biofilter aerob-anaerob* yakni proses pengolahan limbah biologis dengan menggunakan *mikroorganisme* baik *mikroorganisme aerob* (dengan udara) maupun *mikroorganisme anaerob* (tanpa udara). Proses biologis aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD (zat organik) yang sangat tinggi.

Syaykh Al-Zaytun menjelaskan, keduanya dibiakkan pada suatu media yang disebut 'sarang tawon' sehingga

mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media. Pengolahan limbah dengan metode ini mampu mengurangi polutan organik hingga 90-95 persen. Juga mampu menurunkan konsentrasi BOD di dalam air limbah hingga 20-30 mg per liter dan konsentrasi *Solid Solution* (SS) hingga 20 mg per liter pada sisi keluarannya.

Lebih rinci dijelaskan proses pengolahan air limbah tersebut sebagai berikut, "Air limpasan dari tangki septik dan air limbah nontilet dialirkan melalui satu saluran, selanjutnya dialirkan melalui saringan kasar (*bar screen*) untuk menyaring sampah yang berukuran besar seperti sampah daun, kertas, plastik, dan lain-lain. Setelah melalui *screen*, air limbah dialirkan ke bak pemisah pasir (*grit chamber*) yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran pasir, tanah, atau senyawa padatan yang tak dapat terurai secara biologis misalnya abu gosok, padatan pembersih kamar mandi dan lain-lain.

Setelah melalui *grit* bak pemisah pasir, air limbah dialirkan ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspensi. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, *sludge digestion* (pengurai lumpur) dan penampung lumpur. Air limpasan dari bak pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak kontaktor *anaerob* dengan arah aliran dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Di dalam bak kontaktor *anaerob* tersebut diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon.

Jumlah bak kontaktor *anaerob* terdiri dari dua buah ruangan. Penguraian zat-



Al-Zaytun tak pernah berhenti membangun infrastruktur pendidikan, pertanian dan pengairan.

foto-foto: berindo wilson

zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri *anaerobik* atau *facultatif aerobik*.

Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikroorganisme.

Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap.

Air limpasan dari bak kontak *anaerob* dialirkan ke bak kontak *aerob*. Di dalam bak kontak *aerob* ini diisi dengan media dari bahan kerikil, plastik tipe sarang tawon, sambil diaerasi atau dihisap dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media.

Dengan demikian air limbah akan kontak dengan mikroorganisme, yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, deterjen serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan amonia menjadi lebih besar. Proses ini sering dinamakan aerasi kontak (*contact aeration*).

Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur.

Sedangkan air limpasan (*over flow*) dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontak *khlor* ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses *anaerob* dan *aerob* tersebut selain dapat menurunkan zat organik (BOD, COD), amonia, deterjen, padatan tersuspensi (SS), fosfat dan lainnya.

Namun karena sebagian air limbah tidak melalui instalasi pengolahan limbah sehingga masih mengandung deterjen dari sabun maka dari saluran drainase limbah itu diarahkan ke kolam penampungan. Proses penjernihan air limbah tersebut selain mengandalkan panjangnya saluran drainase sehingga memungkinkan terjadinya singgungan dengan udara dan lumut-lumut saluran, pada kolam penampungan juga mengalami proses penjernihan dengan menggunakan bak-bak penjernih (*clarifier*).

Dari *clarifier* tersebut selanjutnya dibuat saluran mengelilingi kolam untuk kemudian dialirkan kembali ke dalam kolam melalui saluran berteras. Saluran



Teras sebuah kolam di Kampus Al-Zaytun

foto: berindo juka

berteras ini bermanfaat untuk menambah kadar oksigen. Di samping itu untuk memperkaya kadar oksigennya, kolam penampungan juga diberi fasilitas air mancur.

Sementara itu untuk pengolahan limbah kotoran ternak, dilakukan pemisahan antara limbah padat dan limbah cair pada bak penampungan kotoran. Selanjutnya limbah padat diolah menjadi pupuk kandang, sedangkan limbah cair dialirkan melalui drainase menuju kolam-kolam ikan.

“Apa yang telah dilakukan Al-Zaytun tadi, semuanya merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian dalam tata air bersih. Juga sebagai suatu bentuk usaha pencegahan (*precautionary principle*) terhadap kemungkinan terjadinya kondisi *irreversible*. Tak berhenti sampai di sana, Al-Zaytun akan terus mengembangkan berbagai upaya untuk memperbaiki tata air bersih itu,” kata Trista Nugraha menimpali Syaykh Al-Zaytun.

Air Minum Sehat

Pengasuh Al-Zaytun juga sangat memperhatikan ketersediaan air minum sehat bagi para santri dan segenap penghuni dan pengunjungnya. Untuk keperluan air minum sehat yang memenuhi persyaratan fisis, kimia dan biologi, dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan air minum dengan teknologi Ozon dan Sterilisasi Ultra Violet (*UV sterilization*) serta teknologi *Reverse Osmosis*.

Teknologi Ozon dan Sterilisasi Ultraviolet tersebut masing-masing berkapasitas 25 m3 per hari untuk keperluan rumah makan santri dan rumah makan karyawan. Sementara

teknologi *Reverse Osmosis* dengan kapasitas masing-masing 50 galon/hari (190 liter per hari), dipasang di satu unit di setiap kamar santri.

Ketiga teknologi tersebut dapat memenuhi hajat air minum puluhan ribu penghuni kampus yang memenuhi persyaratan (1) secara fisis harus jernih (tidak berwarna, tidak berbau, tidak keruh dan tidak berasa); (2) dari segi komposisi kimia, air tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, seperti limbah pestisida, limbah deterjen, nitrat, atau logam-logam berat; dan (3) secara biologis, air tidak boleh mengandung bakteri-bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Penggunaan ozon dalam proses pengolahan air dipilih, menurut Trista Nugraha, karena beberapa keuntungan yang diperolehnya. Selain mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam air karena ozon bersifat bakterisida, algasida dan fungisida, teknik itu juga tidak menimbulkan bau dan rasa yang pada umumnya terjadi jika kita menggunakan bahan kimia pengolahan air. Bahkan, teknik ini dapat menghilangkan bau dan rasa yang biasanya disebabkan oleh komponen organik dan anorganik yang terdapat di dalam air.

Pasca survei dan uji fisika, kimia dan biologi di Laboratorium Teknik Lingkungan, kualitas air minum di rumah makan santri dan rumah makan karyawan yang menggunakan teknologi ozon dan *UV Sterilization* dinyatakan memenuhi standar kualitas air minum yang merujuk kepada standar Departemen Kesehatan. ■ MS-MLP

Azyumardi Azra

Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesra

Karir tokoh intelektual Islam ini mengalir begitu saja seperti air. Ia menyebutnya sebagai hal yang kebetulan.

Ketika IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1998 mengangkatnya menjadi Pembantu Rektor (Purek) I Bidang Akademik, ia tak kuasa untuk menolak sebab merasa berhutang budi kepada kampus yang sudah membesarkannya. Penunjukkan itu dianggapnya sebagai “musibah”. Meskipun begitu, rekan sejawatnya tetap menganggap *urang awak* ini bakal tak juga menolak jika diplot menjadi rektor.

Maka jadilah pada tahun itu pula, 14 Oktober 1998, doktor, pakar sejarah Islam, dan ahli nilai-nilai hidup Nabi Muhammad SAW lulusan Columbia University, AS ini diangkat menjadi rektor. Padahal, penulis produktif ini tidak menyukai birokrasi, termasuk tak menyukai pakaian safari yang kerap menjadi simbol manajemen pemerintahan yang birokratis. Ayah empat orang anak ini menyebutkan, birokrasi yang serba struktural tak cocok di lingkungan kampus.

Tetapi selama dua periode (1998-2006) memimpin sebagai rektor, terutama sejak memasuki periode kedua, sejumlah lapangan luar biasa berhasil ditorehkan suami dari Ipah Fariha ini. Seperti, IAIN sejak Mei 2002 berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta; membuka berbagai fakultas dan jurusan baru seperti fakultas sains, ekonomi, teknik, MIPA, komunikasi, dan kedokteran; menerima mahasiswa baru melalui jalur SPMB; dan membangun kerjasama secara terbuka dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.

Kerjasama itulah yang memungkinkan UIN Jakarta, yang telah berhasil menghilangkan dikotomi antara disiplin ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, membangun kampus yang sama sekali baru. Bahkan kampus yang terletak di kawasan Ciputat dengan 17 ribuan mahasiswa ini terlihat lebih mentereng. Bahkan Kampus ini sudah pula siap-siap beralih status menjadi perguruan tinggi berbadan hukum milik negara (BHMN), termasuk memiliki rumah sakit praktek.

Ketika UIN Jakarta sudah memilih rektor baru sebagai penggantinya, jawaban yang senada ia berikan kepada wartawan Berita Indonesia ketika berlangsung

Musyawarah Nasional Ikatan Alumni UIN Jakarta (IKALUIN), November 2006 di Istana Wakil Presiden. Ketika itu, kepada pria yang gencar mewacanakan pemikiran tentang Indonesia, Pembangunan, dan Islam, ini ditanyakan akan ke mana selanjutnya melangkah selepas menjadi rektor. Lulusan Fakultas Tarbiyah, UIN Jakarta (1982) itu kontan menjawab, karirnya akan mengalir begitu saja seperti air.

Penyuka jogging dan menonton pertandingan sepakbola ini masih mengelak menjawab saat ditanya perihalnya kemungkinan akan ditempatkan menjadi pejabat yang lebih tinggi, seperti di lingkungan Istana Wakil Presiden. Sebab pembukaan Munas IKALUIN untuk pertamakalinya berlangsung di Istana dan dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. Munas saat itu secara aklamasi berhasil memilih kembali Syaykh AS Panji Gumilang, yang juga pemimpin pondok pesantren modern Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat sebagai Ketua Umum IKALUIN untuk periode kedua 2006-2010.

Pemilik nama yang memiliki makna “permata hijau” ini akhirnya seolah bertukar tempat saja dengan penggantinya, Komaruddin Hidayat, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UIN Jakarta. Hingga kemudian tersiarlah kabar kecil di berbagai media massa, bahwa mantan wartawan majalah *Panji Masyarakat* (1979-1985) ini sudah dilantik menjadi Deputi Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Bidang Kesejahteraan Rakyat, oleh Jusuf Kalla, di Istana Wapres Kamis (26/4). Ia menggantikan Yusuf Asry yang memasuki masa pensiun.

Dosen tamu di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia itu sudah dekat ke poros kekuasaan, sesuatu yang memang sangat pantas disandang oleh mantan rektor yang sudah meluluskan ribuan manusia berkualitas yang berpikiran rasional, modern, demokratis, dan toleran sesuai ciri UIN Jakarta. Dunia kampus yang identik dengan kejujuran, dan keilmuan, tentu berbeda dengan poros kekuasaan yang sarat dengan permainan politik walau mantan aktivis ini ditempatkan di pos peningkatan kesejahteraan rakyat. Wapres Muhammad Jusuf Kalla pun, saat itu mengatakan



foto: berindo wilson

bahwa ia bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Wapres serta pelaksanaan tugas Presiden.

“Ini tugas baru yang cukup berat bagi saya. Seperti pesan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, tugas yang menuntut berpikir cepat, bertindak cepat dan memantau dengan cermat berbagai agenda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Azyumardi menjawab pertanyaan *Berita Indonesia*. Tetapi bagaimana menerjemahkan pesan Wapres tersebut, dan apa saja program-programnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Azyumardi belum mau berkomentar terlalu jauh. “Kalau itu belum dapat saya jawab. Saya harus lihat dulu apa yang ada,” ujarnya.

Selain akan bergelut meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai Deputi Seswapres, pemikir pembaharuan Islam ini boleh saja melanjutkan kembali idenya mendirikan pondok pesantren modern di Palu, atau Poso, Sulawesi Tengah sebagai salah satu solusi permanen menciptakan perdamaian di daerah konflik tersebut. Ide ini sebelumnya pernah ia lontarkan tatkala beraudiensi dengan Wapres Jusuf Kalla, pria berdarah bugis yang juga dikenal sebagai tokoh perdamaian Malino. Jika Azyumardi sudah berhasil mewujudkan sejumlah besar mimpinya membangun UIN Jakarta, bukan mustahil kisah sukses yang sama ia raih di Istana. ■ HT

Permendagri No. 13/2006

Administrasi Keuangan Pemda Purwakarta Lebih Tertib

Setelah Permendagri No. 13 Tahun 2006 digulirkan, mulai Januari 2007 pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib dan menutup peluang terjadinya penyelewengan. Proses birokrasi menjadi lebih lancar, cepat serta tanggung jawab penggunaan anggaran jelas.

Sekarang ini, dalam pencairan anggaran, dokumen harus benar-benar lengkap. Konsekuensinya, sejumlah instansi mengalami keterlambatan pencairan anggaran. Beberapa persyaratan yang sering menjadi problem antara lain pengadaan obat-obatan di rumah sakit. Jika mengacu kepada sistem yang baru, berarti ini harus melalui mekanisme lelang. Demikian juga pencairan dana perjalanan dinas, pembayaran honor dan insentif guru di sekolah, harus dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan.

Kadis Pendidikan, Kab. Purwakarta, Ir. Drs. H. Didin Sahidin Nj Sp M.Sp mengakui sistem administrasi yang baru ini memang agak rumit dan sering menimbulkan kelambatan proses di lapangan. Pencairan dana Biaya Operasi Sekolah juga mengalami keterlambatan. Bahkan ada ang-

garan yang tak dapat diusulkan pencairannya karena kendala format yang tersedia termasuk di lingkungan sekolah.

Proses pencairan dana sekarang ini sangat tergantung kemampuan pengguna anggaran melengkapi dokumen dan prosedur. Pembayaran terealisasi hanya jika dokumen telah lengkap. Cepat-lambatnya pencairan dana yang dituangkan dalam APBD terutama anggaran rutin instansi pemerintah seperti biaya ATK, transport, honor dan insentif pegawai, listrik, telepon sangat tergantung atas baik buruknya penataan usaha anggaran. Kabag. Keuangan, Drs. Moch. Irsyad Nasution Ak. MM, mengatakan pentingnya ketelitian dalam administrasi keuangan. Dan ini mengharuskan pihaknya bekerja ekstra keras demi kelancaran pengajuan penggunaan anggaran.

M. Irsyad menguraikan, sis-



Ir. Drs. H. Didin Sahidin Nj Sp M.Sp

tem ini menitikberatkan pada kecermatan dan ketelitian dalam bekerja. Secara umum UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 bertumpu pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Seperti diatur PP No. 58 Tahun 2005, yang secara teknis diperinci melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dengan adanya Permendagri ini, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan oleh satuan pekerja perangkat daerah (SKPD), harus memiliki interaksi, landasan hukum, kejelasan sumber dan manfaat yang harus dapat diukur serta melakukan administrasi lebih praktis dengan mengatur fung-



Drs. M. Irsyad Nasution Ak. MM

si perbendaharaan dan pelaporan keuangan terpusat SKPD.

Sistem ini tandas M. Irsyad sangat tepat namun dalam prosesnya harus didukung sumber daya manusia yang cakap dan berkemampuan. Mereka harus mampu mampu dan teliti menerjemahkan dokumen secara lengkap. Dengan demikian, hanya dokumen yang lengkap sajalah yang akan lolos verifikasi keuangan yang menjamin tepatnya jalur pembayaran.

Pengguna anggaran dituntut bekerja profesional agar pencairan dana dapat direalisasi secara tepat waktu, katanya. ■ BND, SBR

Angkot Purwakarta Minta Rute Bis Karyawan Ditertibkan

Drs. H. Dudung Bachtiar Supardi MM, Sekda Kab. Purwakarta termasuk figur pejabat yang merakyat dan sangat peduli terhadap nasib orang kecil. Di tengah aksi pemogokan yang melumpuhkan transportasi Purwakarta belum lama ini, Dudung bersedia menampung keluhan para awak angkot.

Ratusan awak angkot di Purwakarta mendesak Pemkab mengkaji ulang izin trayek tiap jalur agar seimbang dengan jumlah armada angkutan yang ada.

Selain itu, menurut Ade Domba, Plh Ketua Persatuan Angkutan Daerah (Persada), bus angkutan karyawan secara rutin masuk lingkungan pemukiman penduduk klasifikasi jalan sempit. Hal ini sangat merugikan angkutan kota,

karena intensitasnya cukup tinggi seperti yang terjadi di sekitar Jalan Ipik Gandamanah.

Ini perlu dipertimbangkan, katanya. Karena selain memacetkan lalu lintas juga memengaruhi penghasilan awak angkot. Perlu juga disadari banyak bus angkutan karyawan sebenarnya hanya memiliki izin sebagai angkutan rutin karyawan perusahaan.

Dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten, Dudung yang didampingi Kadis Perhubungan Drs. Idhar P Kusuma MM, dan Humas Hj. Nina Meinawati SH dan pengurus Organda setempat mengajak awak angkot duduk bersama merumuskan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dudung yang dikenal sebagai pribadi yang selalu berusaha agar bermanfaat bagi orang lain itu

menyatakan sangat memahami keluhan para supir angkot tersebut. Peran awak angkot tidak boleh diabaikan, namun juga harus disinergikan dengan perusahaan jasa angkutan serta industri pengguna jasa," katanya.

Tentang penertiban perizinan, ia menjelaskan bahwa itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemkab, untuk mengawasi serta melakukan pengkajian sesuai perkembangan dan kemajuan pembangunan. Tapi pelanggaran seperti yang diharapkan para awak angkot harus sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi awak angkot tidak perlu risau," ujar Sekda yang mengaku berasal dari keluarga berpendapatan rendah itu. ■ BND, SBR

Mengenaskan, Nasib Ribuan Buruh Perusahaan Udang di Kaltim

Ratusan karyawan perusahaan udang mendatangi gedung DPRD Tarakan. Mereka menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan seperti ditetapkan UU. Ironisnya, pihak perusahaan tak ambil pusing.

Nasib ribuan buruh perusahaan udang tidaklah cerah harga komoditi itu sendiri. Bahkan, ribuan karyawan yang bergelut setiap hari dengan *si raja bongkok* itu cenderung dieksploitasi. Mereka yang menggantungkan hidupnya di perusahaan *Cold storage* udang di Kota Tarakan Kalimantan Timur seperti tak berdaya menghadapi perlakuan pemilik perusahaan yang rata-rata warganegara asing itu.

Di lingkungan PT Bonanza Pratama Abadi (BPA) Juata Laut, Tarakan Utara, misalnya. Upah karyawan masih jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. "Gaji saya hanya Rp 600 ribu per bulan, tanpa lembur. Dan kalau tidak masuk kerja, karena sakit misalnya, gaji langsung dipotong. Sementara perusahaan hanya menanggung uang pengobatan sebesar lima puluh persen," keluh Dahlia, bukan nama sebenarnya, kepada *Berita Indonesia* di Tarakan, akhir pekan lalu.

Sedangkan para pekerja harian *Cold storage* milik Mr Tiung Cina Serawak, Malaysia Timur ini, hanya Rp 31.000 per-hari. Itu pun tidak bisa bekerja penuh dalam sebulan, karena setiap dua minggu kerja, dipotong lagi *day off* selama tiga hari. Belum lagi jika produksi udang sedikit atau kosong, mereka dipulangkan—dan sudah pasti tanpa upah. Begitu pula lembur, apakah itu hari Minggu, libur resmi, atau hari raya, semuanya sama. Kerja lembur hanya dihargai dengan upah

Rp.4.650 per jam

Sadis, memang. Tapi faktanya demikian. Ironisnya, tidak ada yang berani berkutik. Soalnya, seperti sudah lama ditegangnai, pemilik saham perusahaan *cold storage* juga dimiliki sejumlah oknum pejabat setempat. Orang pun tak habis pikir mengapa perusahaan begitu berani mengebiri hak-hak karyawan, memperlakukan jam kerja yang tidak manusiawi, mempekerjakan anak-anak usia sekolah serta mengesampingkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. "Jika bukan ada *power* di belakang, mana mungkin mereka berani," papar Mama Engko (bukan nama sebenarnya).

Bukan berarti karyawan pasrah menerima tindakan perusahaan yang semula mempunyai ijin pengalengan ikan ini. Lewat pembentukan Serikat Pekerja, upaya ke arah perbaikan nasib sudah pernah dilakukan. Namun upaya ini gagal bahkan semua pengurusnya diberhentikan dengan berbagai alasan. Begitu juga dengan pekerja jam-jaman dan borongan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari karyawan bulanan dan harian. "Kalau kami tanya berapa penghasilan, kami langsung dipecat. Sudah, kau gak usah turun kerja besok, masih banyak orang yang membutuhkan kerja," ungkap beberapa pekerja borongan, menirukan ucapan pihak perusahaan.

Pihak perusahaan PT Bonanza Pratama Abadi Tarakan, ketika hendak dikonfirmasi, menolak kehadiran *Berita Indonesia* di lokasi berpagar tinggi ini. "Mr Tiung lagi di Kucing Serawak. Sementara



Karyawan unjuk rasa ke DPRD. Silakan, itu hak buruh ke manapun mengadu.

General Manager, Mr Aping lagi mengantarkan anaknya ke Malaysia. Sedang Supervisor Mr Fong Yu Cheng dan lainnya lagi sibuk kerja, tidak bisa diganggu. Kalau hanya masalah karyawan silahkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Tarakan, ini perintah pimpinan," hadang anggota *Security* di pos pintu masuk.

Niat Serikat Buruh untuk memperjuangkan hak para karyawan, bukannya tidak dicoba. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Niaga Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (NIKEUBA SBSI) Tarakan, contohnya; telah berupaya mendampingi karyawan PT Malindo Kencana Utama (MKU) Tarakan untuk membicarakan hak-hak buruh dengan pihak Manajemen PT MKU Tarakan. Ada beberapa tuntutan karyawan yang selama ini diabaikan perusahaan seperti: Perjanjian kerja; Jam-sostek; kenaikan upah; kebebasan berserikat. Hak pensiun bagi karyawan yang sudah mencapai usia 55 tahun; Men-taati Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah termasuk memberlakukan standar upah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur

Kaltim.

Pimpinan PT MKU Tarakan, lewat Kepala Personalianya, Susan, tengah-tengah saja menghadapi gugatan ini. "Silakan saja, kemana pun mengadu itu hak mereka," katanya seperti dikutip seorang karyawan setelah wartawan media ini dua kali gagal menemui pimpinan perusahaan di kantornya yang terletak di Jl. Yos Sudarso Lingkas, Tarakan Timur.

"Sikap PT MKU itu sudah mendiskreditkan SBSI yang mewakili karyawan," kata Aslin AL Sekeretaris DPC SBSI Tarakan. Dikatakan, semua langkah yang ditempuh karyawan perusahaan *Cold Storage* udang itu kandas di tengah jalan. Mulai pertemuan *be-partite*, dilanjutkan dengan *tripartite* yang ditengahi Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, tidak membuahkan hasil. "Itu sebab," lanjut Aslin, pihaknya bersama ratusan karyawan PT MKU mendatangi gedung DPRD Tarakan untuk mengadukan nasib mereka kepada para wakil rakyat itu, pekan lalu. Hasilnya? "Tetap saja, tak ada perubahan. Mau apa lagi, kita tunggu lah apa putusan anjuran Disnaker Tarakan," katanya. ■ WI/SLP



foto: dok. humas pemda bulungan

Dorong: Perahu Motor Bupati Bulungan, terjebak dalam lumpur di dalam sungai, ketika pasang surut.

Layak Hidup Belum Cukup

Upaya mengatasi ketertinggalan, Pemda Bulungan membebaskan biaya pendidikan dari SD hingga SLTA. Pemda juga memberi beasiswa kepada yang mengambil kejuruan. Tinggal menunggu kemauan masyarakat.

Syahdan, di siang hari bolong, pertengahan Maret lalu. Puluhan orang tampak sibuk mendorong perahu motor di pinggir sungai Desa Tengku Dacin, Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Bulungan. Mereka berusaha sekuat tenaga mendorong badan perahu yang terjebak dalam lumpur. "Air keburu surut. Kalau harus menunggu air pasang naik, kita bisa kemalaman dalam perjalanan," teriak seorang laki-laki berotot tegap, sambil memberi komando mendorong badan perahu ke tengah dasar sungai.

Terjebak dalam lumpur, mengarungi giram, arus sungai deras berbatu-batu, serta menyusuri sungai pada malam hari, agaknya sudah merupakan bagian dari kehidupan Drs H Budiman Arifin, MSi Bupati Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, dalam menjalankan pemerintahannya.

"Itu, sudah termasuk dari komitmen pengabdian saya, mengunjungi satu persatu desa. Bagaimana aku bisa dikatakan bupati kalau tidak mengenal dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat saya," ujarnya kepada wartawan sesui mengunjungi Desa Long Pelban, Kecamatan Peso.

Perjalanan melelahkan, penuh dengan bahaya, karena hampir seluruh desa di Kabupaten Induk Wilayah Utara Kaltim itu, dijangkau dengan transportasi air. "Beliau (Budiman Arifin, Red) kalau bertindak, maunya serba cepat. Beliau senang berkunjung ke desa karena bisa mendengar dan melihat langsung apa kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu lama," kata Drs Yahdian Noor, kepada *Berita Indonesia*.

Kabag Humas Pemda Kabupaten Bulungan ini mencontohkan, ketika Bupati mengunjungi Desa Long Pelban, Ke-

camatan Peso beberapa waktu lalu. Warga di desa paling hulu di pinggir Sungai Kayan, Bulungan ini, berharap agar Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dapat tetap dipertahankan. "Kami mohon program ini dapat dipertahankan karena kami bisa merasakan manfaatnya," kata Yahdian Noor, mengutip ucapan Jalung, mewakili masyarakat.

Ada suatu kiat pasangan Bupati Bulungan, Drs H Budiman Arifin, MSi dan Wakilnya Drs Liet Ingai, MSi, yang mengatakan: Masyarakat akan sejahtera kalau ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) dan manusia itu sendiri tidak akan bisa bersumber daya (pintar) jika tidak memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

Itu sebab, kata Yahdian Noor, program Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan, salah satunya membebaskan biaya pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta memberi beasiswa kepada masyarakat yang mengambil pendidikan kejuruan ke luar daerah, seperti pendidikan kesehatan, pertanian dan perikanan. Sementara yang kedua, untuk kesehatan masyarakat dilakukan lewat peningkatan pelayanan kesehatan secara bertahap melalui penambahan tenaga dokter, paramedis, dan Puskesmas di seluruh kecamatan.

Ternyata, program kedua pasangan putera asli Bulungan-Kenya ini tidak bisa diremehkan. Lihat saja penegasannya terhadap Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di sela-sela pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) di Kantor Bupati pertengahan Maret lalu. "Tugas dan tanggung jawab PPL adalah membina petani. PPL wajib mengabdikan diri membantu dan menciptakan SDM para petani di desa bukan menumpuk di kota. PPL, adalah ujung tombak pertanian. Berdosa dan salah besar, jika PPL lebih banyak di kota, sementara petani di desa sangat membutuhkan pem-

binaan," tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perternakan Bulungan pun, tak luput dari sorotan Budiman Arifin. "Jika tenaga PPL kurang, upayakan merekrut tenaga dari lulusan sarjana-sarjana pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya sesuai bidang yang dibutuhkan," katanya. Sebab, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak dibarengi SDM Pengairan atau irigasi. Sudah ada *hand tractor*, dan bermacam bantuan sudah dibagikan. Yang belum, tinggal bagaimana mengolah tanah, menggunakan peralatan dan memberdayakan petani. Sebab, layak hidup saja belum cukup, tarap hidup masyarakat perlu ditingkatkan," katanya

Secara menyeluruh, menurut Datu Abduh, pengamat pembangunan Kabupaten Bulungan, apa yang telah dilakukan pasangan Budiman-Liet Ingai, tidak sekadar slogan. Ini, katanya, terbukti dari pengakuan Bupati Berau, Drs H Makmur, HAPK MM yang datang berkunjung ke Tanjung Selor, akhir Maret lalu.

Barangkali, itu dilakukan setelah Komisi III Bidang Kesejahteraan, Pembangunan, dan Kesejahteraan, DPRD Berau, melakukan studi banding atas keberhasilan program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bulungan. "Kalau memungkinkan, janganlah hanya pendidikan yang dibebaskan biaya, juga kesehatan. Seperti perawatan di rumah sakit, Puskesmas dan obat-obatan," kata Datu Abduh, memberi saran

Tentu saja, studi banding para wakil rakyat dan kekaguman Bupati Berau itu, lanjutnya harus dijadikan cambuk dalam memacu pembangunan di Kabupaten IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai, Asri, dan Harmonis) itu. Apalagi sebagai kabupaten induk untuk daerah-daerah yang ada di Wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur, harus bisa menjadi contoh. "Daripada studi banding ke luar Kaltim, mengapa tidak ke Tanjung Selor saja," kata mantan DPRD dua periode berturut-turut ini. ■ SLP

HM Ali Umri, SH, MKn

Figur Unggulan Memimpin Sumut

Figur HM Ali Umri, SH, MKn kini menjadi perbincangan hangat berbagai elemen masyarakat. Dia dinilai paling tepat memimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan. Usianya masih muda, enerjik, berpendidikan dan sarat pengalaman.



Bursa bakal calon (balon) gubernur di Sumatera Utara menjelang Pilkada Gubsu, meski fase waktunya masih lebih setahun lagi (Juni 2008), mulai memanaskan. Sejumlah nama kini mulai mencuat ke permukaan, menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sementara berbagai perhelatan mengarah pendekatan mencari dukungan rakyat calon pemilih semakin gencar dilakukan.

Dari sejumlah figur balon Gubsu periode 2008/2013, yang kini menjadi perbincangan hangat termasuk di kalangan politisi, akademisi dan ekonom, adalah HM Ali Umri, SH, MKn, Walikota Binjai dua periode (periode pertama dipilih DPRD dan periode kedua dipilih langsung rakyat), Ketua DPD Golkar Sumut, dan pemimpin sejumlah organisasi kemasya-

rakan serta beberapa organisasi profesi dan akademik itu, dinilai sangat kapabel dan pas memimpin pemerintahan Provinsi Sumut lima tahun ke depan.

Penilaian terhadap Ali Umri itu didasarkan pada berbagai kriteria, seperti usia masih muda (lahir 9 April 1966), enerjik, bergelar master (S-2), berpengalaman di pemerintahan sebagai walikota dua periode, memahami politik dibuktikan dengan amanah kepercayaan memimpin Golkar Sumut, partai terbesar di negeri ini. Juga berpengalaman di lembaga legislatif, bahkan pernah menjadi ketua fraksi DPRD Binjai sebelum terpilih menjadi walikota. Selain itu, sarat pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan, profesi, akademik dan lainnya serta berhasil meraih puluhan penghargaan.

Dari berbagai kriteria yang menjadi ha-

rapan masyarakat untuk membangun Sumatera Utara lima tahun ke depan, Umri dinilai pas dan memiliki kredit poin plus dibanding dengan figur-figur balon lainnya. Apalagi dikaitkan dengan masalah hukum dan pertanahan yang selama ini di Sumut dinilai sangat kompleks, rakyat membutuhkan seorang figur pemimpin yang memahaminya. Artinya, tidak hanya sebatas pemahaman, tapi harus dibarengi dengan kualitas dan kemampuan aplikasi. Dibuktikan dengan pendidikan yang benar dan sah, bukan hanya sekadar pernyataan atau pendidikan ekstension.

Kriteria sebagaimana harapan masyarakat itu, Umri agaknya menjadi pilihan unggulan dibandingkan dengan balon-balon lainnya yang kini namanya muncul ke permukaan. Selain berpredikat sarjana hukum, dia juga bergelar master di bidang kenotariatan lulusan Universitas Sumatera Utara, universitas paling bergengsi di Sumut.

Dukungan Membludak

Tak mengherankan, jika berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang kehidupan sosial, pendidikan, suku, agama, dari kota sampai ke pelosok desa, selalu membludak menyambut kedatangan Umri ke berbagai daerah dan berikrar mendaulatnya untuk dipilih menjadi Gubernur Sumut.

“Apa lagi yang harus dipikirkan, calon Gubsu sudah ada orang yang pas, muda, berpendidikan, pengalamannya di pemerintahan juga di DPRD sudah banyak. Begitu juga berorganisasi di masyarakat dan lainnya. Apalagi Bapak Ali Umri kini memimpin Partai Golkar Sumut. Tidak perlu lagi kita susah memikirkan siapa calon, sudah sangat pas itu Bapak Ali Umri. Saya pikir, pendapat saya ini sama dengan kawan-kawan yang lain, Bapak Ali Umri sudah sangat pas dan tepat untuk kita pilih,” ucap seorang tokoh masyarakat di Padangsidempuan, Tapanuli Selatan (Tapsel) yang dikenal sebagai Raja Marga Harahap.

Ungkapan Raja Marga Harahap dari Padangsidempuan itu dibuktikan dengan membludaknya dukungan masyarakat tidak hanya dari warga Golkar tapi juga tokoh masyarakat, pemuda, alim ulama yang mendaulatnya sebagai calon Gubsu lewat ikrar kesepakatan seperti di Padang Bolak, Gunung Tua, Tapanuli Selatan. Di tanah leluhur Deputi Menkopolkam, H Chairuman Harahap, SH, MH ini, Umri mendapat dukungan “luar biasa” dari tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda



dan para hato-bangun (pengetua) seperti H Syamsi Harahap mantan Ketua DPRD Medan. Begitu juga di Labuhan Batu, selain dukungan masyarakat, tidak kurang dari tujuh kiai karismatik di kabupaten ini berikrar mendukung dan mendukungnya agar terpilih dalam Pilgubsu mendatang. Sementara di kalangan tertinggi Golkar di daerah-daerah, kabupaten/kota juga solid dan selalu berikrar tanpa *reserve* untuk mendukung pencalonan Umri dan berjanji akan menangkannya pada Pilkada gubsu nanti.

Aset Kebanggaan

Disadari atau tidak, seperti diungkapkan sejumlah tokoh partai Golkar, sesungguhnya Ali Umri kelahiran Rantauprapat 40 tahun lalu, anak pasangan H Syaiful Bahri kelahiran Rantaupanjang Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan almarhum Hj Siti Maliah Hasibuan kelahiran Binjai asal Saba Jior, Mandailing Natal ini adalah aset yang sangat potensial dan merupakan kebanggaan partai. Umri dinilai sangat pantas dan pas, dicalonkan menjadi Gubsu pada Pilkada mendatang.

Seperti diungkapkan, Riza Fachrumi Taher, salah seorang pengurus harian Partai Golkar Sumut: "Umri itu aset yang patut dibanggakan. Memiliki nilai plus tidak hanya bagi partai Golkar, tapi juga bagi masyarakat Sumatera Utara. Didasari, penilaian itulah agaknya, dalam Rapimda (Rapat Pimpinan) Partai Golkar beberapa waktu lalu di Medan, Umri diadai secara aklamasi untuk dicalonkan menjadi Gubsu."

"Kalau ada kader, apalagi pengurus par-

tai "membelot" dan mengabaikan komitmen kesepakatan Rapimda itu, saya pikir sama artinya dengan "pengkhianatan". Apa wajar sebagai kader, mendukung calon lain, sementara ketua partai sendiri dari segala aspek memenuhi kriteria persyaratan, bahkan memiliki nilai plus dari balon-balon lain," tegas Riza menanggapi kemungkinan balon lain diusung partainya.

Riza yakin partainya konsisten dengan kesepakatan Rapimda itu, tidak akan ada konvensi lagi untuk penjurangan balon. Hanya tinggal menunggu waktu hari "H" penetapan. Dia juga yakin DPP Partai Golkar akan mendukung komitmen Rapimda itu. Dia yakin DPP tidak akan mengintervensi tatanan yang sudah disepakati daerah. Andaikan DPP melakukan pemaksaan di luar kesepakatan itu, eksekusinya akan sangat berdampak fatal terhadap keberadaan partai itu dalam Pemilu 2009. Karena itu saya yakin, DPP tidak akan melakukan intervensi merubah kesepakatan itu," tegasnya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H Syahrul Pasaribu, SH. "Calon Golkar sudah jelas, Ali Umri. Apalagi yang harus dibahas," katanya dalam percakapan saat berlangsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumatera Utara 2007 di Bina Graha Medan.

Terkait dukungan yang terus membludak dari berbagai daerah dan elemen masyarakat, tak urung memang berbagai upaya dari pihak tertentu berusaha menjegalnya. Itulah sebabnya dalam berbagai kunjungannya ke daerah, dia ter-

lihat tetap bersahaja. Umri lebih cenderung terus mengevaluasi, apakah dukungan itu benar-benar murni atau hanya sekadar *lip service*, sebelum menyatakan diri siap dicalonkan atau mencalonkan diri.

Bersikap Kenegarawanan

Sikap Umri itu agaknya menunjukkan dia seorang pemimpin besar dan berjiwa kenegarawanan, lebih mengutamakan keutuhan persatuan dan kesatuan masyarakat ketimbang mengutamakan kepentingan pribadi meski pun sesungguhnya hal itu pantas dan wajar diraihinya.

Boleh jadi, sikap itu menurun dari ayahandanya, H. Syaiful Bahri yang selalu mengajarkan kesadaran tanpa pemaksaan kehendak untuk mencapai tujuan. Selain itu, sifat orang-orang yang lahir di bawah zodiak Aries apalagi tepat tanggal "9" seperti Umri, memiliki kepribadian yang khas. Tegar, keras tapi berjiwa seni, enerjik, familiar, inovatif, percaya diri, tidak pendendam dan selalu siap berkorban untuk siapa saja. Sikap itu sejak kecil seperti dikemukakan sejumlah kerabat yang mengenalnya, diakui sangat melekat dalam diri Umri sampai sekarang. ■ AEP

BIODATA

Nama:
HM Ali Umri, SH, SpN, MKn

Lahir:
Rantauprapat, 9 April 1966

Agama:
Islam

Pendidikan terakhir:
Magister Kenotariatan, USU-2004

Jabatan:

- Walikota Binjai

- Ketua DPD Tk I Partai Golkar Sumut Karir:

1. Ketua DPD AMPI Binjai (1993-1999)
2. Sekretaris MPI KNPI Binjai (1997-2001)
3. Sekretaris Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Binjai (1999-2004)
4. Bendahara MABMI Binjai (1999-2004)
5. Ketua GAPENSI Langkat (1996-2000)
6. Wakil Ketua KADIN Langkat (1997-2002)
7. Ketua ARDIN Langkat (1995-1999)
8. Ketua HIPPI Binjai (1994-1999)
9. Wk. Ketua DPD Golkar Binjai (1998-2003)
10. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Binjai (1999)
11. Walikota Binjai (2000-2005)
12. Ketua DPD Golkar Binjai (2004)
13. Walikota Binjai periode kedua (2005-2010)
14. Ketua DPD Partai Golkar Sumut (2004-2009)
15. Ketua IKA-MKN Sumut (2005)
16. Ketua GAMI Sumut (2005)
17. Ketua Forum Komunikasi Kenotariatan Indonesia (2007)
18. Ketua Dewan Penasehat Al Ittihadiah Sumut
19. Dewan Penasehat Angkatan Muda Siliwangi Sumut
20. Ketua Dewan Penasehat Tarbiyah Islamiyah Sumut
21. Presiden GAMI
22. Ketua Forum Komunikasi Kenotariatan Indonesia

Sesko TNI Siapkan Kader Unggulan



foto: dok. puspen

Dan Sesko TNI Marsda TNI M. Basri Sidehabi berbincang dengan seorang perwira siswa dari mancanegara.

Sebagai *Centre of Excellence* (pusat keunggulan) dalam pendidikan karir militer, Sesko TNI menyiapkan kader pimpinan TNI yang berlingkup strategis dan berwawasan kebangsaan. Sejak kelahirannya lembaga ini telah mendidik 5.176 personil perwira menengah TNI dan perwira menengah mancanegara.

Suara bisik-bisik antar perwira menengah TNI dari tiga angkatan terhenti saat Kolonel Psk. Tedy Sutedjo, sebagai komandan upacara mengucapkan aba-aba, *siaapp.....graaakk*. Suara pun senyap ketika itu. Sesaat kemudian Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI Marsekal Madya TNI Mohamad Basri Sidehabi, selaku inspektur upacara memasuki ruang Gedung Serasan, tempat dilaksanakannya pembukaan Kursus Reguler XXXIV Sesko TNI T.A 2007.

Kursus ini akan berlangsung selama enam bulan (26 April s/d 26 Oktober 2007), diikuti 97 personil perwira menengah TNI dan perwira menengah mancanegara yang berasal dari tiga angkatan. Angkatan Darat 39 personil, Angkatan Laut 28 personil dan Angkatan Udara 22 personil. Para peserta umumnya berpangkat kolonel. Sementara 8 peserta dari mancanegara tiga diantaranya berpangkat kolonel yaitu Benny Woodard (AD asal Amerika Serikat), Thanakorn Chotiprom (AD asal Thailand), dan Nadeem Shujaat Khan (AU asal Pakistan). Lima personil lagi berpangkat Letkol,

yakni Mohamad Bin Kamarudin (AD asal Malaysia), Tan Yan Yee (AD asal Singapura), Ajay Vinay Bhawe (AL asal India), Mark Holland (AU asal Australia), serta Joelison Georges (AD asal Madagaskar).

Pembukaan kursus reguler XXXIV ini juga dihadiri Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI George Toisutta, Aspers KSAU Marsda TNI Agus Mudikdo, Wadan Denma Mayjen TNI Bob Pangemanan serta sejumlah perwira lainnya.

Tujuan pendidikan di Sesko TNI adalah menyiapkan Pamen TNI sebagai kader pimpinan TNI di masa mendatang, agar mampu melaksanakan tugas pada jabatan komando dan staf yang berlingkup strategis dan berwawasan kebangsaan dalam rangka pertahanan negara.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pendidikan ini: Pertama, di bidang kepemimpinan adalah terwujudnya perwira TNI yang memahami kepemimpinan yang berwawasan Nusantara sesuai dengan jati diri TNI dan mampu mengaplikasikan. Kedua, bidang manajemen dan iptek yang mampu membuat perencanaan militer dalam pertahanan negara. Ketiga, bidang strategi dan operasi militer yang mampu

merencanakan kampanye militer dalam rangka pertahanan negara. Keempat, bidang pertahanan untuk mewujudkan perwira TNI memahami ketahanan nasional dan mampu merencanakan pertahanan negara.

Basis kurikulum yang dipelajari pada umumnya adalah mengenai wawasan kebangsaan. Misalnya tentang HAM, hukum dan ilmu kemiliteran, baik perang maupun non perang sesuai dengan doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karma". Pengajar di Sesko TNI sekitar 30 persen berasal dari akademisi dan 70 persen berasal dari kalangan militer.

Untuk menunjang proses belajar mengajar, Sesko TNI melengkapi dan mengakomodasi berbagai fasilitas. Diantaranya, mess perwira siswa, internet, *fitness centre*, tenis indoor serta perpustakaan elektronik dengan sistem pelayanan komputerisasi.

Marsda Sidehabi melihat peserta dari mancanegara itu sering mengunjungi perpustakaan. Itu mereka lakukan bila ada waktu senggang, yang pada akhirnya memancing perwira menengah Indonesia ikut serta meramaikan perpustakaan. "Mereka rajin ke perpustakaan, dan orang kita ini akhirnya rajin juga mengunjungi perpustakaan," kata Sidehabi kepada *Berita Indonesia* di ruangnya sebelum acara kursus dibuka.

Marsekal berbintang tiga ini mengakui personil di Sesko TNI masih banyak yang *kagok* dengan teknologi. "Kita ini *kan* Gaptek (gagap teknologi-red). Akan tetapi, selama menggali ilmu dengan kurun waktu enam bulan, sudah jago," ujarnya seraya mengangkat jari jempol. "Dengan adanya internet disini, sesudah keluar dari Sesko TNI, para perwira menengah diharapkan jangan Gaptek," kata Sidehabi.

Didik 5.176 personil

Sejak berdirinya pada tahun 1963, sebagai *Centre of Excellence* (pusat keunggulan) dalam pendidikan karir militer, Sesko TNI telah mendidik 5.176 personil perwira menengah TNI dan perwira menengah mancanegara. Sebanyak 26 personil diantaranya berasal dari Australia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Madagaskar, India, Pakistan dan Amerika Serikat.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Sidehabi berharap, para peserta kursus selalu menjaga kesehatan agar dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya hingga mencapai prestasi yang diharapkan. ■ **RON, SP**



foto: repro kompas

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Panglima Tentara Singapura Mayjen Desmond Kuck menandatangani perjanjian kerja sama militer kedua negara.

Tentara Negeri Singa Bisa Latihan di Indonesia

Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan Singapura. Kendati saling memberi manfaat, namun sempat mengundang kritik.

Tentara darat, laut dan udara Singapura kini bisa menggelar latihan militer di kawasan Indonesia. Sebaliknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari ketiga angkatan dapat pula memanfaatkan untuk latihan alat utama sistem senjata (alutsista) canggih yang dimiliki negeri Singa itu.

Kesepakatan saling memanfaatkan berbagai fasilitas di bidang pertahanan dan militer tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani Jumat (27/4) lalu di Istana Tampaksiring, Bali. Menhan kedua negara, Juwono Sudarsono dan Teo Chee Hean serta Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto dan Panglima Tentara Singapura Mayor Jenderal Desmond Kuck menandatangani perjanjian tersebut. Disaksikan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong.

Sebenarnya kerja sama militer kedua negara sudah berlangsung lama. Namun kini lebih konkrit dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pertahanan yang berlaku selama 25 tahun dan bisa dievaluasi kembali. Terutama terkait area latihan militer (*military training area*). Kawasan latihan militer tersebut terdiri dari sejumlah lokasi untuk kepentingan latihan perang darat, laut dan udara.

Dalam perjanjian ini Indonesia memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakan beberapa wilayah tertentu sebagai tempat latihan militer dan Indonesia dapat mengirim pemantau dalam setiap latihan tersebut. Angkatan Darat Singapura bisa melakukan latihan di sekitar Baturaja, Sumatera Selatan, Angkatan Laut di sekitar Blok Kayuara di Laut

Cina Selatan dan Angkatan Udara bisa berlatih di sekitar Pekanbaru, sedikit area di Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan.

Singapura pun bisa melibatkan pihak ketiga dalam latihan militer tersebut. Tapi harus seizin pemerintah RI dan diberlakukan yurisdiksi RI jika terjadi berbagai dampak akibat latihan itu.

Sebaliknya, Indonesia bisa melakukan latihan di wilayah Singapura, termasuk memanfaatkan akses berbagai peralatan dan teknologi militer yang dimiliki negara itu. Singapura juga akan membantu pembiayaan bagi pemeliharaan sarana dan prasarana latihan yang ada di Indonesia.

Namun kebijakan pemerintah ini tidak luput dari kritik. Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai Singapura mengambil keuntungan besar dari perjanjian ini. Dia beralasan, wilayah Indonesia yang lebih luas dari Singapura tentu tidak seimbang dengan kesempatan sama yang diberikan bagi Indonesia untuk melakukan latihan perang di Singapura.

“Singapura boleh mengajak pihak ketiga dalam latihan perang. Bisa Amerika, bisa Israel dan lain-lain, betapa terhinanya bangsa dan negara Indonesia,” kata Amien Rais.

Sikap senada dilontarkan Sekjen PDI-P Pramono Anung. “Luas negara Singapura kan kecil, sehingga Indonesia tidak bisa melakukan latihan di teritori Singapura,” paparnya.

Namun hal itu dibantah Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. “Perjanjian ini akan menguntungkan kedua pihak,” tegasnya. Indonesia diuntungkan dalam arti perkembangan teknologi alutsista. Sebab alutsista yang dimiliki Indonesia agak tertinggal karena kendala pendanaan. Singapura menyediakan sarana dan prasarana latihan yang lebih baru yang bisa dipakai bersama. Selain itu, pemeliharaan alat-alat militer di Indonesia yang mengalami keterbatasan anggaran, dan Singapura sanggup *sharing* pembiayaan kalau ada yang rusak.

Singapura juga punya *Naval Gun Scoring System (NGSS)*. Yakni peralatan latihan menembak milik angkatan laut yang skornya bisa dimonitor dari kapal. Semua itu bisa dimanfaatkan Indonesia kapan saja, jelas Djoko.

Dia bahkan mempertanyakan pendapat yang mengatakan perjanjian ini mengijak-injak kedaulatan Indonesia. “Kalau ada orang yang mengatakan perjanjian itu mengijak-injak kedaulatan kita dan tidak nasionalis, siapa yang meragukan nasionalisme kami, TNI? Tidak mungkin kita menjual negara sendiri untuk kepentingan asing. Kita kan bukan orang bodoh,” kata Djoko.

Kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan dalam porsi sangat teknis. Misalnya dalam latihan teknisnya seperti apa, arealnya seluas apa, koordinatnya berapa dan batasan-batasan latihannya berapa kali seminggu. Aspek hukum juga diatur secara detail. Demikian pula kewajiban Singapura dalam pemeliharaan, penyediaan fasilitas latihan serta sarana dan prasarana. ■ SP

Laksda TNI Moh. Sunarto Pimpin Seskoal



foto: berindo wilson

Laksamana Muda TNI Moh. Sunarto Sjoekronoputra disaksikan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto, sedang menandatangani naskah sertijab Danseskoal.

Bumi Seskoal (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut) Cipulir, Selasa (8/5) mendapat komandan baru.

Seorang perwira tinggi TNI AL berbintang dua, yakni Laksamana Muda TNI Moh. Sunarto Sjoekronoputra. Ia menggantikan pejabat lama, Laksda TNI Gunadi, MDA yang diangkat menjadi Asrena Kasal. Upacara serah terima jabatan dipimpin KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto, dihadiri sejumlah Pati di lingkungan TNI AL dan Atase Pertahanan negara-negara sahabat.

Sunarto mantan Kepala Pusat Penerangan TNI ini sebelumnya sempat menjadi Widya Iswara Lemhannas. Dia juga merupakan alumnus Seskoal. Karenanya keberadaan Sunarto di bumi Sesko Cipulir, seperti dikatakan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto, diharapkan bisa memberi makna kepada kemajuan lem-

baga pendidikan dalam menyiapkan dan melahirkan kader-kader pemimpin TNI AL masa depan yang mampu menghadapi tantangan tugas yang makin kompleks.

Perihal mutasi jabatan ini, seperti ditegaskan KSAL, selain merupakan kegiatan rutin dan hal yang biasa dilaksanakan, juga dimaksudkan untuk penyegaran ide yang dapat memberi nuansa baru, baik bagi pejabat yang digantikan maupun yang menggantikan.

Apalagi selain melaksanakan pendidikan pengembangan umum tertinggi bagi perwira TNI AL, Seskoal juga memiliki peranan penting dalam melaksanakan pengkajian strategis yang berkaitan dengan aspek pertahanan negara di laut dan kemaritiman, sekaligus sebagai 'center of excellence'.

Serah terima jabatan Dan Seskoal ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Panglima TNI nomor : Kep/21/IV/2007 tertanggal 17 April 2007. Menurut Kadispenum Puspen TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki, berdasarkan keputusan itu Panglima TNI memutasi 15 Pati di lingkungan TNI. Tiga orang memasuki masa pensiun. Yakni Laksda TNI (Purn) Imam Zaky NP, Pati (purn) Mabes TNI AL yang sebelumnya menjabat sebagai Irjen Dephan, Laksda TNI (purn) Yuwendi, Pati (Purn) Mabes TNI AL, sebelumnya menjabat Dirjen Renhan Dephan dan Mayjen TNI Suhadi, M.Sc, Pati (purn) Mabes TNI AD yang sebelumnya menjabat Deputy Bid Politik dan Strategi Setjen Wantanas.

Sebanyak 8 orang dimutasi antar jabatan. Yakni Laksda TNI Sumardjono, dari Irjen TNI menjadi Irjen Dephan, Laksda TNI Muryono, dari Pangarmabar menjadi Askomlek Kasum TNI, Laksda TNI Agus Suhartono, SE, dari Dankodikal menjadi Pangarmabar, Laksda TNI Slamet Yulistiono dari Kadispenal menjadi Waasops Kasal, Laksda TNI Tedjo Edhy Pudjiarto dari Asrena Kasal menjadi Dirjen Renhan Dephan, Laksda TNI Gunadi, MDA, dari Danseskoal menjadi Asrena Kasal, Laksda TNI Moh. Sunarto Sjoekronoputra, dari Kapuspen TNI menjadi Danseskoal, Marsda TNI Sagom Tamboen, SIP, dari Pa Sahli Tk III Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Kapuspen TNI.

Sedangkan 4 orang yang mendapat promosi jabatan adalah Laksda TNI Didik Heru Purnomo, dari Askomlek Kasum TNI menjadi Irjen TNI, Laksma TNI Edhi Nuswantoro, dari Waasops Kasal menjadi Dankodikal, Brigjen TNI B. Heru Sukmadi, M.Sc, dari Pati Dephan menjadi Deputy Bid Politik dan Strategi Setjen Wantanas, Kolonel Laut (P) Sugeng Darmawan, dari Dansatgas Yekda Kapal LPD Korsel menjadi Kadispenal. ■ RON, SP

Kasum ke Ambon dan Manado

Kasum TNI Letjen TNI Endang Suwarya dan rombongan beberapa waktu lalu mengadakan kunjungan kerja ke Kodam XVI/Patimura Ambon dan Pangkalan TNI AL VII Manado. Dalam kunjungan itu Kasum menerima laporan dari Pangdam XVI/Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy mengenai kesiapan komandonya dalam mengemban tugas pokok menjaga keutuhan NKRI maupun tugas bantuan. Termasuk aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan.

Dalam kesempatan itu Letjen Endang Suwarya merasa kagum dan bangga terhadap masyarakat Kota Ambon dan Maluku yang tidak lagi mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Mereka telah memiliki ketahanan tinggi yang dilandasi kedewasaan cara berfikir untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan yang hakiki dalam budaya *Pela* dan *Gandong*.

Kasum berharap pada penegak hukum agar bekerja keras mengungkap dalang di balik bom

di Maluku dan Ambon, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memberi efek jera pada pelaku lainnya.

Endang Suwarya berpesan kepada masyarakat setempat untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dengan TNI maupun Polri membantu Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Sehingga dapat mengatasi keteringgalan dan keterpurukan di berbagai bidang. ■ RON, SP

Lokakarya Investasi UNCTAD-PBB di Kukar



Upacara pembukaan lokakarya investasi di Tenggarong, Kukar.

Kutai Kartanegara sukses sebagai tuan rumah *International Training Workshop on Dispute Settlement Mechanism on Investment* atau lokakarya internasional penyelesaian perselisihan investasi yang diselenggarakan UNCTAD (lembaga PBB) dan diikuti delegasi dari 14 negara di Tenggarong, pada 24-26 April 2007.

UNCTAD (*United Nations Conference for Trade and Development*) lembaga PBB yang menangani urusan perdagangan dan pembangunan menyelenggarakan event itu bekerjasama dengan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB, Departemen Luar Negeri RI, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai tuan rumah.

Delegasi dari 14 negara yang mengikuti lokakarya internasional itu adalah delegasi Myanmar, Kamboja, Vietnam, China, India, Sri Lanka, Timor Leste, Tuvalu (Ms Filiga Lesaa Taukiei), Samoa, Malaysia, Filipina, Fiji dan Papua New Guinea.

Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari, 24-26 April 2007, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang. Tampil sebagai narasumber Chitra Radhakishun (*Manager UNCTAD Project Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property*), Ucheora Onwuamaegbu (*Senior Counsel at the World*

Bank International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID), Prof DR Muthucumaraswamy Sornarajah (*Professor at the Faculty of Law of the National University of Singapore*) dan Makarim Wibisono (Duta Besar/Wakil Tetap RI pada PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa) yang tampil sebagai *keynote speech*.

Chitra Radhakishun menyampaikan materi *Dispute Settlement in International Trade, Investment, and Intellectual Property*. Ucheora Onwuamaegbu membahas persoalan perselisihan dan mencari solusi antarpemerintah dengan investor asing di tingkat arbitrase sekaligus perdamaian. Prof DR Muthucumaraswamy Sornarajah mengulas persoalan investasi dan perselisihan dilihat dari sisi hukum legal formalnya. Doktor filosofi (PhD) dari University of London di bidang hukum itu sangat aktif dalam berbagai penyelesaian arbitrase internasional.

Lokakarya (pelatihan) itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta dari negara-negara berkem-

bang dalam menyelesaikan sengketa investasi di lembaga-lembaga regional maupun internasional. Juga untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai aturan dan prosedur yang berlaku secara internasional dalam penyelesaian sengketa.

Pelatihan internasional itu dibuka Banua Radja Manik (Pelaksana Harian Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI). Sementara Wakil Bupati Kukar Samsuri Aspar, memberi sambutan pada acara pembukaan dan penutupan.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Prof Dr Syaukani HR MM dalam *Official Handbook* menyambut baik kegiatan internasional itu. Dia menyebut kegiatan itu merupakan suatu kehormatan bagi Pemkab Kukar yang telah dipercaya selaku tuan rumah.

Syaukani juga berharap hubungan persahabatan yang terbentuk selama lokakarya, tumbuh menjadi suatu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Kukar sekaligus 12 kota/kabupaten lain se-Kaltim, khususnya di bidang pariwisata, perdagangan, investasi dan lainnya.

Bernilai Strategis

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar, MM, dalam sambutan pembukaan pelatihan internasional itu di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Selasa (24/4/2007) pagi mengatakan, dipilihnya Kukar sebagai tuan rumah lokakarya internasional penyelesaian perselisihan investasi yang pertama digelar di Kaltim, itu bukan hanya sebuah kehormatan, tapi juga memiliki nilai strategis.

"Karena sebagian besar pendapatan Kukar dihasilkan oleh kegiatan investasi perusahaan nasional dan multinasional.

Hafidz Anwar, Kepala Badan Penanaman Modal (BPMD) Pemkab Kukar yang dipercayakan sebagai Ketua Panitia, berharap lokakarya ini membawa manfaat maksimal khususnya

bagi Kukar yang sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang dengan program Gerbang Dayaku.

Duta Besar/Wakil Tetap RI pada PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa, Dr Makarim Wibisono yang tampil sebagai *keynote speech* mengungkapkan rasa salutnya kepada Pemkab Kukar yang menggelar lokakarya internasional itu. Menurut Dr Makarim Wibisono, Kutai Kartanegara sebuah daerah yang baik untuk tujuan investasi. Daerah ini, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang kaya, aparat pemerintahannya pun bersungguh-sungguh, juga mempunyai modal pengetahuan penyelesaian berbagai aspek menyangkut bidang investasi.

Lokakarya internasional itu diakhiri dengan makan malam perpisahan di Pulau Kumala Tenggarong. Para peserta dari 14 negara Asia Pasifik itu menyempatkan diri untuk mengunjungi Kukar lebih jauh. Mereka menikmati keindahan Kota Raja Tenggarong di waktu malam secara langsung. Keindahan alam dan infrastruktur wisata di Pulau Kumala itu telah menjadi kebanggaan Kukar.

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya (Disparbud) Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengoptimalkan kegiatan itu dengan mengisinya dengan pameran objek wisata dan potensi investasi di Kukar. Pameran ini digelar khusus sebagai upaya mengundang para wisatawan sekaligus merangsang investor menanamkan modalnya di Kukar," kata Kadisparbud Pemkab Kukar Drs H Basran Yunus, MM.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar Sri Wahyuni menjelaskan, pameran diikuti sejumlah dinas terkait. Pelayanan kepada media massa juga dilakukan secara baik. Panitia menyediakan *media center* di sebelah kiri luar gedung PKM, untuk memudahkan para wartawan mengakses informasi seputar kegiatan lokakarya internasional itu. ■ SB-CRS

Komitmen Produsen Minyak Goreng Menstabilisasi Harga Sukarela atau “Sukarela”

Para produsen CPO berkomitmen secara sukarela menstabilisasi harga minyak goreng. Namun setelah menggelar sejumlah operasi pasar, harga minyak goreng tidak kunjung turun. Benarkah para produsen itu sukarela atau sekadar “Sukarela”.

Tidak diketahui persis, mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan luar biasa sejak minggu terakhir April. Sebelumnya, kelangkaan itu dipicu karena arus ekspor yang meningkat, seiring dengan menguatnya permintaan pasar global terhadap *crude palm oil* (CPO).

Menjawab persoalan itu, pemerintah segera mengambil langkah-langkah stabilisasi pasokan dalam negeri dengan menggalang komitmen produsen minyak goreng untuk menambah pasokan dalam negeri. “Produsen CPO dan minyak goreng sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Mereka mau mengorbankan margin keuntungannya sehingga minyak goreng bisa dilepas dengan harga murah di tingkat pengecer,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris di Jakarta, Selasa (1/5).

Tidak perlu dijelaskan mengapa ada semacam “itikat baik” dari para produsen CPO dan minyak goreng menambah pasokan dalam negeri. Bahkan komitmen itu disebut sebagai sebuah kesepakatan “sukarela” antara pemerintah dengan produsen CPO dan minyak goreng.

Sedemikian “sukarelanya” para produsen CPO dan minyak goreng itu, mereka tidak hanya dengan sukarela memangkas keuntungan, sebagaimana yang diungkapkan Menperin Fahmi Idris, tetapi juga dengan sukarela menggelar operasi Pasar (OP) minyak goreng di berbagai tempat.

Namun jika dicermati lebih

jauh “itikat baik” dan “kesukarelaan” itu berkaitan erat dengan ancaman Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan Pungutan Ekspor (PE) guna membatasi ekspor CPO sekaligus mendorong peningkatan pasokan dalam negeri. Konon, pemerintah akan meningkatkan PE dari sebesar 1,5% menjadi 3% dari harga jual CPO.

Hal itu dikemukakan Jusuf Kalla setelah menerima Pelaksana Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Derom Bangun di Kantor Wakil Presiden, Selasa (1/5). Para produsen sudah pasti sangat memahami, jika wakil presiden itu sampai merealisasikan ancamannya, maka kerugian besar sudah menanti mereka.

Secara umum, jika pemerintah memutuskan peningkatan PE, akan serta merta memukul daya saing ekspor CPO Indonesia di pasar luar negeri, dibanding produk CPO dari Malaysia misalnya. Di sisi lain, peningkatan PE juga akan membuat margin keuntungan produsen CPO kian mengecil, bahkan terancam merugi. Sebab, jika tidak diekspor, maka total produksi dalam negeri yang sebesar 16,5 juta ton CPO tidak akan terserap di dalam negeri, yang hanya 3,8 juta ton?

Yang menjadi pernyataan, apakah para produsen CPO dan minyak goreng itu benar-benar sukarela menurunkan volume ekspor mereka dan menambah pasokan dalam negeri? Ataukah hal itu hanya “kesukarelaan” untuk sekadar menghindari ancaman Wakil Presiden Jusuf Kalla?

Teka teki ini sebenarnya



foto: berindo wilson

Operasi pasar tidak secara efektif menurunkan harga di tingkat pengecer.

dijawab sendiri oleh pasar. Berdasarkan komitmen sukarela antara pemerintah dengan produsen CPO dan minyak goreng pada 1 Mei lalu, telah dicapai kesepakatan sasaran harga Rp 6.500-Rp 6.800 per kg pada tingkat pengecer. Akan tetapi, walaupun operasi pasar minyak goreng telah berlangsung lebih dari seminggu, ternyata tidak efektif menurunkan harga di tingkat pengecer. Menurut beberapa pedagang yang ditemui *Berita Indonesia* di sejumlah tempat, harga minyak goreng curah hingga pertengahan minggu kedua Mei masih berkisar Rp 8.000 per kg.

Dan ironisnya, kenaikan

harga minyak goreng, justru memicu kenaikan harga komoditi-komoditi lain. “Biasanya, kalau harga minyak goreng naik, harga ikan, telur, sayur, dan beberapa jenis barang selalu ikut-ikutan naik,” kata Wati yang membuka Warung Tegal (Warteg) di Stasiun Tebet sembari mengakui bahwa ia terpaksa menaikkan harga makanan kepada pelanggannya.

Bertitik tolak dari realitas pasar yang masih menunjukkan harga minyak goreng yang tinggi, kiranya wajar dipertanyakan apakah komitmen produsen minyak goreng menstabilisasi harga sukarela atau “sukarela”. ■ MH



Kenaikan harga beras sekecil apa pun akan berdampak meningkatnya laju inflasi.

foto: berindo wilson

Gratifikasi Bulog dan Disinsentif Petani

Pertanyaan besar di balik kasus Tindak Pidana Gratifikasi (TPG) mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, sejauh mana rente yang diperoleh itu mempengaruhi kebijakan perberasan nasional?

Kinerja perekonomian sepanjang Maret 2007 diwarnai deflasi sebesar 0.16%. Demikian pengumuman bulanan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (1/5). Kepala BPS Rusman Heriawan mengungkapkan, fenomena deflasi yang terjadi pada Maret 2007 tersebut dipicu harga beras yang menurun. Selama Maret 2007, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1.30%.

Penurunan harga beras, yang kemudian memicu deflasi, menjadi pertanda besarnya dampak beras terhadap kinerja perekonomian nasional. Contoh lain dapat dilihat dari tren harga beras yang melambung pada Desember 2006, secara langsung mendorong inflasi sebesar 3.12% pada kelompok bahan pangan dan menghasilkan laju inflasi bulanan sebesar 1,21%.

Dari uraian di atas, terlihat jelas betapa kuatnya komponen beras mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Sekecil apa pun perubahan harga yang terjadi pada komoditi ini, akan berdampak besar meningkatkan atau menurunkan laju inflasi. Dan sebagaimana diketahui, laju inflasi menjadi salah satu parameter dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara.

Tentunya yang dibutuhkan adalah stabilitas harga. Hal ini berkaitan erat dengan pasokan (*supply*) yang harus seimbang dengan kebutuhan (*demand*). Dengan

tercapainya keseimbangan, komponen bahan pangan dan lebih khusus lagi komoditi beras, tidak menciptakan tekanan yang berlebihan terhadap inflasi. Kondisi seperti ini berdampak positif mendukung kinerja perekonomian secara nasional.

Yang menjadi persoalan, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan beras hampir tidak pernah tercapai. Kalau tidak berlebihan, selalu mengalami kekurangan. Pada musim paceklik, terjadi kelangkaan beras dan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga, serta memicu kenaikan inflasi. Sebaliknya, saat musim panen harga beras turun hingga memicu deflasi, sebagaimana yang terjadi pada Maret lalu.

Tentu ada yang salah dalam hal ini. Mengapa pasokan dan harga beras tidak dapat dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi jebakan pada kinerja ekonomi makro? Jika bertitik tolak pada kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Bulog, bukankah stabilitas suplai dan harga beras bisa diwujudkan?

Pada Pasal 6 ayat 2 poin 2 PP Nomor 7 Tahun 2003 tersebut menyebutkan maksud pendirian Bulog, agar dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi

pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.

Apakah dugaan Tindak Pidana Gratifikasi (TPG) yang dituduhkan pada mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo sebesar 1,555 juta dolar AS dari Vietnam Food telah membuat Bulog kehilangan kewenangannya? Persoalan inilah yang tercecer di tengah-tengah hiruk pikuk pemberitaan tentang Bulog pasca penangkapan Widjanarko Puspoyo.

Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kebijakan dan kinerja Perum Bulog menstabilkan pasokan dan harga beras? Sejahtera mana keberpihakannya pada petani padi? Kenyataannya, imej Perum Bulog di mata masyarakat, lebih menonjol sebagai importir beras dari Vietnam, Thailand, atau Birma. Sementara peranan lain, sebagai institusi pengamanan harga pangan pokok, tidak terlihat menonjol, bahkan kalau tidak mau disebut tidak dilaksanakan secara serius.

Buktinya, walaupun pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras petani, namun setiap musim panen, harga gabah maupun beras hampir dipastikan selalu anjlok. Ini merupakan refleksi kinerja Bulog yang tidak pro petani. Sebaliknya, setiap musim paceklik, Perum Bulog selalu sibuk menghitung volume impor beras. Benarkah hal itu lebih didorong karena mengejar keuntungan semata, di samping *fee* berjumlah puluhan miliar rupiah yang diterima pimpinan Perum Bulog.

Terungkapnya sejumlah kasus korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi Direktur Utama Bulog yang baru, Mustafa Abubakar. Besarnya volume impor beras, rendahnya volume produksi beras nasional, rendahnya kesejahteraan petani, dan penurunan gairah petani membudidayakan padi, sedikit banyak dipengaruhi kinerja bulog yang memburu rente.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Perum Bulog ke depan harus terarah pada upaya mendorong kesejahteraan petani melalui stabilitas harga jual produksi pertanian mereka. Perburuan rente yang dilakukan Perum Bulog selama ini telah memicu disinsentif bagi para petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Alhasil, produksi padi nasional terus menurun pada satu sisi dan pada sisi yang lain mendorong peningkatan volume impor beras.

Janji Mustafa Abubakar mereformasi Perum Bulog akan dapat dilihat secara faktual, baik melalui stabilitas harga beras di tingkat konsumen maupun harga jual di tingkat petani, sesuai dengan HPP pemerintah. ■ MH

Vonis yang Tak Disambut

Kementerian Lingkungan Hidup berharap, Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali fakta yang ada di lapangan.

Meski diwarnai aksi protes di luar gedung pengadilan, Richard Ness tersenyum lega saat majelis hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan bebas untuknya atas kasus dugaan pencemaran limbah di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, yang dituduhkan kepada perusahaannya yang dipimpinnya, PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Ness, selaku presiden direktur NMR merupakan terdakwa II dalam kasus tersebut. Terdakwa I, yakni PT NMR, juga divonis bebas.

Majelis hakim yang dipimpin Ridwan Damanik menyatakan, data pencemaran jaksa yang didasarkan pada hasil pengujian Puslabfor Mabes Polri berbeda dengan data sejumlah instansi penelitian, baik nasional maupun internasional, yang menyatakan bahwa konsentrasi logam di dalam air, biota, dan tubuh manusia berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Putusan itu jelas mengece-

wakan sejumlah pihak. Kejaksaan segera mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap Richard Ness dan NMR di Pengadilan Negeri (PN) Manado, 24 April lalu, didukung pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Lembaga tersebut berharap, Mahkamah Agung (MA) akan mempertimbangkan kembali fakta yuridis, fakta ilmiah dan fakta-fakta lain di lapangan yang telah disampaikan jaksa di persidangan sebelumnya.

Sementara kalangan aktivis lingkungan di Walhi Jatam dan ICEL, juga pun menilai putusan Majelis Hakim ini patut dipertanyakan, karena sarat kejanggalan dalam dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah sendiri menyerahkan putusan bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Manado dalam kasus pencemaran lingkungan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) itu kepada aparat hukum.

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring mengatakan, kasus tersebut telah membuat kekhawatiran peru-



Vonis bebas itu merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan.

sahaan tambang lainnya dalam upaya menangani masalah lingkungan.

Sementara Koordinator Jaringan Advokasi Tambang

(Jatam) Siti Maemunah di Jakarta, mengatakan, vonis bebas itu merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. ■ RH

Fatwa Untuk Mazi

Mahkamah Agung memberikan fatwa kepada terdakwa kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton, Ali Mazi dengan Nomor 78/KMA/2007 tertanggal 26 April 2007.

Isi fatwa yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tersebut untuk memperjelas posisi Ali Mazi saat melakukan perpanjangan izin HGB pada 1999, yakni sebagai advokat. Bukan sebagai gubernur.

Mengenai penonaktifan Ali Mazi dari jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, MA berpendapat seharusnya penonaktifan itu tidak semata-mata dipandang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tapi juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun Koordinator Tim Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho tidak setuju dengan fatwa

itu. Menurut dia, tugas Mahkamah hanya memberikan pendapat hukumnya kepada lembaga tinggi negara sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung, bukan pada individu.

Fatwa ini, lanjut Emerson, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, karena nantinya bisa dijadikan dasar bagi setiap kepala daerah untuk lolos dari hukum.

Sementara itu, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Robert Jeffrey Lumempauw mengaku keliru dan siap dihukum terkait kasus dugaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton tersebut.

Namun, Robert berkilah, kekeliruan itu terjadi karena dia tidak mengetahui HGB Hotel Hilton belum habis masa berlakunya. Masa berlaku HGB selesai pada 2003 sedangkan perpanjangan HGB Hotel Hilton keluar pada 2002. "Saya baru menyadari hal itu salah karena HGB



Ali Mazi

foto: berindo wilson

26 dan 27 belum habis," ujarnya seperti dikutip harian ini. ■ RH



Atang Latief

foto-foto: repro gatra



Samadikun Hartono



Sudjiono Timan

Menciduk Penilap di Negeri Singa

Aparat hukum Indonesia harus mengantisipasi kelihaian para koruptor itu di hadapan aparat hukum Singapura.

Tepuk tangan membahana menyambut penandatanganan perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura yang dilaksanakan di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsin Loong menyaksikan menteri luar negeri, Nur Hasan Wirayuda (RI) dan George Yeo (Singapura) meneken draf perjanjian.

Perjanjian ini dianggap membuka era baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Pasalnya selama ini Singapura dianggap sebagai tempat penyimpanan duit para koruptor Indonesia yang dipakai negara itu untuk menggerakkan perekonomiannya. Sebagai imbalan, para koruptor bisa hidup tenang di negeri itu.

Dengan adanya perjanjian itu bidikan aparat hukum Indonesia terhadap sejumlah koruptor yang lari ke Singapura tidak lagi terhalang. Target pertama adalah para pengemplang BLBI. Menurut catatan Kejaksaan Agung, ada delapan obligor yang lari ke negeri singa itu. Indonesian Corruption Watch merilis jumlah 17 orang. Transparansi Indonesia malah merilis jumlah 40 orang koruptor Indonesia yang lari ke Singapura.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia

dan Singapura memang bisa menjadi alat yang ampuh untuk menjerat koruptor Indonesia yang menjadi warga negara Singapura. Namun, masih banyak konsekuensi yang harus ditindaklanjuti agar efektivitas perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia.

Menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, keuntungan yang nyata bagi Indonesia dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah Singapura tidak akan dijadikan lagi sebagai tempat yang nyaman bagi koruptor Indonesia untuk melarikan diri dan menanamkan asetnya.

Namun, aparat hukum kita juga harus mengantisipasi kelihaian para koruptor itu di hadapan aparat hukum Singapura. Sebab, saat Indonesia meminta Singapura mengembalikan koruptor dan aset yang dikorupsinya di negara pulau itu, pengadilan Singapura bisa mengabaikannya, jika sang koruptor mengajukan bukti perlakuan diskriminatif oleh aparat hukum Indonesia. "Hal itu terjadi dengan almarhum Hendra Rahardja, sehingga Pemerintah Australia enggan menyerahkan dia dan asetnya di Australia kepada Indonesia," kata Hikmahanto seperti dikutip *Suara Karya* (30/4).

Butuh Proses

Ada yang optimis, ada juga yang pesimis terkait perjanjian tersebut. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pesimis terhadap efektivitas perjanjian ekstradisi RI-Singapura. Menurut dia, penerapan perjanjian tersebut hampir pasti terbentur pada hukum internal di masing-masing negara.

Yusril mengacu pada pengalaman penerapan perjanjian ekstradisi RI-Australia. Untuk mengabulkan permohonan Pemerintah RI menyangkut ekstradisi pelaku kejahatan keuangan dan perbankan di Indonesia, dalam kasus Hendra Raharja, pemerintah Australia membutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal kedua negara telah resmi menandatangani perjanjian ekstradisi.

"Seperti kita tahu, Singapura juga punya sistem hukum yang sama seperti Australia. Kalau pada kita, ekstradisi semata-mata kewenangan pemerintah. Tapi pada negara (dengan sistem hukum) Anglo-Saxon, ekstradisi perlu putusan badan peradilan yang prosesnya sangat panjang," ujar Yusril.

Namun, menurut Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Internasional bidang Politik, Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri, proses ekstradisi dari Singapura hanya perlu putusan pengadilan tingkat magister (pengadilan negeri). Di pengadilan tingkat pertamalah ekstradisi diputuskan. ■ RH

Poin Penting Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

1. Berlaku surut 15 tahun
2. Mencakup 31 jenis kejahatan
3. Meski sudah pindah kewarganegaraan, ekstradisi tetap berlaku bila kejahatan dilakukan saat masih WNI.
4. Ekstradisi dilaksanakan setelah ratifikasi
5. Pengajuan ekstradisi disahkan majelis pengadilan Singapura
6. Ekstradisi diikuti dengan pengembalian aset negara yang dibawa lari

■ RH



Widjokongko kini ditahan Kejaksaan Agung.

foto: repro jurnal nasional

Giliran Adik Tersayang

Widjokongko Puspoyo dikenal sebagai pengusaha dan bankir. Namanya tercatat sebagai Presiden Direktur Bank Indotrade dan pernah menjabat Direktur Keuangan PT Jamsostek.

Mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo tampaknya kompak dengan sang adik, Widjokongko Puspoyo. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah oleh pejabat negara Perseroan Umum Badan Urusan Logistik (Perum

Bulog) per Rabu, 25 April 2007.

Widjanarko telah ditahan dengan status tersangka kasus korupsi impor sapi Australia tahun 2001, sementara Widjokongko menyusul ditahan Kejaksaan pada 3 Mei lalu. Widjokongko Puspoyo dikenal sebagai pengusaha dan bankir. Namanya tercatat sebagai Presiden Direktur Bank Indotrade (1993-1999) dan pernah men-

jabat Direktur Keuangan PT Jamsostek.

Pengolahan hasil pemeriksaan yang terdiri atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti telah memperjelas aliran dana yang diterima para tersangka dari kegiatan pengadaan komoditas beras impor dari Vietnam.

Dalam kasus gratifikasi itu, penyidik telah memeriksa sejumlah anggota keluarga Widjanarko yaitu Widjokongko (adik), Endang Ernawati (istri), Winda Nindyati (putri sulung), Andre Juanda (menantu), serta Rinaldy Puspoyo (anak kedua) terkait pasal UU Korupsi tentang aliran dana

atau aset yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Kasus gratifikasi dari Vietnam Southern Food Corporation sebesar 1,5 juta dolar AS awalnya mengalir ke PT Tugu Dana Utama. Pihak PT Tugu kemudian mengirimkan 1,2 juta dolar AS ke PT Arden Bridge Investment (ABI) milik Widjokongko. Dari PT ABI, uang diduga mengalir ke Widjanarko dan anggota keluarganya seperti istri dan anak-anaknya.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya direksi dan karyawan perusahaan rekanan yang terkait kerja sama Bulog yang menerima aliran dana dari Vietnam Southern Food Corporation, juga meminta keterangan langsung ke perusahaan tersebut dengan menerbangkan lima penyidik ke Vietnam.

Kejaksaan juga masih menunggu penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kepastian jumlah uang dalam kasus korupsi tersebut. Kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pengadaan komoditas itu berawal dari kerjasama Bulog dengan dari Vietnam Southern Food Corporation dalam impor beras 2001-2002.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji juga mengatakan kejaksaan berencana memanggil paksa wanita berinisial ERN yang disebut-sebut dekat dengan Widjanarko, karena dia juga menerima dana gratifikasi. "Direktur Penyidikan sedang merencanakan itu," kata Hendarman. ■ **RH**

Kasus Impor Beras Vietnam

Tersangka:

1. Widjanarko Puspoyo

- ▶ Posisi: Sebagai Dirut Perum Bulog, Widjanarko seharusnya tidak menerima hadiah (gratifikasi) dari rekanan.
- ▶ Tersangka: 25 Maret 2007

2. Widjokongko Puspoyo

- ▶ Peran: Menerima dan mendistribusikan dana gratifikasi lewat PT Arden miliknya.

- ▶ Tersangka: 25 Maret 2007
Belum ditahan

Kekayaan Widjokongko:

Total: Rp 11,088 miliar (laporan ke KPK pada 2004 saat menjadi Direktur Keuangan PT Jamsostek)
Rincian harta kekayaan yang dimiliki pria kelahiran Solo, 7 Oktober 1951, ini adalah sebagai

berikut:

- ▶ Properti: Rp. 1,133 miliar (empat tanah di Tangerang).
- ▶ Kendaraan: Rp 296 juta (Mobil Mercedes Benz tahun 2000, Mitsubishi 1994, Honda 1989, dan motor Honda 1996).
- ▶ Logam mulia dan barang antik: Rp 277 juta.
- ▶ Surat berharga: Rp 9,2 miliar.
- ▶ Meubel: Rp 88 juta.

Supaya Mudah Mencari Obat



foto: repro gatra

Jika tak dikontrol dengan baik, program ini bisa menjadi ajang legalisasi obat ilegal.

Pelaksanaan program apotek rakyat dikhawatirkan akan memperburuk mutu pelayanan obat dan melegalisir peredaran obat ilegal jika tidak dikontrol dengan baik.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan sudah sejak lama tahu bahwa sentra perdagangan obat Pasar Pramuka terkenal sebagai tempat beredar obat ilegal, obat palsu, serta tempat penjualan yang ilegal pula.

Di sisi lain, harga obat di apotek besar sangat mahal. Sementara obat bukanlah sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan juga hak masyarakat. "Yang jadi korban akhirnya masyarakat," kata Menteri Kesehatan saat peresmian toko obat di Pasar Pramuka menjadi apotek rakyat, Selasa (3/4).

Itulah yang mendasari kebijakan Departemen Kesehatan, menjadikan toko obat di sentra-sentra perdagangan obat secara bertahap sebagai apo-

tek rakyat guna mencegah penjualan obat-obatan keras (obat dalam daftar G) secara tidak sah.

Kebijakan Apotek Rakyat bertujuan untuk menertibkan peredaran obat-obatan di sentra-sentra perdagangan obat dan melindungi pedagang dari pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Obat juga harus disertai label harga. Masalahnya, banyak apotek besar memasang harga obat semaunya. Atas alasan itu, Menteri Kesehatan meminta toko obat meningkatkan status menjadi Apotek Rakyat dengan syarat yang ringan. Dia menjanjikan proses perizinan perubahan menjadi Apotek Rakyat tanpa biaya alias gratis.

Apotek rakyat bertugas menyediakan obat dengan harga murah dan aman pada masya-

rakat. Juga tidak diizinkan menjual psikotropika dan narkotika yang berbahaya bagi kesehatan. Satu apoteker akan menangani tiga apotek rakyat dan akan berlaku di seluruh Indonesia.

Dinas Kesehatan DKI juga mencatat, pada tahun 2006 terdapat 1.385 apotek di DKI Jakarta, yang terdiri dari 1.309 apotek umum dan 76 apotek sederhana yang akan dijadikan Apotek Rakyat. Sedangkan jumlah toko obat di DKI Jakarta ada sebanyak 1.233, yang terdiri dari 837 toko obat berizin dan 396 toko obat tidak berizin.

Perlu Kontrol

Di sisi lain, pelaksanaan program apotek rakyat dikhawatirkan akan memperburuk mutu pelayanan obat, dan bisa jadi ajang legalisasi peredaran obat ilegal jika tidak dikontrol dengan baik.

Oleh karena itu, institusi pengawas dan asosiasi profesi apoteker harus terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pro-

gram ini.

Selama ini apotek-apotek yang beroperasi di berbagai tempat sulit dikendalikan pemerintah. Hal ini ditandai tingginya angka obat palsu yang beredar di Indonesia.

Pendirian apotek rakyat sebenarnya wajar untuk mempermudah akses memperoleh obat dengan harga murah, dan memastikan asal-usul obat. Namun jika tak dikontrol dengan baik, program ini bisa menjadi ajang legalisasi obat ilegal.

Mutu pelayanan obat yang diberikan pun diragukan. Apalagi, syarat pendirian apotek rakyat lebih ringan dibanding apotek pada umumnya. Penerapan kebijakan yang membolehkan satu apoteker bekerja di tiga hingga empat apotek rakyat juga dipertanyakan.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, pengawasan apotek rakyat dilakukan Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dinas kesehatan setempat, organisasi profesi, dan apoteker.

Dalam hal ini, Badan POM harus membuat sistem pengawasannya. Jika ada yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, tertulis, sampai pencabutan izin.

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Richard Panjaitan menambahkan, pemantauan pelaksanaan program apotek rakyat harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk institusi pengawas, yakni Badan POM, Balai POM, serta dinas kesehatan setempat yang mengeluarkan izin pendirian apotek rakyat.

Para apoteker sebagai penanggung jawab apotek rakyat dan petugas sarana kesehatan lain juga harus ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program apotek rakyat.

Prinsipnya, apoteker itu perpanjangan tangan pemerintah di sarana pelayanan kesehatan untuk menegakkan ketentuan. Karena itu, apoteker terikat sumpah dan harus memiliki izin kerja. ■ **RH**

Irjen Depdiknas Muhammad Sofyan menunjukkan laporan dan bukti kecurangan Ujian Nasional dari Komunitas Air Mata Guru.

UN Dicemari Kecurangan

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2007 dicemari dengan kecurangan. Yang memprihatinkan, kecurangan dilakukan secara sistematis oleh mereka yang berpredikat sebagai pendidik.

Carut-marut dunia pendidikan masih terus terjadi. Belakangan ini kembali tercoreng dengan skandal bocoran soal-soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMP yang terjadi di Medan dan di beberapa daerah. Kasus ini mencuat dan diberitakan secara meluas oleh pers atas laporan sejumlah guru dan pengawas UN serta kepala sekolah yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru.

“Kunci jawaban itu dibacakan 30 menit sebelum waktu ujian berakhir,” ujar Denny Boy Saragih, Koordinator Komunitas Air Mata Guru Medan. Kecurangan lainnya adalah dengan memberikan jawaban melalui SMS dan juga catatan yang beredar di kalangan siswa peserta UN.

Laporan adanya kecurangan dalam UN dari hari ke hari

terus bertambah. Kalau awalnya laporan hanya berasal dari 36 pengawas, guru dan kepala sekolah, sampai Senin (30/4) bertambah menjadi 70 guru dari berbagai daerah, termasuk Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Langkat dan daerah lainnya.

Dan yang lebih menyedihkan, kebocoran itu justru dilakukan secara sistematis oleh mereka yang berkategori sebagai pendidik. Kata Denny, modus itu sudah dirancang jauh-jauh hari oleh guru dan kepala sekolah. Bahkan melibatkan petugas kantor Dinas Pendidikan. Beberapa sekolah yang melakukan kecurangan diantaranya SMAN 4, SMAN 15, SMK N5, SMA BudiAgung, SMA Timbul Jaya, SMA Nasrani 3, SMK Bina Satria, SMPN 16, SMPN 18 dan SMP Marisi Medan.

Ketua Dewan Pendidikan

Medan Dr Matsuyhito Solin yang menerima pengaduan itu mendukung perjuangan Air Mata Guru membongkar kecurangan yang menurutnya sudah berlangsung lama. “Dari survei saya, kecurangan selalu terjadi hampir setiap tahun. Mulai ramai pada saat era otonomi daerah,” kata Solin menjelaskan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penanggungjawab pelaksanaan UN secara nasional juga kebanyakan laporan kecurangan itu. BSNP pun sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan instruksi terkait laporan yang masuk. “Kasus-kasus dalam pelaksanaan UN kemarin yang masuk ke BSNP cukup banyak. Termasuk yang dilaporkan tim pemantau independen. Kami memilah mana yang harus cepat direspon dan mana yang baru indikasi. Untuk mengecek yang sebenarnya terjadi, kami juga melaporkan ke Inspektoral Jenderal Depdiknas,” kata Sekretaris BSNP Suharsono.

Terkait kasus ini, Inspektorat Jenderal Depdiknas me-

ngirim tim untuk melakukan klarifikasi dan pengusutan. Irjen Depdiknas Muhammad Sofyan menegaskan akan menindak siapa saja yang terlibat kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Sementara anggota DPD asal Sumut, Parlindungan Purba, yang menemui komunitas Air Mata Guru di Jalan Sei Merah, Medan menyatakan akan membawa semua laporan beserta bukti kecurangan UN ke sidang paripurna DPD. “Ini serius dan kami mengusulkan dibentuk panitia khusus pengusutan kecurangan UN di Medan dan sekitarnya. Sayangnya tidak ada perlindungan saksi terhadap kasus ini, termasuk perlindungan saksi dari Irjen Depdiknas,” kata Purba.

Hal ini diungkapkan Purba terkait adanya tekanan dan intimidasi terhadap pelapor kecurangan UN. Setidaknya tujuh dari puluhan guru yang ikut melaporkan kecurangan itu mendapat intimidasi dari yayasan dan kepala sekolah masing-masing. Mereka berasal dari Binjai, Medan dan Tebing Tinggi. “Mereka sebagian diminta mencabut laporan pengakuan adanya kecurangan yang sebelumnya telah dibuat,” ujar Denny seperti dikutip *Kompas* (2/5).

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Ade Irawan mendesak pemerintah untuk berani mengumumkan kepada publik tentang kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN tahun ini berikut sanksinya. "Ini demi menegakkan prinsip transparansi pengelolaan dan memulihkan kepercayaan masyarakat serta menjamin efektivitas UN. Jika tidak, ini bisa menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan UN ke depan dan pelanggaran-pelanggaran itu akan tetap terjadi," katanya.

Sementara pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menilai, adanya kecurangan yang melibatkan birokrasi di daerah merupakan suatu bukti bahwa UN memberikan beban mental dan moral kepada semua pihak, termasuk unsur birokrasi di daerah. ■ **SP**

Heroes Musim Kedua Pahlawan Baru, Penjahat Baru

Rumor yang beredar, Heroes pada musim kedua akan menampilkan cerita baru dengan pahlawan dan penjahat baru pula. Bagi yang sudah terburu cinta berat dengan beberapa 'heroes' di musim pertama, jangan bersedih, sebab mereka akan muncul lagi dengan semangat yang baru.

Tim Kring nominator penghargaan Emmy (memproduksi Crossing Jordan dan Chicago Hope), memberikan sedikit bocoran kepada SCI FI Wire beberapa waktu lalu. "Volume pertama ditutup pada akhir episode 23 dan volume kedua dimulai sebagai awal dari musim kedua. Volume kedua mempunyai cerita yang berbeda. Kita akan mempunyai pemeran baru, alur cerita baru, penjahat baru dan pahlawan baru. Jadi saya ingin penonton bersiap untuk hal itu sebab Heroes bukan film serial bersambung yang menceritakan karakter lama. Heroes ceritanya lebih mirip model film '24' daripada film 'Lost'". Pernyataan Kring ini semakin membuat penonton penasaran. Kalau Heroes lebih mirip dengan "24", siapa yang menjadi Jack Bauer, karakter yang terus bertahan hingga akhir musim?

Apakah Jack Bauer itu adalah Hiro yang kini menjadi karakter paling simpatis di serial Heroes? Rumor yang beredar menyatakan bahwa Hiro dan keluar-

ganya akan kembali hadir di musim kedua sebab Hiro sekarang sudah menjadi fenomena dan tidak ada alasan bagi NBC untuk 'memecatnya'. Apalagi NBC sudah menyediakan *space blog* khusus untuk Hiro agar bisa menceritakan kesehariannya di blog.nbc.com/hiro_blog. Selain itu, kabarnya, dalam musim kedua, Hiro dikisahkan mulai menjalin hubungan cinta.

Bagi Anda yang belum tahu Heroes, ini sedikit ulasannya. Musim pertama Heroes mengeksplorasi kisah sekumpulan orang-orang biasa di beberapa tempat di dunia yang menyadari dan berusaha menerima bahwa mereka memiliki kemampuan super. Mereka kemudian bersatu menyelamatkan New York dari bencana. Di situ dikisahkan beragam karakter yang membuat penonton penasaran. Penonton menjadi bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada karakter-karakter dalam film ini dengan kekuatannya masing-masing. Misalnya Peter Petrelli (Milo Ventimiglia, Gilmore Girls), seorang perawat yang mempunyai kemampuan untuk



mengambil kekuatan sesama "heroes" yang ada di dekatnya. Seorang pemandu sorak bernama Claire Bennet (Hayden Panettiere, Ice Princess) menyadari dirinya memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri dalam sekejap. Seorang penari di Las Vegas bernama Niki Sanders (Ali Larter, Final Destination) mempunyai dua kepribadian, dan salah satunya adalah kepribadian super. Seorang seniman berbakat di New York bernama Isaac Mendez (Santiago Cabrera, Empire) dapat melukis masa depan, dan juga membuat komik 9th Wonders! yang menjadi panduan bagi Hiro Nakamura untuk menemukan kekuatannya. Polisi muda dari Los Angeles bernama Matt Parkman (Greg Grunberg, Alias) bisa membaca pikiran orang lain. Seorang

programmer dari Tokyo bernama Hiro Nakamura (Masi Oka, Scrubs) mengetahui dirinya bisa menghentikan waktu dan bisa berpergian ke banyak tempat sekehendak hati. Serta seorang karakter misterius, Sylar (Zachary Quinto), seorang antagonis yang memburu dan membunuh mereka yang mempunyai kekuatan spesial.

Dalam empat episode pertama menceritakan awal mula para 'heroes' menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan super dan perlahan-lahan belajar menyesuaikan diri dengan 'kemampuannya' itu dalam hidup sehari-hari mereka. Cerita terus dirangkai hingga mereka menyadari bahwa mereka ditakdirkan sebagai "heroes" untuk menyelamatkan umat manusia. ■ MLP

Segmen Penonton:

Film ini sangat cocok bagi pecinta film-film seri Amerika, apalagi yang tertarik dengan tema kekuatan super power. Film ini dibalut dengan nuansa Sci-Fi yang kental, karakter yang menawan, special efek yang sangat bagus, dan menghibur. Hati-hati bisa membuat kecanduan...

Media:

Film ini bisa ditonton lewat TV berlangganan Astro Channel 44 (Star World) dan DVD.

Mulai Tayang:

25 September 2006 (23 episode)

Produksi:

NBC Universal Television

Prestasi:

► People's Choice Awards 2006 untuk Serial TV Terbaik
► Dua nominasi Golden Globes untuk Serial TV Drama Terbaik, dan Aktor Pendukung Terbaik untuk Serial, Mini-Seri & TV Movie plus 11 nominasi lainnya.

Jadwal 3 Episode Terakhir Musim Pertama:

► Episode 21 (7 Mei) 'The Hard Part'
► Episode 22 (14 Mei) 'Landslide'
► Episode 23 (21 Mei) 'How to Stop an Exploding Man'

Info Detail:

<http://www.nbc.com/Heroes/>
<http://tv.com/show/17552/summary.html>
<http://www.heroesthetheseries.com/heroes-episode->



Presiden Bolivia Evo Morales di hadapan para pendukungnya.

Indonesia Bukan Bolivia

Langkah yang diambil Presiden Bolivia Evo Morales memang heroik. Pertanyaannya, apakah nasionalisasi ala Bolivia bisa berlaku di Indonesia?

Setahun yang lalu, Evo Morales menandai dimulainya sejarah baru di Bolivia. Dalam pidatonya menyambut hari Buruh sedunia di ladang minyak San Alberto, negara bagian Tajira di selatan Bolivia, Evo Morales, yang baru menduduki kursi presiden selama lima bulan membuat keputusan yang tidak pernah berani diambil oleh para presiden pendahulunya. Sebagai catatan, setidaknya dalam enam tahun terakhir sudah ada enam presiden di Bolivia yang datang dan pergi dalam waktu yang cepat. Dua presiden sebelumnya, Gonzalo Sanchez de Lozada dan Carlos Mesa diusir rakyatnya karena menempatkan diri sebagai pembela kepentingan korporasi asing, bukan kepentingan rakyat Bolivia.

Saat itu, Evo Morales mengungkapkan perusahaan minyak asing yang beroperasi di Bolivia untuk tunduk pada ketentuan proporsi kepemilikan yang akan ditetapkan pemerintah Bolivia. Selain itu, semua pen-

jualan produk mereka juga diatur pemerintah Bolivia. "Jika menolak, mereka kita persilakan keluar dari negeri ini. Saat ini, penjarahan sumber alam kita oleh perusahaan asing telah berakhir," katanya. Morales berprinsip, "Tak ada yang diberikan kapitalisme kepada rakyat Bolivia, kecuali kemiskinan dan penindasan."

Morales kemudian memberikan tenggat waktu enam bulan kepada perusahaan-perusahaan asing tersebut. Tetapi, sehari setelah pidatonya itu, militer dan petugas dari badan energi Bolivia menduduki 56 ladang gas dan minyak serta instalasi penyulingan di seluruh negeri. Dekrit Presiden Nomor 28701 tentang nasionalisasi industri migas diterbitkan. Isinya antara lain, cadangan minyak dan gas Bolivia dinasionalisasi; 51 persen saham pemerintah yang pernah diprivatisasi di lima perusahaan migas pada tahun 1990 diambil kembali; seluruh perusahaan migas asing harus menyetujui kontrak baru yang ditentukan Yaciementos Petrol-

feros Fiscales Bolivianos (YPFB), perusahaan negara milik Bolivia dalam tempo 180 hari; gabungan pajak dan royalti yang diserahkan perusahaan gas asing yang memproduksi lebih dari 100 juta kaki kubik dinaikkan menjadi 82 persen dari sebelumnya yang hanya 50 persen dan mula-mula hanya 30 persen; Pemerintah Bolivia melakukan audit investasi dan keuntungan semua perusahaan migas asing di Bolivia untuk menentukan pajak, jumlah royalti dan ketentuan operasi di masa depan; dan tak kalah penting, migas hanya boleh diekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia dipenuhi. Jika tidak setuju isi dekrit, perusahaan asing itu dipersilakan meninggalkan Bolivia. Dekrit Presiden itu rupanya sanggup membuat semua korporasi besar yang beroperasi di Bolivia tunduk dan meneken kesepakatan akhir Oktober 2006.

Setahun setelah dikeluarkannya dekrit presiden itu, Evo Morales mengumumkan bahwa negara sudah mengontrol semua bisnis asing, khususnya migas. Dengan pengumuman Morales itu, perusahaan minyak negara Bolivia, YPFB (mirip Pertamina) mengontrol semua kekayaan alam

dan gas. Sebanyak 12 perusahaan minyak asing juga langsung menandatangani kontrak baru antara lain Repsol YPF SA (Spanyol-Argentina), Petrobras (Brasil), Total-Fina-Elf (Perancis Belgia), dan British Gas (Inggris).

Tidak Cocok Untuk Indonesia

Selama ini di Indonesia (sebagian orang, red) sudah terbentuk kepercayaan bahwa kontrak karya migas dan non-migas dengan perusahaan asing tidak bisa diubah. Kepercayaan ini bisa jadi didasarkan pada rasa tidak percaya diri akan kemampuan sendiri. Jika menuntut negosiasi ulang, apalagi nasionalisasi industri migas dan pertambangan, Indonesia bisa dikucilkan masyarakat internasional dan investasi asing ogah masuk Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat dibawa ke arbitrase internasional dan rugi miliaran dolar AS karena berani mengotak-atik, bahkan menuntut negosiasi ulang berbagai kontrak karya dan bagi hasil yang telah ditandatangani.

Namun apa yang dipercayai oleh Indonesia ini, tidak berlaku bagi Bolivia. Evo Morales malah menyatakan dengan tegas menutup pintu bagi penye-

lesaian sengketa dengan perusahaan asing melalui peran afiliasi Bank Dunia, International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Meski perusahaan asing mengkritik Morales yang mundur dari arbitrase internasional, Morales mengancam perusahaan asing secara halus, "Kami dengan niat baik, menolak tekanan hukum, kampanye lewat media dan tekanan lewat jalur diplomasi yang jelas telah menolak kedaulatan negara lewat ancaman dan mencoba menggunakan arbitrase internasional." Sikap tegas dan keputusan Evo Morales ini membuktikan bahwa kontrak kerja sama migas bukan hal yang tabu untuk diubah. Indonesia bisa juga melakukannya.

Menurut pengamat permilyanan, Dr Kurtubi, seperti yang dikutip *Harian Kompas*, ada klausul di dalam kontrak kerja sama yang menyatakan bahwa apa pun yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, kedaulatan negara ada di atas semua itu. Ia mengatakan bahwa bila negara ingin menguasai secara dominan seluruh tambang migas juga dimungkinkan karena dalam kontrak bagi hasil (PSC) standar kedaulatan negara ada di atas kontrak. Selain itu, ada kalimat di klausul PSC yang dengan jelas memberi hak hukum pada Indonesia. Dalam klausul itu tertulis bahwa pada setiap kontrak, tidak boleh ada pihak yang memiliki kesempatan membawa sengketa bisnis ke arbitrase internasional. Setiap kontrak juga tidak boleh mencegah atau membatasi Pe-

merintah Indonesia untuk mengutamakan kepentingannya. Oleh karena itu, dengan klausul itu, Indonesia relatif aman dari kemungkinan dibawa ke arbitrase internasional.

Lalu mengapa Indonesia tidak mengikuti jejak Bolivia? Pemerintah rupanya punya pemikiran tersendiri. Menurut Wapres Jusuf Kalla (4/5), apa yang dilakukan Bolivia tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Selain strateginya yang berbeda, produksi migas Bolivia juga sangat kecil, yaitu 43.000 barrel per hari. Bandingkan dengan Indonesia yang produksi migasnya hingga jutaan barrel per hari. Menurut data BP Migas realisasi produksi migas Indonesia pada tahun 2002 sebesar 2,937 juta barrel per hari (bph), tahun 2003 mencapai 2,901 juta bph, tahun 2004 sebesar 2,832 juta bph, tahun 2005 sebesar 1,075 juta bph, dan tahun 2006 rata-rata sebesar 1,006 juta bph.

Oleh karena itu, kebijakan nasionalisasi kurang menguntungkan bagi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. Jangka pendek, kebijakan nasionalisasi perusahaan migas memang bisa dinilai heroik, akan tetapi jangka panjang kebijakan itu bisa menjadi masalah di luar negeri. Menurut Kalla, pola yang dipakai Indonesia dengan kontrak karya pola 85-15 persen justru sering menjadi acuan di banyak negara karena dianggap itu sangat baik. Wapres mencontohkan apa yang terjadi di Kuba, Libya, Myanmar atau Korea Utara. ■ MLP

Menepis Bayang-Bayang Masa Lalu

Langkah Nikolas Sarkozy masih terantuk batu. Bayang-bayang kerusuhan 2005 mulai mengintai.

Dua tahun terakhir ini Perancis diterpa berbagai persoalan. Maraknya kerusuhan sosial, memburuknya ekonomi dan politik, dan pudarnya pengaruh Perancis di panggung internasional membuat Perancis membutuhkan pemimpin baru dengan pikiran baru. Setuju atau tidak setuju, harapan Perancis itu kini jatuh di pundak Nikolas Sarkozy setelah dalam pemilu pemilihan presiden putaran kedua, ia berhasil memupuskan harapan saingannya Segolene Royal (53) dari Sosialis untuk menjadi presiden perempuan pertama di Perancis. Sarkozy memperoleh 53 persen suara, sementara Royal 47 persen. Setelah lebih dari 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jacques Chirac (74), masyarakat Perancis memiliki dua kandidat yang sama-sama berasal dari generasi politisi yang lebih muda.

Sarkozy, putra seorang imigran asal Hungaria ini berhasil mengguguli Royal karena dianggap memiliki sikap, rencana, dan konsep yang jelas tentang arah tujuan Perancis selanjutnya. Sarkozy berikrar bahwa ia akan "mewujudkan impian" dan menegakkan kembali pandangan nilai "moral", "kerja" dan "otoritas". Ia menyatakan pula akan berupaya mendorong pembangunan Eropa dan meningkatkan hubungan dengan AS. Hubungan Amerika Perancis menjadi dingin tahun 2003 karena Paris menolak mendukung perang di Irak.

Kemenangan Sarkozy ini menyisakan sejumlah ganjalan sebab kubu kiri dan masyarakat keturunan imigran sudah keburu mencapnya sebagai "sosok pemecah belah". Ucapannya yang menyebut remaja yang nakal sebagai "kaum gembel" membuat sakit hati warga minoritas keturunan Arab dan Afrika. Padahal salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya termasuk untuk kalangan minoritas tersebut. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja Perancis hingga akhir November 2006, tingkat pengangguran mencapai 2,11 juta orang. Minimnya akses pada lapangan pekerjaan menyebabkan



Nikolas Sarkozy

sedikitnya 600.000 orang dari enam juta Muslim di Perancis hidup miskin. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, dan penjaga toko.

Sebelum pemilu putaran kedua digelar, Segolene Royal telah memperingatkan aksi kekerasan akan pecah jika Sarkozy terpilih. Ini tak lepas dari perangai dan kebijakannya yang keras dalam memperlakukan imigran. Kekhawatiran Royal terjadi juga. Aksi kekerasan memprotes terpilihnya Sarkozy melanda Perancis semenjak diumumkannya hasil pemilu. Aksi kekerasan pecah di Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Rennes, Toulouse, dan Trappes. Setidaknya 592 orang ditahan dan 730 kendaraan dibakar massa. Mereka juga merusak pertokoan dan fasilitas umum. Situasi ini membangkitkan ingatan pada kerusuhan 2005.

Terpilihnya Sarkozy juga tidak mendapat sambutan dari beberapa negara. Rusia menjadi satu-satunya negara adikuasa yang belum memberikan ucapan selamat. Pengamat menilai diamnya Kremlin merupakan pesan tersendiri bagi Sarkozy yang pro-Amerika. Media cetak Rusia juga menunjukkan reaksi yang sama dengan pemerintah. Begitu juga dengan media massa Jepang. Sarkozy pada 2004 mengusurkan pemerintah dan rakyat Jepang dengan komentarnya yang tidak mengenakkan telinga mengenai sumo. Sarkozy memang kontroversial. Pernyataannya yang pedas dan kebijakannya keras membuat beberapa pihak tidak suka kepadanya. Tantangan terbesar Sarkozy saat ini adalah meredam aksi kekerasan dan membuktikan dia adalah orang yang tepat memimpin Perancis. ■ MLP



Para pemimpin berhaluan kiri, Morales, Lula, dan Hugo Chavez.



AC Milan memburu gelar ke tujuh Liga Champions.

Final Piala Champions Antara Dendam dan Harapan

Final Piala Champions musim ini menjadi ajang paling ditunggu jutaan pecinta bola dunia. Akankah tim *The Reds*-Liverpool bisa menyamakan prestasinya dengan tim *Rossoneri*-AC Milan yang telah enam kali menjuarai Piala Liga Champions, atau malah AC Milan yang akan menambah pundi-pundi gelarnya.

Puncak final Piala Champions 2006/2007 akan diadakan di Stadion Olimpiade Athena, Yunani Rabu 23 Mei. Pertandingan final antara AC Milan dan Liverpool ini menjadi tambah menarik mengingat kedua tim merupakan wakil dari dua negara raksasa bola Eropa, Inggris dan Italia.

Bagi AC Milan sendiri, pertemuan kali ini bertambah penting sebagai ajang menebus kekalahannya dari Liverpool di final Piala Champions musim 2004/2005 di Istanbul, Turki. Kala itu AC Milan kalah melalui adu penalti dengan skor 2-3. Sebaliknya, bagi Liverpool, kesempatan ini justru dimanfaatkan untuk mengulang sukses tersebut. Dengan demikian, *The Reds* berharap, perolehan trofi mereka nanti sejajar dengan AC Milan, yakni

enam kali menjuarai kompetisi antarklub paling bergengsi di dunia tersebut. Dorongan kepada AC Milan untuk menuntaskan dendam terhadap Liverpool diberikan bos AC Milan, Silvio Berlusconi, yang juga mantan Perdana Menteri Italia. "Liverpool tim bagus, kami berkesempatan bisa membalas kekalahan atas final dua tahun lalu. Kami akan main habis-habisan untuk raih kemenangan dan tidak akan ada kesempatan untuk adu penalti," ujar Berlusconi seperti dikutip *La Gazzetta dello Sport*.

Di luar motivasi tersebut, hadiah uang juga menjadi motivasi yang tak kalah penting untuk menjuarai Liga Champions. Keluar sebagai juara sudah pasti akan menambah pundi-pundi keuangan klub. Barcelona misalnya, sebagai

juara Liga Champions 2005/2006 bisa memboyong uang ke markasnya sebesar 31,5 juta euro atau setara dengan Rp. 381,15 miliar. Juara tahun ini kemungkinan besar akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi.

Dari segi prestasi, AC Milan dan Liverpool merupakan langganan juara Liga Champions setelah Real Madrid dan Juventus. Sejak pertama kali kejuaraan ini diadakan pada tahun 1955/1956, AC Milan telah enam kali keluar sebagai juara, yakni pada tahun 1963, 1969, 1989, 1990, 1994 dan 2003. Liverpool juga telah lima kali menjadi juara, yakni tahun 1977, 1978, 1981, 1984, dan 2005. Sementara rekor tertinggi masih dipegang Real Madrid, klub asal Spanyol dengan sembilan kali juara.

Final kali ini bertambah menarik lagi taklaka menelusuri kilas balik perjalanan kedua tim menuju babak akhir. Sebelumnya, AC Milan dan Liverpool bukanlah dua tim yang paling dijagokan bertemu di putaran final. Prediksi demikian tidak berlebihan terutama ketika di semifinal mereka harus bertemu dengan dua tim tangguh dari Inggris, Manchester United dan Chelsea. Namun sepanjang bola masih bundar, prediksi tetaplah hanya prediksi. Kenyataan harus ditunggu setelah 90 menit berlaga di lapangan hijau.

Hal tersebut dibuktikan oleh AC Milan dan Liverpool pada semifinal akhir April lalu. Liverpool di semifinal pertama, dikalahkan Chelsea 1-0. Namun pada semifinal kedua, satu gol yang dilesatkan Liverpool ke gawang Chelsea lewat Daniel Angger membuat kedudukan sampai menit ke 90 menjadiimbang, dengan agregat 1-1. Pertambahan waktu 2 kali 15 menit tetap tidak mengubah kedudukan. Pertandingan akhirnya harus diselesaikan dengan adu penalti. Dalam adu penalti, Steven Gerrard dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Chelsea 4-1. Dengan demikian, tim asuhan Rafael Benitez itu berhasil menundukkan Chelsea dengan nilai agregat 5-2.

Kepastian Liverpool maju ke babak final setelah mengalah-

kan Chelsea yang sebelumnya dijagokan, menjadi motivasi tersendiri bagi AC Milan melawan Manchester United di putaran semifinal kedua. AC Milan sebelumnya pada semifinal pertama mengalami kekalahan dari "setan merah" Manchester United 2-3. Tapi pada pertemuan semifinal kedua di San Siro Italia, dengan semangat pantang menyerah, anak-anak asuhan manajer Carlo Ancelotti ini berhasil mengalahkan Manchester United dengan memasukkan tiga gol tanpa balasan lewat Kaka, Clarence Seedorf dan Alberto Gilardino. Kedudukan 3-0 sampai akhir pertandingan mengantarkan AC Milan ke final dengan nilai agregat 5-3. Kehadiran AC Milan di final kali ini diibaratkan sebagai orang sebagai 'kebangkitan seorang kesatria yang terluka' mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi tim ini sejak awal kualifikasi.

Dalam laga nanti, kedua tim dipastikan akan bermain habis-habisan sebab tinggal gelar Piala Championslah satu-satunya yang diharapkan kedua tim pada musim ini. Di liga domestik, baik AC Milan maupun Liverpool tidak memiliki harapan untuk bisa meraih juara. Di Serie A Italia, kesempatan sudah tertutup untuk AC Milan. Trofi *scudetto* telah direbut sang juara bertahan Inter Milan. Demikian juga di Liga Premier Inggris. Dengan sisa pertandingan yang ada, Liverpool sudah hampir dipastikan hanya bisa menduduki posisi ketiga atau keempat di bawah Manchester United yang sudah memastikan diri menjadi juara Liga Premier Inggris.

Secara kualitas dan pengalaman, kedua tim berimbang. Jika AC Milan bisa mempertahankan kondisi permainan gemilangnya ketika mengalahkan MU, dan sejauh Rafael Benitez, pelatih Liverpool, bisa menerapkan kepada anak-anak asuhnya untuk tetap konsisten bermain tanpa menyerah disertai serangan balik yang tajam, maka partai final ini akan menjadi tontonan sangat sayang untuk dilewatkan. ■ **MS, RIF**

Tangis Ki Hajar Dewantara

Cita-cita pendidikan masih jauh dari kenyataan, bahkan di dalam praktiknya semakin banyak anomali. Prinsip asih, asuh, dan asah yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara jadi aktual kembali untuk merengkuh tujuan hakiki pendidikan, yaitu meningkatkan mutu manusia Indonesia agar cerdas dan berakhlak mulia.

Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tanggal 2 Mei, diulas di dalam hampir semua tajuk rencana harian ibu kota, Jakarta. Pada hari yang sama (2/5), harian *Kompas* menyoroti makin banyaknya anomali—penyimpangan atau tidak normalnya—praktik pendidikan di Indonesia. Tidak hanya menyangkut soal ujian nasional, tetapi juga pemberlakuan disiplin dengan kekerasan fisik.

Menurut koran sangat berpengaruh ini, anomali pendidikan perlu dikembalikan kepada semangat dasar pendidikan yang berorientasi pada anak didik. Prinsip asih, asuh, dan asah yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara niscaya aktual kembali di tengah tantangan global. Tiga acuan kebijakan yang perlu diterapkan, yaitu mengembangkan peserta didik belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, dan belajar untuk hidup bersama.

Tajuk *Media Indonesia* menyoroti pendidikan dari sudut anggaran. Koran ini mengulas gugatan PGRI kepada Mahkamah Konstitusi agar gelar uji material terhadap UU APBN 2007 yang menetapkan anggaran pendidikan 11,8%, MK sendiri sudah dua kali mengingatkan pemerintah agar bersungguhsungguh memenuhi porsi 20% anggaran pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Karenanya, MK tanpa ragu memutuskan bahwa alokasi anggaran yang tidak genap 20% menyalah UUD.

Namun menurut *MI*, Mahkamah tidak tegas menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar UUD. Hanya memberi peringatan agar pemerintah bersungguhsungguh melaksanakan perintah konstitusi. *MI* berpendapat, seharusnya perintah konstitusi, apalagi yang sangat eksplisit, tidak bisa multitafsir. Ketidakmampuan memenuhi perintah UUD adalah pelanggaran berat, bahkan sangat berat.

MI memaklumi persoalan yang dihadapi pemerintah, seperti memakan buah simalakama. Memenuhi anggaran pendidikan 20%, berarti melabrak rasionalitas potensi riil keuangan negara, sedangkan mengabaikannya sama artinya mengkhianati konstitusi. Namun menurut *MI*, persoalan besar dalam pendidikan negeri

ini tidak semata-mata menyangkut persentase anggaran. Persoalan sesungguhnya, bahkan yang terutama, justru pada orientasi penggunaan uang demi tujuan hakiki pendidikan itu sendiri, yaitu meningkatkan mutu manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam percaturan global.

Saran *MI*, kalau pemerintah sungguh-sungguh berjuang tulus meningkatkan mutu pendidikan nasional, dari pada membangun kantor sebuah direktorat yang menyaingi kemewahan *supermall*, mengapa tidak membangun sistem jaringan komputer ke sekolah-sekolah supaya anak didik mulai memiliki akses global.

Sedangkan *Bisnis Indonesia* dalam tajuknya mengulas masalah pendidikan dari sudut pemerataan. Hari kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, 2 Mei (1889) diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Artinya perguruan Taman Siswa yang didirikan tokoh pendidikan yang bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat itu, telah melahirkan banyak calon pemimpin negeri.

BI hanya mengingatkan bahwa kerja keras Ki Hajar di dalam dunia pendidikan belum mampu mengangkat bangsa agar sepenuhnya mandiri di bidang pendidikan. Saat ini, betapa banyak anak yang belum atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Indikatornya jelas. Di kota besar, banyak anak yang berkeliaran pada jam sekolah. Sebagian dari mereka tampak lusuh dan mengemis. Di tempat lain, masih banyak anak yang belajar di alam terbuka lantaran bangunan sekolah yang sudah reot atau ambruk.

Di pendidikan tinggi pun cukup banyak terjadi ketimpangan, terlebih setelah status sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di negeri ini diubah menjadi badan hukum milik negara (BHMN). Kini, dengan kecerdasan di atas rata-rata pun, tamatan SLTA yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah akan sangat kesulitan untuk kuliah di PTN tersebut. PTN favorit terkesan hanya menerima anak dari keluarga mampu. Dari alam sana, Ki Hajar Dewantara mungkin menanggapi betapa upaya yang dirintisnya kini nyaris tidak berlanjut. Tulis *BI*, pendidikan bagi rakyat jelata yang diimpikannya belum juga menjadi kenyataan.



Harian sore *Sinar Harapan* menyoroti pendidikan yang dikaitkan dengan undangan UNESCO kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan pidato kunci pada pembukaan sidang umum badan tersebut. UNESCO mengundang Presiden Susilo lantaran Indonesia dinilai sukses melaksanakan komitmen pendidikan untuk semua, sebagaimana tercantum dalam *Millenium Development Goals*.

Tulis *SH*, pengakuan UNESCO tersebut sangat menggembirakan. Namun itu bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan di bidang pendidikan. Masih banyak yang harus dibenahi supaya bangsa Indonesia mampu membangun, memajukan, memelihara dan menjaga kewibawaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir bangsa ini dilecehkan dan dipaksa mengikuti kehendak negara lain, seperti dalam kasus Timor-Timur dan Sipadan-Ligitan.

Negara lain bisa memaksakan kehendak karena bangsa ini dianggap lemah; di dalam kekuatan militer, perekonomian, kesiagaan, dan kelekatan sosial. Salah satu sebab dari kelemahan itu, berpangkal pada bidang pendidikan yang tidak bisa menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.

SH menganggap kecerdasan dan akhlak harus berkaitan sebab para koruptor dan mitranya dalam pemerintahan pun terdiri dari orang-orang yang pandai namun tak berakhlak. Pendidikan juga mesti mampu menyadarkan bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kepemilikan harta yang melimpah dengan cara-cara tidak benar. ■ **MS, SH**

Mengenal Kehebatan Web

Tahun ini Web 2.0 akan makin bersinar. Semua pengelola situs, baik pribadi maupun korporat berlomba-lomba mengadopsi aplikasi-aplikasi berbasis Web 2.0 yang merevolusi cara kita menggunakan internet.

Lima belas tahun yang lalu, internet bisa diibaratkan lautan situs yang berisi teks, angka dan foto dimana hanya si empunya situs yang boleh mengubah isinya. Situs-situs statis yang biasanya berakhiran .html ini hanya berfungsi sebagai pemberi informasi. Seiring dengan berkembangnya bahasa pemrograman khusus web, situs-situs dinamis mulai bermunculan. Situs-situs ini ada yang berakhiran .php, .asp, .js, dan sebagainya. Berkembang pula CSS (Cascading Style Sheets) – berupa kode/tag untuk mendesain tampilan halaman web lebih dinamis – yang memungkinkan pembuat situs bisa mengubah desain tanpa mengganggu konten (isi situs). Saat itu maraklah istilah *Content Management System* (CMS). Masing-masing *developer* saling mengklaim bahwa aplikasi CMS buatannya canggih dan lengkap. Siapa saja asalkan memiliki *username* dan *password* untuk *login* bisa memuat tulisan dan foto ke dalam sebuah situs. Realita di

dunia web saat itu masih dilabeli Web 1.0.

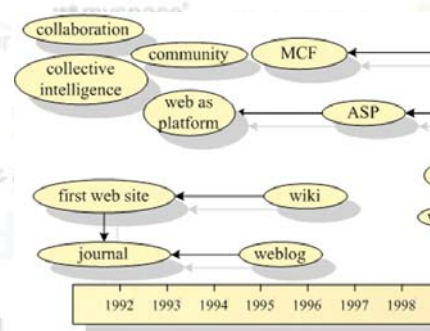
Nah, dua tahun terakhir ini, mencuat istilah baru, Web 2.0 yang sering kita baca di berbagai media. Apa itu Web 2.0? Web 2.0 adalah sebuah evolusi di dunia internet dimana siapa saja bisa berpartisipasi menjadi pemberi informasi dalam sebuah situs. Pemilik situs hanya menjadi fasilitator saja. Dalam perkembangan selanjutnya, Web 2.0 sudah bisa menyediakan aplikasi-aplikasi *office*, *pengolah video*, *kalculasi tabel*, dan berbagai aplikasi lainnya yang berfungsi dalam *browser* tanpa perlu meng-*install* aplikasi-aplikasi tersebut dalam PC.

Agar lebih mudah memahaminya, coba tengok situs ensiklopedia terlengkap di jagad maya yang masih berbasis Web 1.0, Britannica Online. Seluruh konten situs dipegang oleh pihak Britannica sendiri. Sedangkan ensiklopedia ala Web 2.0 yang kini sudah banyak dikenal dan menjadi referensi banyak siswa dan mahasiswa adalah Wikipedia. Dalam situs ini,

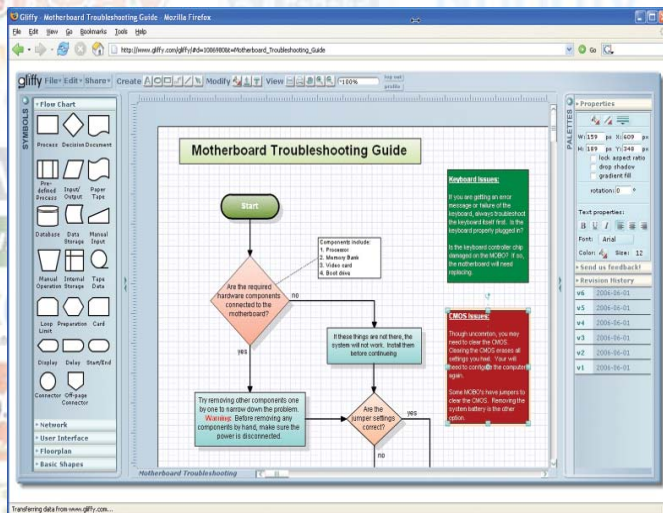


semua pengunjung bisa memberikan sumbangan, mengoreksi, dan melengkapi artikel-artikel yang ada di dalamnya. Kolaborasi dan partisipasi dari pengunjung situs juga terlihat pada situs MySpace dan YouTube. Saking inovatifnya, situs yang masing-masing dibangun oleh sepasang remaja ini dihargai gila-gilaan oleh investor kakap. Situs MySpace yang menjadi pionir situs komunitas pertemanan (seperti Friendster) dibeli oleh Rupert Murdoch, salah satu raja media. Situs YouTube, yang konsepnya diadaptasi dari acara televisi America's Funniest Home Videos, dimana setiap anggota bebas memamerkan videonya, kini sudah menjadi milik Google.

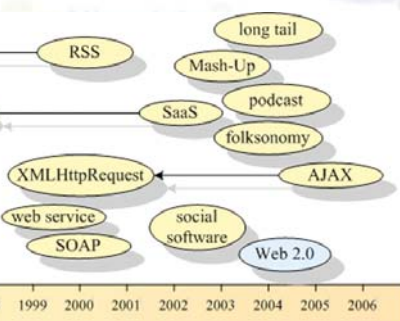
Google sendiri yang terkenal dengan sistem pencariannya yang hebat namun terlihat sederhana, tidak mau ketinggalan memanfaatkan kemajuan teknologi di era Web 2.0.



Google sudah menawarkan aplikasi *office* berbasis web, Google Docs & Spreadsheets. Di manapun kita berada, di komputer apapun, asalkan ada koneksi internet dan *browser*, kita bisa mengedit dokumen Word dan Excell dengan mudah. Lewat *browser*, halaman kerja untuk mengetik muncul lengkap dengan *toolbar* standar seperti *bold*, *italic*, mengubah jenis huruf, merubah warna, membuat tabel, memasukkan gambar, dan se-



Web 2.0



bagainya. Tidak hanya aplikasi *office*, aplikasi lain pun sudah bermunculan seperti aplikasi *video editor* dari Eyespot atau aplikasi pembuat diagram dari Gliffy. Bahkan sudah ada pula sistem operasi mirip Windows yang berjalan dalam *browser*, misalnya YouOS dan DesktopTwo.

Ebay dan Amazon juga tidak mau ketinggalan. Ebay memanfaatkan pengguna untuk layanan jual beli melalui internet di mana penjual dapat

dinilai oleh pembeli-pembeli secara *online*, sedangkan Amazon merupakan situs *e-commerce* yang memanfaatkan respon *user* untuk menghasilkan pencarian produk yang lebih sesuai serta memberikan informasi produk melalui fasilitas *review*.

Semuanya itu dimungkinkan dengan memanfaatkan teknik pemrograman yang “ringan” seperti AJAX dan RSS. AJAX (Asynchronous Java Script and XML) merupakan kombinasi antara bahasa program XML dan JavaScript yang memungkinkan aplikasi web menjadi lebih interaktif dan kaya fitur sehingga menyerupai kemampuan aplikasi *desktop*. Dengan AJAX, kita dapat menulis *script* untuk berkomunikasi dengan server di latar belakang. Dengan begitu, situs tidak perlu selalu di-load ulang. Selain memanfaatkan AJAX, situs web 2.0 juga menggunakan teknologi *flex* (aplikasi *rich internet* berbasis *flash* dari Macromedia yang sekarang sudah dimiliki Adobe) dan *lazlo* (platform aplikasi *flash open source*).

Sedangkan RSS merupakan suatu teknologi yang memungkinkan ringkasan sebuah situs diakses tanpa perlu langsung mengunjungi situs bersangkutan. Kita hanya membutuhkan sebuah aplikasi berbasis *web* atau aplikasi *desktop* untuk menampilkannya dan membaca *web feed* (sebuah file yang memuat ringkasan sebuah website) dari website yang kita inginkan. Artinya, kita bisa membaca isi berbagai situs dalam satu waktu sekaligus tanpa perlu membuka situs-situs itu satu per satu.

Kehebatan Web 2.0 masih terus dieksplorasi dan dikembangkan. Tidak tertutup kemungkinan, di masa depan, semua aplikasi yang kini bercokol di *desktop*, bermigrasi ke *platform internet*. Cukup lewat *browser*, orang bisa menyelesaikan pekerjaan kantor, mendengar lagu, menonton film, bahkan membuat film. Peluang membuat bisnis baru di internet pun pasti semakin lapang. ■ MLP

Ciri-ciri Web 2.0

Sebuah artikel berjudul *What is Web 2.0* karangan Tim O'Reilly (salah satu pencetus istilah Web 2.0) bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ciri-ciri aplikasi Web 2.0.

The Web as Platform

Aplikasi Web 2.0 menggunakan *Web* (atau Internet) sebagai *platform*-nya. Ibarat menggunakan Adobe Photoshop sebagai aplikasi dan Windows XP sebagai platform. Aplikasi-aplikasi Web 2.0 dijalankan langsung di atas Internet dan bukan di atas satu sistem operasi tertentu. Selain tidak dibatasi oleh sistem operasi, kita tidak perlu meng-*install* apapun untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini.

Harnessing Collective Intelligence

Aplikasi Web 2.0 memanfaatkan keahlian dan kepintaran dari banyak orang secara kolaboratif misalnya ensiklopedia online Wikipedia. Di situ semua orang bisa terlibat membuat dan mengedit artikel dengan tetap menuruti peraturan yang dibuat oleh Wikipedia.

End of the Software Release Cycle

Aplikasi Web 2.0 berbeda dengan aplikasi yang selama ini kita kenal di lingkungan Windows. Aplikasi berbasis Windows biasanya mengalami perbaruan dalam rentang waktu tertentu misalnya 1-2 tahun sekali. Misalnya Photoshop 5, 7, CS, CS2, CS3. Sedangkan aplikasi Web 2.0 selalu diperbaharui secara kontinyu karena sifatnya yang bukan lagi produk melainkan layanan. Pengguna tinggal menikmati tanpa repot-repot meng-*install* aplikasi tersebut di komputer mereka.

Lightweight Programming Models

Aplikasi Web 2.0 menggunakan teknik-teknik pemrograman yang “ringan” seperti AJAX dan RSS. Oleh karena itu, orang lain bisa membuat layanan baru berkolaborasi dengan situs induk. Layanan seperti ini, yang menggabungkan layanan dari aplikasi-aplikasi lainnya, dikenal dengan istilah *Mashup*. Mashup merupakan aplikasi yang dapat mencampur konten-konten yang ada menjadi sebuah tawaran baru. Misalnya, Geo-tagging pada portal foto Flickr menunjukkan seberapa besar kemampuan Web 2.0. Pengguna melihat sebuah foto liburan yang indah, mengkliknya dan melalui Google Maps langsung tiba di lokasi tersebut serta memesan hotel di sana. Jika informasi dari berbagai database bertemu, tersedia banyak kemungkinan yang samasekali baru.

Software Above the Level of a Single Device

Aplikasi Web 2.0 bisa berjalan secara terintegrasi melalui berbagai *device*. Contoh sederhananya, kita bisa memasukkan lagu-lagu MP3 ke iPod lewat *software* iTunes yang berkolaborasi dengan situs iTunes (toko musik *online*).

Rich User Experiences

Aplikasi Web 2.0 menawarkan kepada pengguna tampilan menu yang lengkap dan tidak kalah dengan aplikasi versi Windows meskipun berjalan di dalam browser. Teknologi AJAX memungkinkan semuanya itu. Sekarang kita tidak perlu lagi heran ketika membuka e-mail di internet, kita akan membuka Outlook di Windows. Contohnya Gmail. ■

Rachmawati Soekarnoputri

Melanjutkan Perjuangan Bung Karno



Rachmawati Soekarnoputri

foto: ist

Dia ingin meneruskan cita-cita presiden pertama RI. Menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saat menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Pelopor yang dirintisnya sejak awal, Diah Prama Rachmawati Soekarnoputri tak dapat menahan haru. Ucapannya terhenti beberapa jenak. Seorang stafnya mengulurkan saputangan. Rachmawati menyusut matanya yang basah, lalu menyelesaikan pernyataannya dengan suara liris.

Tentu amat berat meninggalkan partai yang susah payah didirikan dan dibesarkannya itu dengan serta merta. Namun hal itu harus dilakukan sebagai konsekuensi undang-undang saat dirinya diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) beberapa waktu lalu.

Jabatannya sebagai anggota Watimpres tidak serta merta diterimanya, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Menurutnya, jabatan itu bahkan sudah ditawarkan SBY sejak masih menjadi calon presiden pada putaran pertama Pilpres 2004.

Dalam berbagai kesempatan, Rach-

mawati gencar mengkampanyekan pemikiran Bung Karno. Dan dengan jabatannya saat ini, dia yakin justru lebih mudah baginya untuk mengkampanyekan pemikiran sang proklamator. Menurutnya, yang belum tercapai saat ini adalah pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, yang merupakan pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Trisakti, Bung Karno menjabarkan bahwa Indonesia mesti menjadi negara yang berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Rachmawati berpendapat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan. Salah satu tujuan dibentuknya Watimpres memang untuk menjawab perlu tidaknya amandemen UUD 1945.

Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan mantan Presiden RI pertama Soekarno dengan Fatmawati itu dikenal paling giat mengusung ajaran ayahnya. Diantara putera puteri Bung Karno, dialah memang yang paling dekat dengan ayahnya.

Ketika almarhumah ibunya, Fatmawati,

meninggalkan istana, sebagai protes atas pernikahan Bung Karno dengan Hartini, dia masih berusia tiga tahun, pada 1953. Sejak itu dia diasuh ibu angkatnya, Bu Hadi, wanita asal Solo, dan sangat lekat dengan ayahnya. Tak heran jika sifat-sifat Bung Karno kemudian membentuk pribadinya.

Mulai Diperhitungkan

Sejak kecil, Rachmawati senang membaca dan menyimak pidato-pidato ayahnya. Hubungan mereka semakin erat saat Bung Karno dikarantina di Wisma Yaso. Pulang sekolah, dia selalu menyempatkan diri menjenguk ayahnya. Pada kesempatan itu mereka kerap bersenda gurau, bertukar pikiran bahkan berdiskusi.

Meski diwarnai diskusi-diskusi politik dengan sang ayah, masa kecil dan masa remaja Rachmawati juga penuh dengan berbagai kegiatan. Dia belajar menari Jawa, Sunda, dan Sumatera. Olah raganya anggar, renang, dan bulu tangkis. Semula ia bercita-cita menjadi dokter, tetapi ia lulus SMA jurusan sosial. Akhirnya ia kuliah di Fakultas Hukum UI, 1969.

Momen yang paling menyedihkan dalam hidupnya adalah saat ayahnya meninggal dunia. Rasa syoknya bahkan membuatnya nyaris tak bisa menangis. Dia telah kehilangan orangtua, tongkat, masa depan, dan teman paling erat dalam batinnya.

Sejak itulah, Rachmawati bertekad menjaga nama besar ayahnya dan melestarikan ajaran Sang Proklamator RI.

Perhatiannya pada dunia pendidikan, mendorongnya mendirikan Yayasan Pendidikan Soekarno sejak tahun 1980-an. Dia juga berhasil mendirikan Universitas Bung Karno (UBK) pada tahun 1999, meski awalnya sempat dipersulit pemerintahan Orde Baru.

Meski secara persaudaraan baik-baik saja, di dunia politik pertentangan tajam antara Rachmawati dan Megawati sudah diketahui publik. Rachmawati menyatakan bahwa dia 'anak ideologis' Bung Karno, sedangkan Megawati 'anak biologis'.

Dibanding kakaknya, Megawati, Rachmawati awalnya memang dianggap belum cukup berpengalaman di bidang birokrasi. Kini namanya mulai masuk hitungan saat diangkat sebagai anggota Watimpres. Wacana pencalonan dirinya sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009 pun mulai bergulir. Namun dengan rendah hati diiringi senyum manis, Rachmawati menyatakan dirinya masih belum bisa berkomentar. ■ RH

Opera Jawa Film Asia Terbaik

Film Opera Jawa meraih penghargaan Film Asia Terbaik 2007 di ajang Festival Film Internasional Singapura (FFIS) ke-20. Film karya Garin Nugroho itu masuk dalam 11 film yang dikompertisikan, setelah melewati seleksi dari 300 film yang dikirim 45 negara.

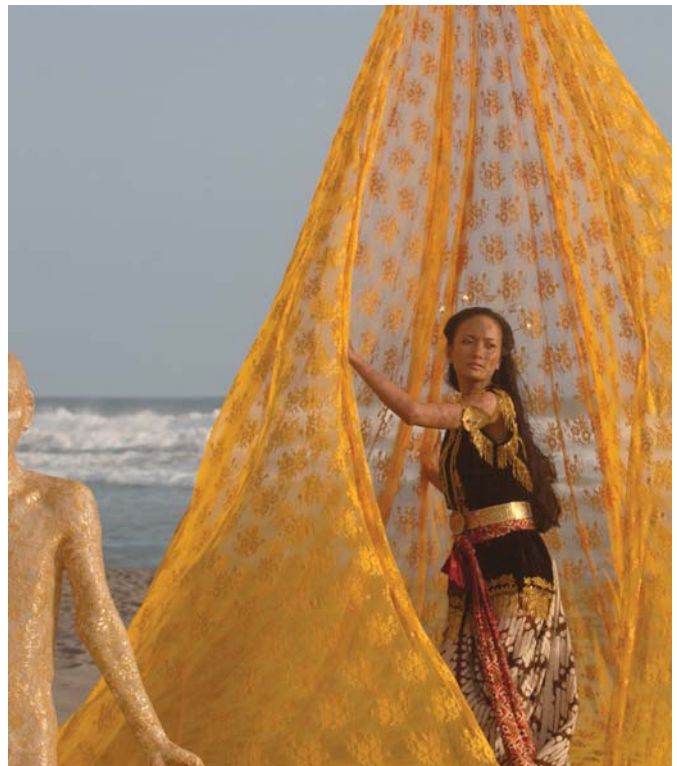
Opera Jawa juga menjadi penutup penyelenggaraan festival. Sebelumnya film-film Indonesia juga sempat diputar di FFIS dalam ajang Asian Cinema, antara lain "Betina" karya Lola Amaria, "3 Hari Untuk Selamanya" karya Riri Riza dan "Koper" karya Richard Oh.

Sejak diluncurkan tahun 2006, Opera Jawa telah banyak meraih penghargaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Antara lain predikat *Best Actress* (Artika Sari Devi)

dan *Best Composer* (Rahayu Supanggah) di Festival Tiga Benua Nantes, Perancis. Film ini lagi-lagi meraih *Best Composer* (Rahayu Sunpangah) di Hongkong International Festival Film.

Di ajang Festival Film Indonesia, Opera Jawa meraih penghargaan kategori Komposer Terbaik dan Penulis Cerita Adaptasi Terbaik (Garin Nugroho dan Armantono).

Philip Ceah sebagai direktur FFIS banyak berjasa membawa karya-karya Indonesia ke dunia internasional, seperti



Film Opera Jawa karya Garin Nugroho

"Cinta Dalam Sepotong Roti" karya Garin Nugroho.

FFIS telah memasuki tahun ke-20 sejak diselenggarakan tahun 1987. Festival ini telah menjadi festival bergengsi di

Asia dan telah membawa Asia ke pasar dunia. Fokus festival ini pada sinema Asia dan telah menjadi *platform* untuk film-film baru Singapura dan jendela film-film Asia Tenggara. ■ RH

Nagabonar Jadi Jawara

Enam penghargaan disabet sekaligus oleh film Nagabonar Jadi 2 dalam Festival Film Bandung (FFB) 2007, 29 April lalu. Pengumuman dilakukan di Hotel Horison, Bandung.

FFB ke-20 ini mengumpulkan 31 judul film dan 25 judul sinetron sebagai nominator. Seluruhnya sudah ditayangkan dalam kurun waktu satu tahun semenjak bulan Maret 2006.

Enam penghargaan untuk film Nagabonar Jadi 2 berasal dari nominasi *editing*, penulis skenario, pelakon pembantu terbaik dan pelakon utama pria terbaik, serta sutradara terbaik. Tiga kategori terakhir diperuntukkan Lukman Sardi, Tora Sudiro dan Dedi Mizwar.

FFB juga memberikan penghargaan khusus kepada pemain film, sutradara dan produser senior, Chitra Dewi (73). Panitia menilai dedikasi dan sumbangsihnya terhadap dunia perfilman Indonesia sangat tinggi. Penghargaan serupa pernah diberikan kepada Rahmat Hidayat dan Idris Sardi. ■ RH



Diskusi Putu dan Mahasiswa

Bekerja sama dengan Teater Sastra Universitas Indonesia dan Sampoerna untuk Pendidikan, Putu Wijaya dan Teater Mandiri, mengadakan diskusi teater dengan para mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Universitas Parahyangan, Universitas Kristen Petra, dan Institut Pertanian Bogor. Ini merupakan lanjutan Teater Mandiri 36 Tahun ke kampus-kampus.

Pada momen itu, para mahasiswa menanyakan seputar kehidupan teater yang kadang tak dipahami orang awam. Menurut Putu, setiap seniman diharapkan mengerti konsep yang ada, termasuk mempelajari naskah yang akan dipentaskan.

Para mahasiswa juga berkesempatan mengadakan *workshop* berupa perenungan, meditatif. Mulai mengingat apa saja yang ada di dalam ruangan itu dengan mata tertutup, mendengarkan suara di sekitar kampus dalam keheningan, gerakan dengan perasaan, saling percaya dengan sesama mahasiswa yang lain ketika beriringan menyusuri undakan tangga dari bangku penonton ke panggung pertunjukan. ■ RH





Dapur produksi di salah satu acara stasiun televisi.

Rating Bukan Segalanya

Keabsahan *rating* penonton televisi di Indonesia tidak pernah diaudit. Karenanya perlu dibentuk komisi yang bertugas memonitor hasil *rating*.

Kualitas siaran? Akh...itu nomor dua. Yang nomor satu mengejar *rating*—menjaring pemirsa. Semua stasiun televisi di Indonesia, kecuali TVRI, berlomba mengejar angka *rating*, mengabaikan mutu siaran. Yang konyol, stasiun TV bahkan mengabaikan norma dan nilai, sehingga berpotensi membohongi pemirsa.

Semestinya hanya siaran yang bermutu yang memperoleh *rating* tinggi. Karena itu, perlu dicurigai bahwa penentuan *rating* di negeri benar seratus persen. Bisa jadi hanya akal-akalan stasiun TV yang menggandeng lembaga survei pemirsa.

Demi pemasukan uang dari tayangan iklan dan SMS, stasiun TV tak mengindahkan etika ataukah mereka memang tidak peduli? Hak korban atau tersangka yang harusnya dilin-

dungi, kini banyak diabaikan. Banyak juga program TV yang tidak membawa pencerahan, tetapi sebaliknya malah membawa pembodohan.

Persoalan pertelevisian di tanah air kembali mengemuka tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi isi siaran seluruh stasiun televisi. Permintaan itu dinyatakan saat Presiden yang didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, menerima anggota KPI yang diketuai Sasa Djuarsa Senjaja serta anggota Dewan Pers yang dipimpin Ichlasul Amal (3/5).

“Presiden prihatin, apa yang ada di layar kaca sepenuhnya didikte oleh *rating*, yang tak semuanya berkualitas baik atau bercita rasa rendah,” ungkap ketua KPI Sasa Djuarsa Sen-

jaja. Sasa menafsirkan keluhan Presiden terhadap mutu siaran yang dinilai memprihatinkan, misalnya, program yang menampilkan dan mengeksploitasi sadisme, gosip, pelecehan terhadap perempuan, dan menghilangnya warna keindonesian. Banyak program televisi yang dinilai tak membawa pencerahan, tetapi sebaliknya justru membawa pembodohan.

Soal program TV yang membohongi, Sasa mengakui bahwa KPI memang menerima ribuan pengaduan dari warga. KPI, atas pengaduan tersebut, telah memberi teguran dan sanksi pada stasiun televisi yang menayangkan program yang dinilai melanggar. Sebaliknya, KPI juga memberikan penghargaan pada stasiun televisi yang sedikit melakukan pelanggaran. Dan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, KPI membuat nota kesepahaman dengan Polri untuk program berita. Sedangkan program berita, ditangani Dewan Pers, dan langkah selanjutnya, menurut Sasa, diperlukan batasan.

Terkait tayangan kekerasan dan pornografi di stasiun-stasiun TV nasional, KPI Pusat sudah pernah melaporkan LATIVI, ANTV, TRANS TV, TV 7 (Trans7), INDOSIAR, TPI, SCTV dan RCTI yang menayangkan muatan cabul dan menonjolkan unsur kekerasan dalam program-programnya ke Polri. Bukti-bukti rekaman pelanggaran ketentuan pidana sesuai UU (No.32/2002) disampaikan KPI ke Polri (14/12-2006). Bukti rekaman tersebut dimaksudkan untuk digunakan polisi sebagai dasar penuntutan. KPI menyatakan akan memantau adegan dalam suatu tayangan yang dilaporkan masyarakat, tapi penindakan secara hukum diserahkan kepada Kepolisian.

Di dalam pertemuan dengan Polri dan industri televisi (19/12-2006), KPI Pusat meminta agar mulai 1 Januari 2007 sudah tidak ada lagi tayangan pornografi dan kekerasan di layar televisi. Namun seperti keluhan Presiden, pertelevisian nasional sampai sekarang belum bersih dari tayangan-tayangan seperti itu. Karenanya, Presiden merasa perlu mendorong KPI untuk meningkatkan pengawasan.

Menanggapi permasalahan pertelevisian, pengamat media dan pengisi program televisi, Effendi Gazali mengemukakan, dalam membuat program televisi, *rating* tak bisa dijadikan acuan seperti dewa yang pasti benar. Apalagi di Indonesia, *rating* yang dibuat dan disebarluaskan tidak pernah diaudit dan diuji kesahihannya. Memang menurutnya, televisi tak bisa menghindarkan *rating* karena itu merupakan bagian dari industri televisi. Tapi yang menjadi masalah, *rating* di Indonesia tak pernah diaudit. “Saya menduga ada konspirasi,” kata Effendi seperti dikutip Kompas (4/5).

Menurut Effendi, agar *rating* bisa bermanfaat, perlu dibentuk komisi yang bertugas memonitor hasil *rating* yang dibuat seperti oleh AC Nielsen. Sedangkan anggota komisi monitor bisa berasal dari praktisi media maupun dari akademisi. ■ MS, SH



Tempat Anda Membeli

MAJALAH TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE TOKOH INDONESIA

Distributor Toko Buku:

PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67 Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

TB. GRAMEDIA ■ Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall ■ Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit ■ Hero Gatot Subroto ■ Melawai ■ Matraman ■ Kelapa Gading Mall ■ Cempaka Mas ■ Pintu Air ■ Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang ■ **TB. GUNUNG AGUNG** ■ Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede ■ Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38 ■ Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah ■ Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza ■ Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendean ■ Trisakti ■ **TB. GUNUNG MULIA** ■ Jalan Kwitang

OFFICE, HOTEL, MALL, DLL

■ Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone ■ Drug Store Hotel Sentral, Pramuka ■ Drug Store Hotel Sheraton, Gunung Sahari ■ Drug Store Hotel Maharaja, Tendean ■ Drug Store Hotel Century, Sudirman ■ Drug Store Hotel Menteng I ■ Drug Store Hotel Mega Matra, Matraman ■ Drug Store Hotel Menteng II ■ Drug Store Hotel Paninsula ■ Drug Store Hotel Ibis, Slipi ■ Drug Store Hotel Santika ■ Iana Drug Store Hotel Grand Melia, Rasuna Said ■ Anais Gift Hotel JW Marriot, Mega Kuningan ■ Drug Store Hotel Akasia ■ Drug Store Hotel Sahid Jaya ■ Drug Store Hotel Kristal ■ Drug Store Hotel Ambara ■ Hotel Classic, Jl. Samanudi ■ Hotel Mulia Senayan ■ Drug Store Hotel Beautique, Depan Mall Taman Anggrek Grogol ■ Mini Market Angkur 26, Jl. Angkur 26 Kayu Putih, Jaktim ■ Mini Market Ikhtiar, Jl. Utan Kayu No.91, Jaktim ■ PT Promexx, Toko Buku & Alat Tulis, Jl. Ir. Juanda ■ Kantin Permata, Gedung Plaza Permata Thamrin ■ Koperasi Wisma Bumi Putera, Sudirman ■ Bon's Café, Gedung Menara Mulia, Gatot Subroto ■ Tower Corner Gedung Graha Niaga, Sudirman ■ Mini Market Alamanda, Menara Dea K, Mega Kuningan ■ Esca Deli BEJ, Tower II ■ Koperasi Wisma Indomobil, Jl. MT Haryono Kav.8 ■ Koperasi Agape, Jl. MT Haryono Kav.04-05 ■ Tutik Mini Market, Jl. Siaga Raya Pejaten ■ Kopkar LIA, Kampus LIA Pengadegan ■ Mini Market Markaz, Jl. Radio Dalam Raya No.50 ■ Koperasi STIE Perbanas, Rasuna Said ■ Kopkar Wisma Kodel, Rasuna Said ■ Restoran Bona Petit Gedung Wisma Budi, Rasuna Said ■ Mini Market Basement Gedung Wisma 77 ■ Monika Mini Market, Gedung Wisma Adhi Graha ■ Hotel Fm Beautique, Jl. S Parman ■ Kantin BNI Kantor Pusat Sudirman ■ Cafeteria Elektrika, Rasuna Said ■ Kantin Depkes, Rasuna Said ■ Koperasi Depnaker RI, Gatot Subroto ■ PT Global Bisnis Center Bank Danamon, Sudirman ■ Mini Market Ananda, Rawa Sari ■ Lobby Drug Store Apartemen Kusuma Candra SCBD ■ Counter Majalah Wisma BCA, Sudirman ■ Swalayan Al Maidah ■ Drug Store Hotel Bina Sentra (Bidakara), Pancoran ■ Wartel Putra, Pulo Mas Utara ■ Menara Jamsostek, Gatot Subroto Lt.2 ■ Don's Mart ■ Valentine's Mart ■ Hotel Kemang ■ Hotel Millenium ■ Apartemen Mediterania Palace Kemayoran ■ Graha Surya Internusa, Rasuna Said ■ Hotel The Park Lane, Casablanca ■ Gedung Trans TV & Mega Bank

Distributor Agen:

■ **KEDARTON AGENCY:** Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176 ■ **AGEN UTAMA:** ■ KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451 ■ MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840 ■ HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471 ■ ANTO'S, Kalimalang, 08129256715 ■ DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180 ■ PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343 ■ TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175 ■ ARITONANG, Budi Utomo, 9220669 ■ RAELMAN, Budi Utomo, 9238167 ■ SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAO, Cawang, 8577453 ■ SIMATUPANG, Cililitan, 80880572 ■ SIMALUNGUN, Kramat, 88980567 ■ MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka ■ KA GROUP, Bekasi, 08129825236 ■ MANULLANG, Cimone, 08129590050 ■ YULIANI, Medan, 061-4157471 ■ MEDY, Surabaya, 031-83205231

Atau Hubungi:

BAGIAN SIRKULASI ■ E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **JAKARTA** Tel: 021-83701736 Fax: 021- 9101871 ■ **BIRO BANDUNG** 022-7830773 ■ **BIRO MEDAN** 061-7850260

TokohINDONESIA Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia

The Excellent Biography

www.tokohindonesia.com

THE EXPERIENCE SITE